

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**BUNG HATTA DALAM MENGHADAPI
PEMBERONTAKAN PKI (PARTAI KOMUNIS INDONESIA)
DI MADIUN 18 SEPTEMBER 1948**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh:
YULIUS DWI CAHYONO
NIM: 001314019

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2007**

SKRIPSI

**BUNG HATTA DALAM MENGHADAPI
PEMBERONTAKAN PKI (PARTAI KOMUNIS INDONESIA)
DI MADIUN 18 SEPTEMBER 1948**

Oleh:

YULIUS DWI CAHYONO
NIM: 001314019

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.

Tanggal..16..Juli..2007

Pembimbing II



Drs. Sutarjo Adikusilo J.R., S.Th.

Tanggal..16..Juli..2007

SKRIPSI

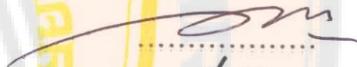
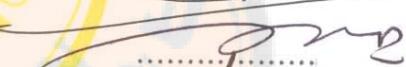
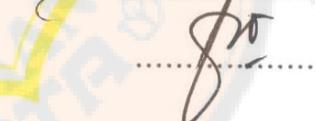
**BUNG HATTA DALAM MENGHADAPI
PEMBERONTAKAN PKI (PARTAI KOMUNIS INDONESIA)
DI MADIUN 18 SEPTEMBER 1948**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

YULIUS DWI CAHYONO
NIM: 001314019

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 27 Juli 2007
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Sutarjo Adikusilo J.R., S.Th.	
Sekretaris	Drs. B. Musidi, M.Pd.	
Anggota	Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.	
Anggota	Drs. Sutarjo Adikusilo J.R., S.Th.	
Anggota	Drs. B. Musidi, M.Pd.	

Yogyakarta, 27 Juli 2007

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma
Dekan



Drs. T. Sarkim, M.Ed., Ph.D.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

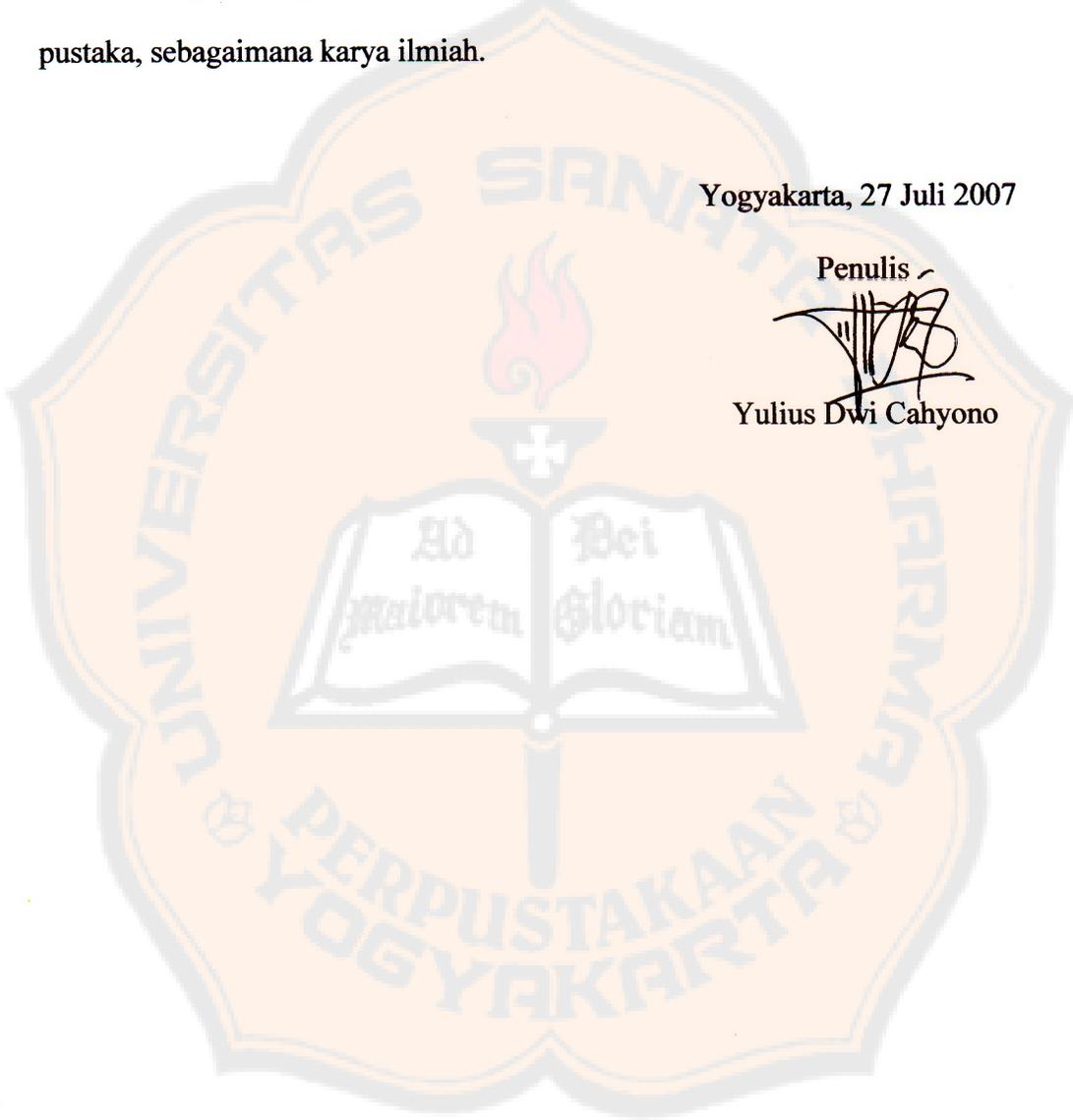
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya orang lain, kecuali yang telah disebut dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana karya ilmiah.

Yogyakarta, 27 Juli 2007

Penulis



Yulius Dwi Cahyono



ABSTRAK

Bung Hatta Dalam Menghadapi Pemberontakan
PKI (Partai Komunis Indonesia) Di Madiun 18 September 1948
Oleh : Yulius Dwi Cahyono

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisa “Bung Hatta Dalam Menghadapi Pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) Di Madiun 18 September 1948”.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode sejarah. Adapun langkah-langkah metode sejarah mencakup, heuristik, kritik sumber, interpretasi serta historiografi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politikologis. Skripsi ini ditulis secara diskriptif analitis.

Dari penelitian ini diketahui bahwa latar belakang Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 1948 adalah pertama, Bung Hatta memiliki kekuasaan sebagai perdana menteri pada khususnya dan memiliki kekuasaan sebagai menteri pertahanan. Dengan demikian penyelesaian atas peristiwa Madiun menjadi tanggung jawab Bung Hatta untuk menyelesaikannya. Di samping itu dengan memegang kekuasaan sebagai perdana menteri dan menteri pertahanan Bung Hatta memiliki wewenang untuk menghadapi pemberontakan PKI di Madiun. Kedua, pemberontakan PKI membahayakan kepentingan nasional.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 1948 adalah sebagai berikut: Sebagai perdana menteri usaha yang ditempuh oleh Bung Hatta: pertama, mengadakan sidang kabinet untuk menentukan sikap pemerintah terhadap PKI Muso, yang melakukan perampasan kekuasaan di Madiun. Usaha yang kedua adalah dengan mengusulkan kepada BPKNP sebuah undang-undang tentang pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaya, agar dengan segera disahkan. Sementara sebagai menteri pertahanan usaha yang ditempuh adalah dengan mengerahkan angkatan perang untuk menumpas pemberontakan tersebut.

Hasil usaha Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 1948 dapat disimpulkan berhasil dengan hasil sebagai berikut: (1).Kembalinya Madiun ke tangan pemerintah Republik Indonesia (2).Tertangkapnya Muso pimpinan utama PKI, dalam kondisi tidak bernyawa karena Muso tewas tertembak pasukan TNI ketika ia melakukan perlawanan saat akan ditangkap. (3).Tertangkapnya Amir Sjarifuddin beserta tokoh penting PKI lainnya, antara lain yaitu Djokosujono, Suripno, Harjono, dan Maruto Darusman.

ABSTRACT

Bung Hatta In Encountering the PKI (Partai Komunis Indonesia) Rebellion in Madiun on September 18 1948
By : Yulius Dwi Cahyono

This thesis aims to describe and analyze "*Bung Hatta In Encountering the PKI (Partai Komunis Indonesia) Rebellion in Madiun on September 18 1948*."

Historical method was used in the thesis. The stages of such method involves heuristic, critical sources, interpretation and historiography. The approach used in the research was politicological approach. This thesis was written in descriptive analysis.

Based on the research, it was identified that the background of *Bung Hatta* in encountering the PKI rebellion in Madiun 1948 were, first that he held power as prime minister, in particular, and minister of defence. Hence, resolution on the Madiun Affair turned out to be his responsibility. In addition, with his positions as both prime minister and minister of defence, *Bung Hatta* was authorized to encounter the PKI rebellion in Madiun. Secondly, the rebellion endangered national interest.

As prime minister, *Bung Hatta's* efforts to encounter the PKI rebellion in Madiun 1948 involved: firstly, by organizing cabinet meeting to determine government policy in the PKI Muso performing power seizure in Madiun; secondly, by sending act proposal to the BPKNP on full authority of power given for the President in case of emergency and urging for immediate ratification. As minister of defence, he mobilized armed forces to eradicate the rebellion.

It can be concluded that the achievements of *Bung Hatta* is efforts in encountering the PKI rebellion in Madiun 1948 were regarded successful as the following: (1).the re-acquisition of Madiun to the Republik Indonesia government; (2). the capture of Muso as the PKI main leader, in the condition of dead because he was shot by the TNI troops during fighting; (3).the seizures of Amir Sjarifuddin and other prominent PKI figures, among others, were Djokosujono, Suripno, Harjono, and Maruto Darusman.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih, skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Keluarga Besar FX. Pardijo
- ❖ Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah menuntun penulis menjadi sarjana pendidikan
- ❖ Spesial untuk Sahabatku Andi, Temanku Supreh, dan Seniorku Mas Duto, yang telah banyak membantu penulis
- ❖ Andi CS : Bintarto, Dodi, Dimas, Mardi, Nugroho, Viktor, Dani, Tari, Rahma, bersama kalian ada saja sesuatu yang membuat suasana menjadi lebih heboh dan seru. Terima Kasih atas persahabatannya selama ini

MOTTO

***Jangan Sanya Memiliki Keinginan yang Mengebu-gebu Tetapi
Tidak Memiliki Niat Untuk Mewujudkannya
(Penulis)***

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan kasihNya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan topik “Bung Hatta Dalam Menghadapi Pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) Di Madiun 18 September 1948”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, program studi Pendidikan Sejarah.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak. Bersamaan dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

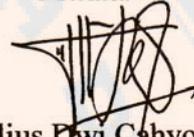
1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma
2. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan izin atas penulisan skripsi ini
3. Bapak Prof. Dr. P.J Suwarno, S.H., selaku dosen pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan masukan kepada penulis hingga skripsi ini selesai disusun.
4. Bapak Drs. Sutarjo Adisusilo J.R., S.Th., selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan kepada penulis hingga skripsi ini selesai disusun.
5. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

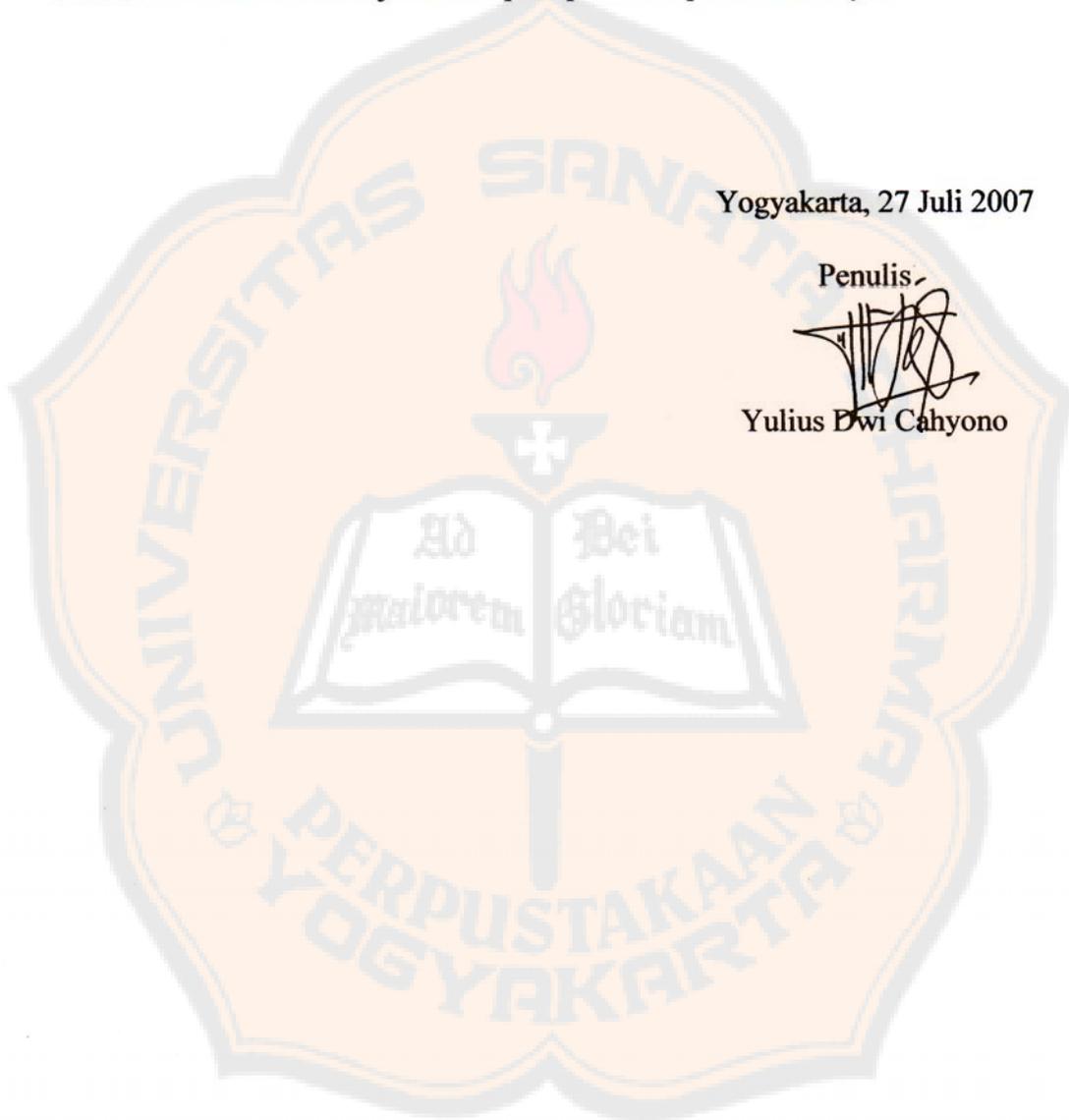
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran guna perbaikan di masa yang akan datang, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak terutama bagi mahasiswa Pendidikan Sejarah dan para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 27 Juli 2007

Penulis,



Yulius Dwi Cahyono



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

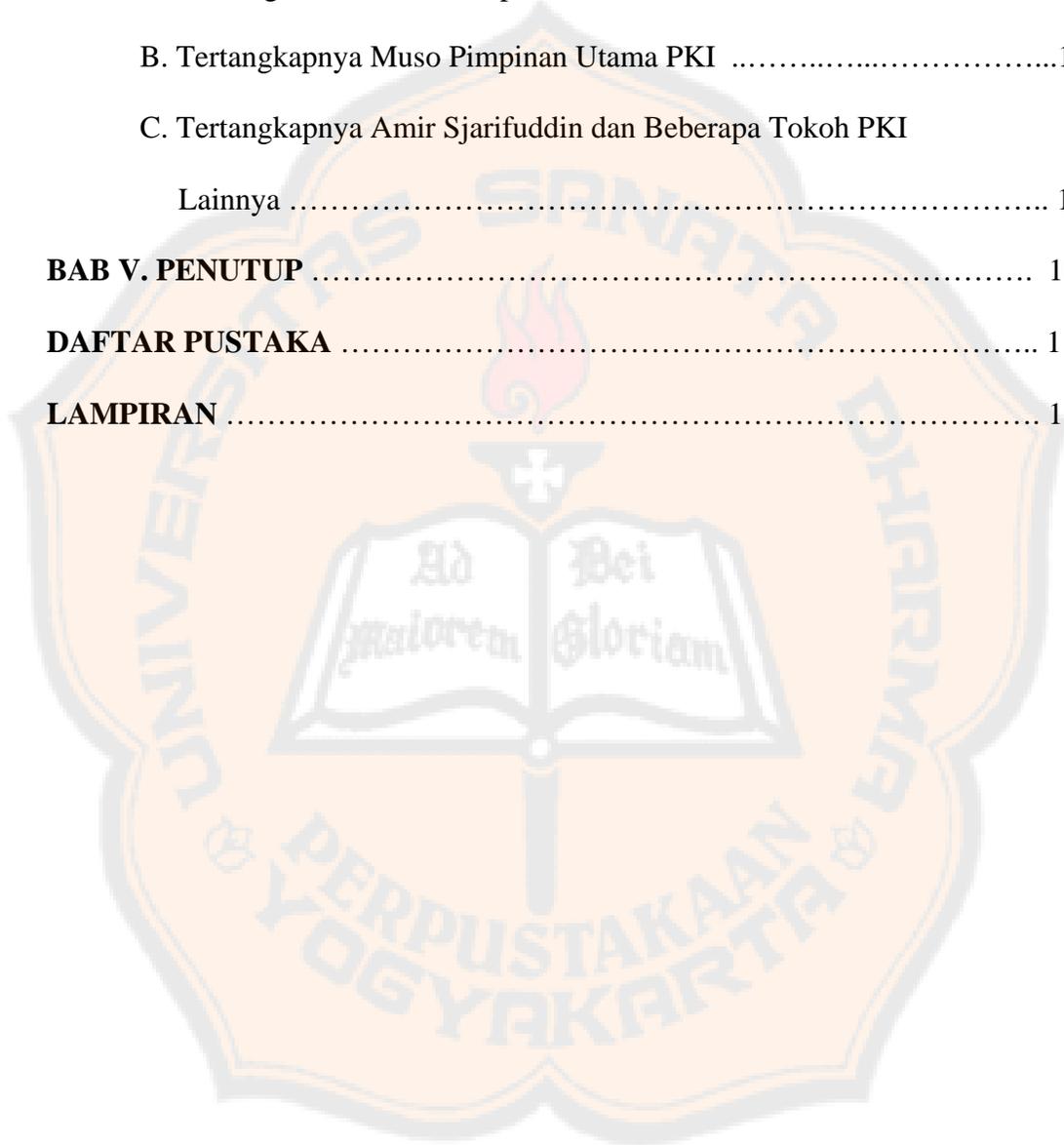
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Konseptual	12
G. Hipotesis	26
H. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	27
I. Sistematika Penulisan	35

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II. LATAR BELAKANG BUNG HATTA DALAM MENGHADAPI PEMBERONTAKAN PKI DI MADIUN 1948.....	37
A. Bung Hatta Sebagai Perdana Menteri	37
B. Latar Belakang Bung Hatta Menghadapi Pemberontakan PKI di Madiun 1948	50
1. Bung Hatta Memiliki Kekuasaan Sebagai Perdana Menteri	50
2. Bung Hatta Memiliki Kekuasaan Sebagai Menteri Pertahanan	51
3. Latar Belakang PKI Memberontak di Madiun	53
4. Kudeta yang dilakukan oleh PKI Muso Membahayakan Kepentingan Nasional	68
BAB III. USAHA-USAHA BUNG HATTA DALAM MENGHADAPI PEMBERONTAKAN PKI DI MADIUN 1948	74
A. Usaha Preventif Bung Hatta	74
1. Melakukan Mutasi Terhadap Personalia Angkatan Perang	79
2. Melakukan Penyehatan Terhadap Angkatan Perang	80
B. Usaha-usaha Bung Hatta dalam Menghadapi Pemberontakan PKI di Madiun 1948	83
1. Sebagai Perdana Menteri	93
a. Mengadakan Sidang Kabinet untuk Menentukan Sikap Pemerintah Terhadap PKI	93
b. Mengusulkan Undang-undang Tentang Pemberian Kekuasaan Penuh Kepada Presiden dalam Keadaan Bahaya	94
2. Sebagai Menteri Pertahanan	96

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV. HASIL USAHA BUNG HATTA DALAM MENGHADAPI PEMBERONTAKAN PKI DI MADIUN 1948	99
A. Kembalinya Madiun ke Tangan Pemerintah Republik Indonesia	99
B. Tertangkapnya Muso Pimpinan Utama PKI	105
C. Tertangkapnya Amir Sjarifuddin dan Beberapa Tokoh PKI Lainnya	106
BAB V. PENUTUP	108
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	114



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN	Halaman
Lampiran 1. Silabus Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	114
Lampiran 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	115
Lampiran 3. Gambar I. Mohammad Hatta	119
Lampiran 4. Gambar II. Sidang Kabinet Hatta untuk menentukan sikap pemerintah terhadap PKI Muso yang melakukan perampasan kekuasaan pemerintah di Madiun.....	120
Lampiran 5. Gambar III. Muso	121
Lampiran 6. Gambar IV. Amir Sjarifuddin dan beberapa tokoh PKI lainnya setelah tertangkap pasukan TNI	122

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabinet Amir Sjarifuddin jatuh pada tanggal 23 Januari 1948, karena penolakan masyarakat pada umumnya mengenai persetujuan Renville.¹ Hampir sepertiga dari anggotanya, yang meliputi menteri-menteri dari Masyumi dan PNI mengundurkan diri, sebagai bentuk penolakan mereka atas persetujuan Renville. Akan tetapi karena persetujuan tersebut sudah diterima pemerintahan Amir Sjarifuddin, Masyumi dan PNI bersedia ikut serta dalam menyelenggarakannya, dengan syarat dilakukan perubahan susunan kabinet (Kabinet Amir). Pada akhirnya Amir Sjarifuddin mengembalikan mandat kepada presiden. Kondisi ini yang kemudian memunculkan pertentangan politik mengenai persetujuan Renville di antara partai politik, khususnya FDR dengan Masyumi dan PNI. Pertentangan politik ini menjadi semakin kompleks dan mencapai puncaknya pada peristiwa pemberontakan PKI di Madiun.

Krisis kabinet sebagai akibat jatuhnya Kabinet Amir diatasi oleh pemerintah dengan membentuk kabinet baru yang dipimpin oleh Bung Hatta. Sebelum terbentuknya Kabinet, Bung Hatta mempunyai ide pokok untuk menjalin kerjasama di antara partai-partai politik dalam kabinetnya, termasuk dengan Amir Sjarifuddin yang duduk dalam Partai Sosialis. Kerjasama tersebut dimaksudkan untuk meredakan pertentangan politik di antara partai politik, dengan harapan lambat laun akan tercipta perdamaian di antara partai politik yang saling bertentangan. Kerjasama

¹ Deliar Noer, *Mohammad Hatta Biografi Politik*, Jakarta, LP3ES, 1990, hlm. 309.

yang diupayakan oleh Hatta dengan Partai Sosialis Amir Sjarifuddin ini sebenarnya didasarkan atas keinginan Hatta untuk membentuk kabinet yang mendapatkan dukungan nasional. Usaha Bung Hatta untuk merangkul partai tersebut ternyata tidak berjalan dengan mulus.

Bung Hatta menawarkan empat kursi kepada Amir Sjarifuddin seperti pada PNI dan Masyumi², akan tetapi ia meminta sepuluh kursi dengan alasan, partainya sudah berpengalaman melawan Belanda.³ Mendengar permintaan tersebut Bung Hatta berubah pikiran, dan paling banyak hanya dapat menerima dua orang. Amir Sjarifuddin menawar, paling sedikit hanya mau delapan kursi dalam kabinet. Kursi dalam kabinet yang diminta Amir Sjarifuddin meliputi jabatan-jabatan yang penting. Amir sendiri meminta jabatan menteri pertahanan. Sementara kedelapan kursi lainya yang diminta Amir Sjarifuddin untuk anggotanya meliputi jabatan menteri perburuhan dan sosial, menteri kemakmuran, menteri pembagian makanan, menteri penerangan, menteri luar negeri, menteri perhubungan, menteri pendidikan pengajaran dan kebudayaan, menteri kehakiman dan menteri dalam negeri.⁴

Mendengar permintaan tersebut Bung Hatta memutuskan tidak akan menawarkan lebih dari satu kursi. Amir Sjarifuddin tidak menerima keputusan yang diambil oleh Bung Hatta. Bung Hatta kemudian memberikan ultimatum ikut dalam kabinet dengan perwakilan yang wajar atau tidak sama sekali. Kepada mereka, Bung Hatta masih memberikan kesempatan untuk memberikan jawaban sampai pada pukul 22:00 wib tanggal 28 Januari 1948. Pukul 22:00 wib kurir mereka meminta

² Soe Hok Gie, *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan Kisah Pemberontakan Madiun September 1948*, Yogyakarta, Bentang Budaya, 1997, hlm. 163.

³ Mohammad Hatta, *Mohammad Hatta Memoir*, Jakarta, Tintamas Indonesia, 1979, hlm. 523.

⁴ *Ibid*, hlm. 522.

perpanjangan sampai pukul 24:00 wib. Pada pukul 24:00 wib akhirnya jawaban diberikan, jawaban mereka tetap sama, Amir Sjarifuddin meminta paling sedikit sembilan kursi, Bung Hatta kemudian dengan tegas menolak. Pendapat Bung Hatta pada waktu itu sudah bulat, “aku akan menerima satu orang dari antara mereka dan yang seorang itu ialah Mr. Amir Sjarifuddin sendiri, tetapi tidak untuk Kementerian Pertahanan”.⁵

Pada akhirnya Bung Hatta tidak memiliki pilihan lain kecuali menjalankan kabinet tanpa keikutsertaan Partai Sosialis Amir Sjarifuddin. Penolakan ini dilatarbelakangi adanya kecurigaan Hatta bahwa kelompok Amir Sjarifuddin akan melakukan sabotase.⁶ Indikasi untuk melakukan sabotase tersebut nampak ketika mereka mengincar beberapa kedudukan penting dalam Kabinet Hatta. Kedudukan yang diincar tersebut salah satunya seperti yang telah disebutkan di atas yaitu jabatan menteri pertahanan yang diminta oleh Amir Sjarifuddin. Suatu jabatan yang sangat tepat untuk dipegang jika seseorang ingin melakukan sabotase maupun kudeta.

Pada tanggal 29 Januari 1948 Kabinet Hatta terbentuk, dengan susunan sebagai berikut:⁷

Perdana Menteri	: Mohammad Hatta
Menteri Luar Negeri	: H. Agus Salim
Menteri Dalam Negeri	: dr. Soekiman
Menteri Pertahanan	: Mohammad Hatta
Menteri Keuangan	: Mr. A.A. Maramis
Menteri Perhubungan	: Ir. Djuanda

⁵ *Ibid.* hlm. 526.

⁶ *Ibid.*, hlm. 522.

⁷ *Ibid.*, hlm. 521.

Menteri Penerangan	: Mohd. Natsir
Menteri Kesehatan	: dr. Leimena
Menteri Perburuhan & Sosial	: Kusnan
Menteri Kehakiman	: Mr. Susanto Tirtoprodjo
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	: Mr. Alisastroamidjojo
Menteri Pekerjaan Umum	: Ir. Laoh
Menteri Kemakmuran	: Mr. Sjafruddin Prawiranegara
Menteri Pembagian Makanan Rakyat	: I.J. Kasimo
Menteri Agama	: K.H. Maskur
Menteri Negara	: Sultan Hamengku Buwono IX
Menteri Pembangunan & Pemuda	: Supeno

Dilihat dari asal partai dan organisasi dari masing-masing anggota kabinet adalah sebagai berikut : Mohammad Hatta (non partai), Ir Djuanda (non partai), H. Agus Salim (non partai), Sultan Hamengku Buwono IX (non partai), dr. Soekiman (Masyumi), Mr. Sjafruddin Prawiranegara (Masyumi), K.H. Maskur (Masyumi), Mohd. Natsir (Masyumi), Mr. Susanto Tirtoprodjo (PNI), Mr. A.A. Maramis (PNI), Mr. Alisastroamidjojo (PNI), Ir. Laoh (PNI), I.J. Kasimo (Partai Katolik), dr. Leimena (Partai Kristen), Kusnan (Persatuan Guru R.I), Supeno (Partai Sosialis).⁸

Dalam waktu kurang lebih tiga minggu kabinet telah berhasil menyusun program kabinetnya tepatnya pada tanggal 16 Febuari 1948. Adapun program kabinet tersebut salah satunya adalah menyelenggarakan Persetujuan Renville.

⁸ Kahin. George Mc Truman, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, UNS Perss- Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 293.

Supeno pada tanggal 13 Februari 1948 keluar dari Partai Sosialis yang diketuai oleh Sjahrir, dalam Kabinet Hatta ia berdiri sebagai perseorangan dan bukan sebagai anggota Partai Sosialis.

Sementara dalam tubuh Partai Sosialis terjadi perpecahan. Hal ini disebabkan karena terjadi perbedaan prinsip antara pengikut Amir Sjarifuddin dengan pengikut Sutan Sjahrir. Amir Sjarifuddin bersikap keras menentang Kabinet Hatta, sedangkan Sutan Sjahrir mendukung Kabinet Hatta. Sebagai akibatnya pada tanggal 26 Februari 1948 Amir Sjarifuddin mendirikan partai baru bernama Front Demokrasi Rakyat (FDR).

Setelah FDR berdiri, Amir Sjarifuddin melakukan perputaran terhadap pendirian politiknya. Semula Amir Sjarifuddin sebagai pencetak persetujuan Renville, yang menyetujui persetujuan tersebut, kemudian beralih menentang persetujuan Renville. Suatu perputaran pendirian yang menunjukkan adanya keganjilan politik. Berhubungan dengan perputaran pendirian tersebut, FDR kemudian berdiri sebagai partai oposisi menentang pemerintah dalam rangka menumbuhkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah, untuk menjatuhkan Kabinet Hatta. “Sebenarnya yang dikehendaki FDR waktu itu ialah terbentuknya satu pemerintahan parlementer yang dipimpin oleh golongan mereka”.⁹ Oleh karena itu FDR berdiri sebagai partai oposisi.

Oposisi FDR antara lain direalisasikan dengan membuat sebuah program nasional antarlain sebagai berikut:¹⁰ pertama, pembatalan persetujuan Renville. Kedua, penghentian perundingan-perundingan dengan Belanda sampai mereka menarik diri dari bumi Indonesia. Ketiga, nasionalisasi semua kekayaan Belanda tanpa ganti rugi. Keempat, pembubaran kabinet presidensial Hatta dan pembentukan kabinet parlementer di mana wakil-wakil FDR diikutsertakan dengan menduduki kursi-kursi yang terpenting. Usaha ini pun mengalami kegagalan. Walaupun

⁹ Wangsa Widjaja, I., *Mengenang Bung Hatta*, Jakarta, CV Haji Masagung, 1988, hlm. 63.

¹⁰ Moedjanto, G., *Indonesia Abad ke-20 jilid 2*, Yogyakarta, Kanisius, 1988, hlm. 31.

demikian upaya FDR untuk melancarkan oposisinya terhadap pemerintah tidak berhenti sampai di sini.

“Oposisi dari pihak FDR semakin digiatkan setelah kedatangan Muso ke Indonesia pada bulan Mei 1948, yang disambut baik oleh Amir Sjarifuddin”.¹¹ Kedatangan Muso bagi Amir diharapkan dapat memperkuat FDR dalam menghadapi pemerintahan Kabinet Hatta. Pada tanggal 2 September 1948 kedudukan Amir Sjarifuddin dalam front komunis tergeser oleh Muso, dan FDR bubar karena partai-partai politik dan organisasi massa yang tergabung di dalamnya ke luar dan menyatakan bergabung ke dalam PKI Muso. Perjuangan golongan kiri atau sayap kiri kemudian dilanjutkan dalam wadah Partai Komunis Indonesia pimpinan Muso. Golongan kiri yang dimaksud dalam skripsi ini adalah partai politik dan organisasi massa yang berhaluan komunis, seperti PKI, Partai Sosialis, SOBSI, Pesindo, BTI, Lasykar Rakyat, GRI, kemudian kelompok ini menamakan dirinya Front Demokrasi Rakyat (FDR).¹²

Sebagai akibat gagalnya PKI dalam upaya menjatuhkan Kabinet Hatta melalui jalur parlementer, terbukti bahwa Kabinet Hatta masih tetap utuh, PKI pimpinan Muso mulai mengambil langkah baru untuk mengambil alih kekuasaan pemerintah. Hal ini ditempuh dengan jalan kekerasan, yaitu dengan melakukan pemberontakan yang berpusat di Madiun. Setelah Madiun berhasil dikuasai, PKI kemudian menyatakan lepas dari pemerintahan RI pimpinan Soekarno-Hatta.

¹¹ Wangsa Widjaja, I., *op.cit*, hlm. 63.

¹² A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 8 Pemberontakan PKI 1948*, Bandung, DISJERAH-AD, Angkasa, 1979, hlm. 13.
yang tergolong partai politik adalah PKI, Partai Sosialis dan GRI (Gerakan Rakyat Indonesia) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gerindo, sedangkan yang tergolong organisasi massa adalah SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), PESINDO (Pemuda Sosialis Indonesia), BTI (Barisan Tani Indonesia) dan Lasykar Rakyat.

Munculnya pemberontakan PKI di Madiun ini menjadi suatu ujian yang berat bagi pemerintah Republik Indonesia pada masa Kabinet Hatta. Hal ini dikarenakan di samping menghadapi pemberontakan PKI di Madiun, pemerintah juga harus menghadapi Belanda yang mulai menunjukkan gejala akan melakukan agresi militernya yang kedua. Bung Hatta dalam peristiwa pemberontakan ini merupakan salah satu tokoh yang turut berperan dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 1948.

Skripsi dengan topik “Bung Hatta dalam Menghadapi Pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) di Madiun 18 September 1948“. Pada intinya akan membahas dan menjelaskan Bung Hatta sebagai salah satu tokoh yang turut serta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun. Topik skripsi ini menarik dan penting untuk diteliti, adapun alasannya adalah Bung Hatta merupakan seorang tokoh yang pertama kali dalam sejarah Indonesia yang berani menentukan sikap politik luar negeri bangsa Indonesia untuk bersikap netral, yaitu ketika Indonesia dihadapkan pada dua kekuatan adikuasa Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sikap netral tersebut dapat ditunjukkan ketika Muso menuntut agar pemerintah pro terhadap Uni Soviet, Bung Hatta menolaknya dengan tegas.¹³ Berkaitan dengan sikap Muso yang pro Uni Soviet, Muso pernah mengatakan bahwa “Uni Soviet adalah pemimpin revolusi dunia dan revolusi Indonesia adalah bagian dari revolusi dunia; jadi, Indonesia berada di bawah Soviet. Kalau dipihak Uni Soviet kita adalah benar”.¹⁴

Sikap netral Hatta kepada Amerika Serikat maupun Uni Soviet, pada masa menjelang meletusnya pemberontakan PKI di Madiun, sebenarnya dimaksudkan oleh

¹³ *Ibid*, hlm. 138.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 209.

Bung Hatta untuk mendidik bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang dapat menentukan sikapnya sendiri dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Sebenarnya inti dari ide Hatta yaitu, agar Indonesia jangan sampai menjadi obyek dalam pertarungan politik internasional, akan tetapi harus menjadi subyek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, dan berhak memperjuangkan tujuan yang ingin kita capai yaitu merdeka sepenuhnya.

Tokoh Bung Hatta perlu untuk dikaji, karena ia merupakan salah satu figur tokoh nasionalis Indonesia yang penting. Hal ini dapat dibuktikan dari tindakan dan cita-cita Bung Hatta untuk mewujudkan Indonesia Merdeka. Kemerdekaan yang diharapkan oleh Bung Hatta adalah kemerdekaan yang sepenuhnya. Kemerdekaan sepenuhnya mengandung arti, bukan saja bebas dari penjajahan akan tetapi juga bebas dari campur tangan dari negara lain yang berusaha mengatur negara kita. Kemerdekaan sepenuhnya juga berarti terciptanya kehidupan rakyat yang adil-makmur untuk semua lapisan masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi Bung Hatta menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 1948 ?
2. Apa saja usaha Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 1948 ?

3. Apa saja hasil usaha Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 1948 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisa latar belakang Bung Hatta menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 1948.
2. Mendeskripsikan dan menganalisa usaha-usaha Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 1948.
3. Mendeskripsikan hasil usaha Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 1948.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi dunia pendidikan khususnya ilmu sejarah, penulisan ini dapat menambah informasi dan memperkaya khasanah pengetahuan mengenai sejarah Indonesia, khususnya mengenai Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 18 September 1948.
2. Bagi mahasiswa program studi pendidikan sejarah, hasil penulisan ini dapat memperluas dan menambah pengetahuan mengenai sejarah Indonesia khususnya mengenai Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 18 September 1948, sekaligus dapat digunakan sebagai informasi tambahan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan topik skripsi ini.

3. Bagi pembaca pada umumnya, hasil penulisan ini dapat menambah sumber bacaan tentang sejarah Indonesia, khususnya mengenai Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 18 September 1948. Bagi generasi muda dapat menambah pengetahuan tentang sejarah Indonesia yang hampir terlupakan dan tidak diketahui generasi muda jaman sekarang.

E. Tinjauan Pustaka

Sumber data dalam skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dengan demikian data-data maupun fakta-fakta yang dicari untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan topik dan permasalahan yang akan diteliti. Adapun sumber kepustakaan yang turut memberikan sumbangan dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Adapun yang dimaksud dengan sumber primer dan sumber sekunder adalah sebagai berikut, sumber primer adalah keasaksian yang disampaikan oleh seseorang dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan pancaindra yang lain, atau dengan alat mekanis seperti diktafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya.¹⁵ Sumber sekunder adalah kesaksian yang disampaikan oleh siapapun yang bukan merupakan saksi mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahnya.¹⁶

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa dalam penulisan ini digunakan dua macam sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber primer yang dipakai adalah Mohammad Hatta. (1979). *Mohammad Hatta Memoir*. Jakarta:

¹⁵ Louis Gottchalk, *Mengerti Sejarah trj. Noto Nugroho Susanto*, Jakarta , UI Pers, 1969, hlm. 35.

¹⁶ *Idem*

Tintamas. Buku ini berisi pengungkapan Bung Hatta sebagai pelaku sejarah antara lain dari masa kabinet Amir Sjarifuddin, masa Bung Hatta membentuk kabinetnya, masa FDR dalam menjalankan politiknya untuk memperoleh kedudukan dalam kabinet Hatta sampai masa kedatangan Muso dan pemberontakan PKI di Madiun 1948. Sumber primer yang kedua adalah Abdul Haris Nasution. (1979). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 8 Pemberontakan PKI 1948*. Bandung: DISJARAH-AD dan Angkasa. Buku karya Abdul Haris Nasution ini berisi tentang sejarah pemberontakan PKI Madiun yang ditulis secara lengkap berdasarkan pengalamannya sebagai pelaku sejarah dalam peristiwa tersebut. Kisah yang dituangkan dalam buku ini antarlain berisi tentang FDR sebagai partai oposisi sampai dengan upaya pemerintah dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun.

Sedangkan beberapa sumber sekunder yang dipakai antara lain: pertama, Himawan Soetanto. (1994). *Perintah Presiden Soekarno Rebut Kembali Madiun (Siliwangi Menumpas Pemberontakan PKI/Moeso 1948)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Buku ini berisi informasi mengenai gerakan PKI dalam melakukan oposisi terhadap pemerintah Hatta dan upaya penumpasan pemberontakan PKI oleh Divisi Siliwangi. Kedua, Pinardi. (1967). *Peristiwa Coup Berdarah P.K.I September 1948 di Madiun*. Jakarta: INKOPAK-HAZERA. Buku ini memberikan banyak informasi mengenai peristiwa Madiun mulai dari awal mula terjadinya peristiwa Madiun sampai pada upaya pemerintah untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun 1948. Ketiga, Deliar Noer. (1990). *Mohammad Hatta Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES. Buku ini berisi mengenai sejarah Bung Hatta sebagai perdana menteri sampai meletusnya pemberontakan PKI Madiun 1948.

F. Kerangka Konseptual

Dalam rangka penyusunan skripsi dengan topik Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) di Madiun 18 September 1948, perlu dijelaskan beberapa konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Adapun konsep yang akan digunakan adalah: menghadapi, pemberontakan, komunisme, dan pemerintah. Konsep-konsep tersebut perlu dijelaskan karena dipakai sebagai landasan berpikir, pembatasan masalah, dan untuk menghindari terjadinya multi interpretasi. Konsep-konsep tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Menghadapi

Bung Hatta merupakan tokoh yang turut berperan dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun. Kata menghadapi perlu untuk dijelaskan karena dapat memunculkan multi interpretasi, mengingat kata tersebut memiliki makna lebih dari satu. Oleh karena itu perlu diperjelas secara spesifik makna mana yang dimaksud dalam skripsi ini. Menghadapi mengandung arti bertemu muka, menjumpai, menjelang, melawan dan menyambut.¹⁷ Pengertian dari menghadapi yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah melawan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa kata menghadapi menunjukkan makna perlawanan Bung Hatta terhadap PKI yang melakukan pemberontakan di Madiun.

Melawan dalam konteks ini diupayakan oleh Bung Hatta dalam bentuk tindakan pengambilan kebijaksanaan pemerintah, keputusan dan perintah yang mengutamakan kepentingan nasional dalam menyelesaikan permasalahan yang direalisasikan dengan bantuan tokoh nasionalis yang lain atau pihak lain. Sebagai

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988, hlm. 290.

contohnya adalah keputusan yang diambil oleh Bung Hatta dalam sidang kabinet untuk menumpas pemberontakan PKI. Guna merealisasikan keputusan tersebut Bung Hatta memerintahkan Panglima Besar Jendral Soedirman untuk melaksanakannya.

Dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun Bung Hatta menggunakan pendekatan militer. Sebelum meletusnya pemberontakan sebenarnya Bung Hatta sudah mengupayakan penyelesaian konflik dengan pendekatan persuasif, dalam mengatasi konflik antara FDR dengan pemerintah. Upaya tersebut sudah dijalankan sejak awal mula konflik terjadi, antara Bung Hatta dengan Amir Sjarifuddin, yaitu pada saat Amir Sjarifuddin mengajukan tuntutan untuk mendapatkan separuh kursi dalam kabinet Hatta. Sementara Bung Hatta tidak bisa menerima tuntutan tersebut karena, Partai Sosialis Amir Sjarifuddin pada waktu itu tidak mendapatkan dukungan yang cukup untuk memperoleh separuh kursi dalam kabinet Hatta. Dalam mengatasi hal ini diadakan pembicaraan di antara kedua belah pihak yaitu antara Bung Hatta dengan Amir Sjarifuddin untuk mencari kesepakatan dalam menentukan seberapa banyak kursi yang dapat diberikan kepada golongan Amir Sjarifuddin.

Perundingan tersebut pada akhirnya gagal dan tidak ada kesepakatan yang dihasilkan. Gagalnya perundingan ini dikarenakan sikap keras Amir Sjarifuddin untuk mendapatkan separuh kursi dalam kabinet Hatta. Sikap keras pihak Amir Sjarifuddin tersebut justru memunculkan kecurigaan pada diri Bung Hatta bahwa mereka akan melakukan suatu sabotase. Hal ini dikarenakan sebagai partai yang mendapat dukungan terkecil mereka bersikeras meminta separuh kursi, selain itu jabatan yang diminta adalah jabatan yang tergolong penting salah satunya adalah jabatan menteri pertahanan. Bung Hatta yang semula dapat memberikan paling

banyak dua kursi, mengubah pendiriannya menjadi satu kursi atau tidak sama sekali bagi kelompok Amir Sjarifuddin. Bung Hatta dalam hal ini tidak mau mengambil resiko terjadinya sabotase dalam pemerintahannya, dengan menerima tuntutan Amir Sjarifuddin tersebut.

Upaya persuasifpun gagal dilaksanakan mengingat kedua belah pihak tetap pada pendirian masing-masing. Konflikpun terus berkembang dan mencapai puncaknya pada saat meletusnya pemberontakan PKI di Madiun. Pada saat meletusnya pemberontakan PKI di Madiun Bung Hatta tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan pendekatan militer dalam penyelesaian konflik tersebut. Dengan pertimbangan pendekatan persuasif tidak mungkin dilaksanakan lagi karena pendirian masing-masing pihak sudah menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Pemberontakan PKI tidak mewakili kepentingan nasional. Selain itu pemberontakan PKI justru menambah suasana dalam negeri menjadi semakin kacau. Oleh karena itu Bung Hatta memutuskan untuk menggunakan pendekatan militer dalam penyelesaiannya, untuk menghindari semakin terpuruknya nasib bangsa Republik Indonesia.

2. Pemberontakan

Dalam peristiwa Madiun, PKI sebagai pihak yang melakukan pemberontakan merupakan partai yang menganut paham komunis. Komunisme sendiri sebagai suatu ideologi mengajarkan cara-cara yang radikal seperti pemberontakan dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Jadi wajar jika setiap gerakan komunis diwarnai dengan suatu pemberontakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

cara-cara yang radikal menjadi ciri khas dari setiap gerakan komunis dalam memperjuangkan kepentingan mereka.

Adapun yang dimaksud dengan pemberontakan adalah usaha perebutan kekuasaan terhadap penguasa yang sah oleh kelompok yang tidak puas dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah.¹⁸ Pemberontakan yang dimaksudkan dalam penulisan skripsi ini adalah pemberontakan yang dilakukan oleh PKI pimpinan Muso di Madiun pada tahun 1948. Jadi intinya kata pemberontakan dalam skripsi ini menunjukkan pada usaha PKI Muso untuk merebut dan menumbangkan kekuasaan pemerintah.

Pemberontakan PKI di Madiun sebenarnya merupakan kelanjutan konflik dan puncak konflik antara pemerintah dengan golongan kiri yang dimulai sejak jatuhnya kabinet Amir Sjarifuddin. Pemberontakan PKI ini sebenarnya ditujukan untuk menggantikan pemerintahan Hatta dengan pemerintahan yang dikendalikan sepenuhnya oleh PKI, dengan alasan pemerintahan Hatta dipandang melakukan kekeliruan yang besar dengan melaksanakan persetujuan Renville dengan perantara KTN (Komisi Tiga Negara). Perundingan itu dipandang tidak ada gunanya dan harus dibatalkan, apa lagi ditambah dengan hadirnya wakil dari Amerika Serikat sebagai anggota KTN.

PKI memiliki pandangan bahwa persetujuan itu hanya akan menguntungkan Belanda dengan hadirnya wakil dari Amerika Serikat, yang merupakan sekutu dari Belanda. PKI memiliki pemikiran bahwa sebaiknya Indonesia mencabut politik non bloknya dan memihak kepada Uni Soviet untuk mendapatkan dukungan dalam

¹⁸ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm. 409.

melakukan perjuangan melawan Belanda. Dalam pandangan PKI, Indonesia tidak akan mendapatkan dukungan yang cukup dari dunia internasional dalam persetujuan Renville. Oleh karena itu PKI berpandangan lebih baik membatalkan persetujuan tersebut dan berkiblat ke Moskow untuk mendapatkan dukungan dalam melawan Belanda.

Pada masa Amir Sjarifuddin aspirasi golongan kiri untuk menjatuhkan kabinet Hatta disalurkan dalam wadah partai yang bernama FDR (Front Demokrasi Rakyat). Ada indikasi bahwa pemberontakan sudah dipersiapkan oleh partai ini jika segala upaya parlementer yang mereka jalankan untuk merebut kembali pemerintahan ke tangan mereka gagal. Akan tetapi segala upaya FDR melalui jalur parlementer untuk menjatuhkan Kabinet Hatta tidak membuahkan hasil sedikitpun. Setelah kedatangan Muso di Indonesia kepemimpinan golongan kiri diambil alih olehnya, FDR pun akhirnya bubar, dan perjuangan golongan kiri dilanjutkan ke dalam wadah PKI. PKI Muso ini didukung oleh partai-partai politik dan organisasi massa yang semula menjadi pendukung dari partai FDR, termasuk Amir Sjarifuddin sendiri sebagai pendiri FDR.

3. Komunisme

Konsep komunisme perlu dijelaskan karena PKI merupakan partai yang menganut paham komunis. Dengan diketahuinya konsep komunisme maka kita akan jauh lebih mudah dalam memahami dasar perjuangan partai yang berhaluan komunis. Komunisme dan Marxisme pada dasarnya adalah dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Komunisme menurut Miriam Budiardjo merupakan sistem sosial-

politik, ideologi dan gaya hidup yang mencerminkan nilai-nilai Marxisme.¹⁹ Sedangkan Marxisme dipahami sebagai ajaran atau doktrin yang bersumber pada ide-ide Marx dan Engles.²⁰ Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa komunisme itu berbeda dengan marxisme. Komunisme sifatnya lebih luas dari marxisme, sementara marxisme merupakan salah satu bagian daripada komunisme. Jadi komunisme itu tidak hanya terdiri dari marxisme, akan tetapi juga terdiri dari leninisme yaitu, marxisme yang direvisi dan dikembangkan oleh Lenin, dan stalinisme yaitu, marxisme yang dikembangkan dan di revisi oleh Stalin.

Komunisme tumbuh dan berkembang di Indonesia berkat perantara seorang berkebangsaan Belanda bernama Sneevliet. Pada awalnya untuk menyebarkan paham komunis di Indonesia dilakukan dengan mendirikan perkumpulan yang bernama Perhimpunan Sosial Demokrasi Hindia dalam bahasa Belanda disebut ISDV (*Indische Sociaal Democratische Vereniging*). Melalui ISDV ini Sneevliet berhasil memasukan kadernya dalam Sarekat Islam, yakni Semaun dan Darsono, sehingga Sarekat Islam pecah menjadi dua yaitu Sarekat Islam Putih yang diwakili Kyai Haji Agus Salim dan Abdul Muis dan Sarekat Islam Merah yang diwakili oleh Semaun dan Tan Malaka sebagai pendukung Marxis. Pengikut-pengikut Sarekat Islam Merah pada tanggal 23 Mei 1920 mendirikan Organisasi Perserikatan Komunis India (PKI). Organisasi ini merupakan organisasi politik yang merupakan kelanjutan dari ISDV. Dalam perkembangannya yaitu pada pertengahan tahun 1924 dalam kongres di Jakarta PKI memakai nama Partai Komunis Indonesia.

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta , Gramedia, 2003, hlm. 87.

²⁰ Sutarjo Adisusilo, J.R., *Kapita Selekta Sejarah Eropa Abad XVIII-XIX*, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 1998, hlm. 117.

Pada tahun 1924 PKI dilarang oleh pemerintah Belanda. Oleh karena itu PKI mulai merencanakan perlawanan terhadap pemerintah Belanda untuk mendapatkan kebebasannya dalam melancarkan gerakan komunisnya di Indonesia. Walaupun pada akhirnya perlawanan ini mengalami kegagalan, dan tokoh-tokohnya melarikan diri di pengasingan, seperti halnya Muso yang melakukan pengasingan di Moskow. Dari sinilah awal mula lahirnya Partai Komunis Indonesia. Setelah PKI sempat tenggelam karena perlawanan PKI 1926 berhasil dipadamkan oleh Belanda, akhirnya pada masa kedatangan Muso kembali ke Indonesia pada tahun 1948, PKI hidup kembali.

Dalam kaitannya dengan komunisme Marx (Karl Marx), Lenin (Vladimir Ilyich Lenin), dan Stalin (Joseph Stalin) merupakan tiga tokoh utama komunis. Marx adalah peletak dasar dari komunisme, sementara Lenin dan Stalin secara praktis adalah peletak dasar dari lahirnya negara komunis pertama di Eropa yaitu Uni Soviet. Dari ketiga tokoh komunis di atas Muso merupakan pengikut ajaran Lenin.²¹ Selain menyerap ajaran Lenin, Muso juga bersikap pro terhadap Uni Soviet. Agar lebih jelas dalam memahami komunisme penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai paham komunis dari tokoh-tokoh di atas yang berkaitan langsung dengan skripsi ini. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Marxisme

Marxisme perlu disampaikan dalam skripsi ini sebatas untuk mengetahui dasar-dasar dari komunisme, karena dalam marxisme terdapat sekumpulan ajaran yang menjadi dasar dari komunisme. Dengan kata lain marxisme adalah dasar dari komunisme. Pendiri dari marxisme ini adalah Karl Marx dan Friderich Engels.

²¹ Arief Priyadi, *Wawancara dengan Sayuti Melik*, Jakarta, CSIS, 1986, hlm. 297.

Tujuan utamanya adalah menjatuhkan kapitalisme yang sangat merugikan bagi kaum proletar pada abad ke 19.

“Pada pertengahan Abad ke-19 itu kehidupan kaum buruh di Eropa Barat dikatakan oleh Marx sangat menyedihkan.”²² Kaum buruh yang dimaksud oleh Marx adalah orang yang tidak memiliki modal atau harta apapun kecuali tenaga. Dengan demikian nasib mereka menjadi semakin buruk. “Sedangkan kaum kapitalis semakin kaya-raya dan dapat bertindak semau-maunya lantaran modal yang dimilikinya.”²³ Melihat kondisi ini Marx berkeinginan membela dan memperbaiki nasib kaum buruh. Menurut Marx perbaikan nasib kaum buruh ini dapat diwujudkan dengan jalan merebut kekuasaan negara dari kaum kapitalis dan mewujudkan negara yang dikuasai oleh kaum buruh sebagai diktator proletariat.

Inti dari komunisme yang dilahirkan oleh Marx bersama Engles adalah sebagai berikut. Menurut Marx dan Engles sejarah semua masyarakat adalah sejarah persaingan kelas.²⁴ Persaingan kelas yang dimaksud oleh Marx adalah persaingan kelas pada masyarakat industrialis-kapitalis abad 19. Adapun kelas yang dimaksud adalah kelas yang mempunyai milik dan kelas yang tidak mempunyai milik. Kelas yang mempunyai milik adalah kaum kapitalis yang memiliki atas alat-alat produksi, bahan mentah dan modal. Sedangkan kelas yang tidak mempunyai milik adalah kaum buruh.

Persaingan kelas ini terjadi karena dalam hubungan-hubungan produksi dalam masyarakat industrialis-kapitalis terjadi pembagian kerja. Pembagian kerja ini mengakibatkan terjadinya pembagian yang tidak merata dari kerja dan hasil kerja

²² *Ibid*, hlm. 95.

²³ *Idem*

²⁴ Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Jakarta, Kronik Indonesia Baru, 1996, hlm. 207.

baik dalam segi jumlah maupun kualitasnya. Dengan kata lain terjadi pembagian hasil produksi yang tidak adil. Dalam kondisi ini kaum kapitalis memperoleh keuntungan yang luar biasa dari hasil produksi, sementara kaum buruh tidak mendapatkan hasil yang semestinya mereka peroleh. Kaum buruh hanya dijadikan sebagai sarana eksploitasi oleh kaum kapitalis demi keuntungan mereka, sehingga nampak bahwa pembagian kerja menunjukkan adanya sifat eksploitasi terhadap kaum buruh.

Berdasarkan pemikiran Marx di atas maka kaum buruh perlu melakukan perjuangan untuk memperbaiki nasib mereka. Perjuangan ini kemudian disebut sebagai perjuangan kelas, yang ditempuh dengan jalan merebut kekuasaan negara dari kaum kapitalis dan mewujudkan negara yang dikuasai oleh kaum buruh sebagai diktator proletariat. Dalam perjuangan kelas ini yang diupayakan adalah terciptanya masyarakat komunis yaitu suatu masyarakat tanpa kelas dan semua sarana-sarana produksi menjadi milik bersama, dengan tujuan untuk menghilangkan ketidakadilan dalam pembagian hasil produksi. Mark dan Engles berpendapat bahwa setelah terciptanya masyarakat komunis negara harus lenyap. Dalam pandangan mereka negara harus lenyap karena negara hanya menguntungkan kelas-kelas tertentu. Negara menjadi alat dari pemegang kekuasaan yaitu kaum kapitalis untuk menindas kelas yang lain yaitu kaum proletar. Dengan demikian adanya negara hanya akan menguntungkan kaum borjuis-kapitalis, sementara kaum proletar menjadi kelas yang dirugikan. Lenyapnya negara berarti juga lenyapnya penindasan terhadap kaum proletar oleh kaum borjuis.

Menurut Marx perjuangan kelas untuk memperbaiki nasib kaum buruh terdiri dari dua tahap. Tahap pertama kaum buruh membantu revolusi yang dipelopori kaum borjuis untuk menumbangkan feodalisme. Mengapa kaum buruh bekerjasama membantu kaum borjuis dalam menjalankan revolusinya? Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat proses berkembangnya industrialisasi. Berkembangnya industrialisasi akan menumbuhkan kelas pekerja. Jika industrialisasi sudah mencapai puncaknya jumlah kaum pekerja/proletar akan tumbuh dalam jumlah yang besar. Jumlah kaum proletar yang besar ini dipandang oleh Marx sebagai kekuatan revolusioner yang besar. Kerjasama tersebut memberikan kesempatan bagi kaum buruh untuk belajar dalam berorganisasi dan mengatur negara yang diperoleh dari pengalaman saat membantu kaum borjuis dalam revolusi.

Tahap yang kedua, kaum buruh menjalankan revolusi untuk menghancurkan kaum borjuis. Menurut Marx waktu yang tepat agar berhasil menjalankan revolusi ini adalah pada saat negara telah mencapai perkembangan industrialisasi yang pesat. Hal ini dikarenakan kaum buruh telah mencapai jumlah yang besar seiring berkembangnya industrialisasi. Jumlah kaum buruh yang begitu besar tersebut, menurut Marx merupakan kekuatan revolusioner yang dahsyat. Dalam menjalankan revolusinya kaum buruh harus dibimbing dan diorganisasikan. Menurut Marx organisasi atau partai yang hendak dibangun haruslah besar dan memiliki massa yang banyak yang dipimpin oleh kaum proletar yang memiliki pengetahuan. Partai atau organisasi ini yang akan membawa kaum proletar dalam perjuangan menjatuhkan kaum borjuis untuk menciptakan masyarakat komunistis.

b. Leninisme

Muso sebagai tokoh utama pemberontakan di Madiun 1948 adalah seorang tokoh komunis, yang menganut ajaran Lenin.²⁵ Oleh karena itu dalam skripsi ini perlu disampaikan tentang komunisme menurut persepsi Lenin. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui jalan pemikiran Muso sebagai pengikut ajaran Lenin yang dipraktekkan ketika Muso memegang kursi kepemimpinan dalam PKI. Akan tetapi sebelumnya perlu penulis sampaikan terlebih dahulu mengenai apa itu Leninisme.

Leninisme merupakan komunisme menurut persepsi Lenin yang pada dasarnya merupakan revisi atau penyempurnaan dari Marxisme. Revisi yang dilakukan oleh Lenin pada dasarnya soal partai, soal revolusi, dan peranan petani. Leninisme lebih cenderung menunjukkan pada ide Lenin yang bersifat praktis. Praktis yang dimaksud adalah bahwa Lenin lebih berbicara mengenai strategi dan taktik perjuangan proletariat pimpinan partai komunis.

Adapun ide yang tertuang dalam Leninisme yang merupakan revisi dari marxisme adalah sebagai berikut. Dalam masalah partai Lenin memiliki pemikiran bahwa partai itu harus kecil dan militan, yang terdiri dari professional revolusioner untuk memimpin kaum proletar. Partai yang dipimpin kaum revolusioner yang professional ini yang akan menjadi wadah sekaligus memimpin kaum buruh atau proletar dalam menumbangkan dan merebut kekuasaan dari kaum borjuis. Pandangan ini merupakan revisi dari pandangan Marx yang mengatakan bahwa partai itu hendaknya besar dan memiliki massa yang banyak (kaum buruh) yang dipimpin oleh kaum proletar yang mempunyai pengetahuan.

²⁵ Arief Priyadi, *op.cit*, hlm. 297.

Sedangkan ide Lenin tentang revolusi dan peranan petani, Lenin berpendapat bahwa dalam menjalankan revolusi tidak harus menunggu sampai industrialisasi berkembang secara penuh guna menunggu perkembangan jumlah kaum buruh sebagai kekuatan revolusioner yang besar. Hal ini dikarenakan Lenin menyadari bahwa waktu itu yaitu tahun 1917 Uni Soviet masih merupakan negara agraris dan industrialisasinya belum semaju negara lain misalnya Inggris. Di negara yang masih agraris ini jumlah kaum buruh masih sedikit dibandingkan kaum petani. Oleh karena itu kaum petani menurut Lenin dapat dijadikan sebagai kekuatan revolusioner seperti halnya kaum buruh. Hal ini bukan berarti kemudian kaum buruh tidak dilibatkan dalam revolusi. Pandangan Lenin di atas merupakan revisi terhadap pandangan Marx tentang revolusi,

“menurut Marx revolusi kaum buruh (proletar) yang dipimpin oleh kaum komunis akan berhasil di dalam negara yang telah industrialis penuh (Sekitar 80% penduduk hidup dari sektor industri), karena di situ jumlah kaum proletar telah besar jumlahnya dan merupakan kekuatan revolusioner yang dhasyat”.²⁶

Dari penjelasan tentang Leninisme di atas dapat diketahui ide-ide Lenin yang tercermin dalam diri Muso. Adapun ide-ide tersebut dapat dilihat sebagai berikut: dipimpinnya PKI oleh kaum komunis professional revolusioner salah satunya adalah Muso sendiri. Hal ini sesuai dengan pemikiran Lenin bahwa partai itu terdiri dari kaum professional revolusioner.

Sedangkan nilai yang lain yaitu dapat dilihat dari dilibatkannya peranan petani dalam menjalankan revolusi, hal ini dapat dibuktikan dengan diikuti sertakannya organisasi massa seperti Barisan Tani Indonesia (BTI). Soal peranan petani ini sesuai dengan pemikiran Lenin bahwa selain kaum buruh kaum tani juga dapat dijadikan

²⁶ Sutarjo Adisusilo, *op.cit*, hlm. 140.

sebagai kekuatan revolusioner. Sedangkan soal revolusi yang dikatakan oleh Lenin bahwa dalam menjalankan revolusi tidak perlu menunggu industrialisasi berjalan penuh karena Uni Soviet waktu itu masih dalam taraf negara agraris. Pendapat Lenin tersebut juga tercermin dalam pemikiran Muso bahwa revolusi juga bisa dijalankan dalam masyarakat agraris seperti Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut Indonesia memang tidak perlu menunggu sampai industrialisasi berjalan penuh, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat agraris. Dengan demikian soal revolusi seperti yang diungkapkan oleh Lenin juga sudah tercermin dalam pemikiran Muso.

4. Pemerintah

Menurut Drs. C.S.T. Kansil S.H. Pemerintah dalam arti sempit adalah khusus kekuasaan eksekutif. Konsep pemerintah dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan konsep pemerintah pada masa Kabinet Hatta. Hal ini dikarenakan UUD yang dipakai pada masa Kabinet Hatta adalah UUD tahun 1945, yang di dalamnya juga menyebutkan arti pemerintah. “Menurut UUD 1945, pemerintah ialah presiden, yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri”.²⁷ Dengan demikian tepat jika pemerintah diartikan khusus kekuasaan eksekutif. Hal ini dikarenakan presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri yang tercakup dalam pengertian pemerintah di atas merupakan lembaga eksekutif itu sendiri.

Pemerintah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pemerintahan pada masa Kabinet Hatta. Berdasarkan macam kabinetnya, pada masa Hatta menjabat sebagai perdana menteri kabinet yang dibentuk adalah kabinet presidensial. “Kabinet

²⁷ C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, hlm. 21.

Presidensial ialah suatu kabinet di mana pertanggungjawaban atas kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh presiden sendiri.”²⁸ Dalam sistem kabinet presidensial jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden sendiri. Para menteri dalam kabinet presidensial dalam menjalankan tugasnya tidak bertanggung jawab kepada DPR atau parlemen melainkan bertanggung jawab kepada presiden.

Pemerintahan pada masa kabinet Hatta, merupakan pemerintahan yang dibangun untuk mengatasi krisis kabinet sebagai akibat jatuhnya kabinet Amir Sjarifuddin. Kabinet Hatta ini didukung oleh beberapa partai yang terpenting adalah Masyumi dan PNI, kedua partai tersebut pada masa Kabinet Amir Sjarifuddin pernah menjadi pendukungnya. Selama menjalankan pemerintahan, Kabinet Hatta terus mendapatkan tekanan dari golongan kiri mulai dari masa FDR sampai dengan masa Muso memimpin revolusi golongan kiri.

Pada masa Amir Sjarifuddin golongan kiri terus menekan pemerintah melalui partai FDR, guna menjatuhkan kabinet Hatta. Tekanan tersebut direalisasikan dengan menuntut dibatalkannya persetujuan Renville, dibentuknya kabinet parlementer di bawah golongan kiri. Cara yang radikal pun dijalankan oleh FDR dengan membuat huru-hara di daerah Solo, yang kemudian daerah Solo dikenal dengan sebutan daerah *Wild West*. Tekanan politik terhadap kabinet Hatta juga terjadi pada masa kepemimpinan Muso. Pada masa Muso, PKI dijadikan sebagai wadah baru bagi golongan kiri untuk meneruskan perjuangannya dalam rangka menjatuhkan kabinet Hatta. Sebagai akibatnya posisi Amir Sjarifuddin dalam front komunis tergeser, sehingga FDR pun bubar. Hal ini dikarenakan seluruh partai politik dan organisasi

²⁸ *Ibid*, hlm. 110.

massa pendukung FDR keluar dan bergabung dengan PKI Muso, termasuk Amir Sjarifuddin sendiri. Dalam masa kepemimpinan Muso ini konflik antara pemerintah dengan golongan kiri mencapai puncaknya dengan ditandai meletusnya pemberontakan PKI di Madiun.

G. Hipotesis

Hipotesis atau jawaban sementara atas permasalahan berdasarkan kajian pustaka dan landasan teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jika Bung Hatta memiliki kekuasaan sebagai perdana menteri dan menteri pertahanan maka Bung Hatta akan menghadapi pemberontakan PKI di Madiun.
2. Jika Bung Hatta sebagai perdana menteri melakukan sidang kabinet, mengusulkan kepada BPKNP agar segera mengesahkan undang-undang tentang pemberian kekuasaan penuh kepada presiden dalam keadaan bahaya, dan sebagai menteri pertahanan menugaskan angkatan perang untuk melakukan gerakan penumpasan pemberontakan, maka pemberontakan PKI di Madiun berhasil dipadamkan,
3. Jika Madiun kembali ke tangan pemerintah RI dan tokoh-tokoh pemberontakan tertangkap maka Bung Hatta sebagai perdana menteri dan menteri pertahanan berhasil menghadapi pemberontakan PKI di Madiun.

H. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Skripsi dengan topik “Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 18 September 1948” dibahas menggunakan metode sejarah, sebagaimana layaknya suatu karya tulis ilmiah dalam bidang ilmu sejarah. Metode sejarah sendiri merupakan proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.²⁹ Dengan kata lain metode sejarah adalah seperangkat aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilai secara kritis, dan menyajikan sintesis daripada hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tulisan. Dalam metode sejarah terdapat empat tahap cara kerja yaitu:

a. Heuristik

Heuristik merupakan proses pengumpulan sumber sejarah yang relevan dengan topik khususnya dengan permasalahan yang akan diteliti. Sumber atau data dalam penelitian ini diperoleh dari literatur dalam bentuk buku pustaka, yang terdapat di perpustakaan baik itu dari perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Perpustakaan Yayasan Hatta Yogyakarta, dan Perpustakaan Kolese ST.Ignatius Yogyakarta maupun dari tempat lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Sumber atau data yang diperoleh ada dua macam yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Adapun sumber primer yang dipakai adalah Mohammad Hatta. (1979). *Mohammad Hatta Memoir*. Jakarta: Tintamas. Buku ini berisi pengungkapan Bung

²⁹ Louis Gottchalk, *op.cit*, hlm. 32.

Hatta sebagai pelaku sejarah antara lain dari masa kabinet Amir Sjarifuddin, masa Bung Hatta membentuk kabinetnya, masa FDR dalam menjalankan politiknya untuk memperoleh kedudukan dalam kabinet Hatta sampai masa kedatangan Muso dan pemberontakan PKI di Madiun 1948. Sumber primer yang kedua adalah Abdul Haris Nasution. (1979). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 8 Pemberontakan PKI 1948*. Bandung: DISJARAH-AD dan Angkasa. Buku karya Abdul Haris Nasution ini berisi tentang sejarah pemberontakan PKI Madiun yang penulisannya tergolong lengkap berdasarkan pengalamannya sebagai pelaku sejarah dalam peristiwa tersebut. Kisah yang dituangkan dalam buku ini antarlain berisi tentang FDR sebagai partai oposisi sampai dengan upaya pemerintah dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun.

Sedangkan beberapa sumber sekunder yang dipakai antarlain: pertama, Himawan Soetanto. (1994). *Perintah Presiden Soekarno Rebut Kembali Madiun (Siliwangi Menumpas Pemberontakan PKI/Moeso 1948)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Buku ini berisi informasi mengenai gerakan PKI dalam melakukan oposisi terhadap pemerintah Hatta dan upaya penumpasan pemberontakan PKI oleh Divisi Siliwangi. Kedua, Pinardi. (1967). *Peristiwa Coup Berdarah P.K.I September 1948 di Madiun*. Jakarta: INKOPAK-HAZERA. Buku ini memberikan banyak informasi mengenai peristiwa Madiun mulai dari awal mula terjadinya peristiwa Madiun sampai pada upaya pemerintah untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun 1948. Ketiga, Deliar Noer. (1990). *Mohammad Hatta Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES. Buku ini berisi mengenai sejarah Bung Hatta sebagai perdana menteri sampai meletusnya pemberontakan PKI Madiun 1948.

b. Kritik Sumber

Kritik sumber sering juga disebut dengan istilah verifikasi data. Kritik sumber merupakan suatu tahap untuk menyeleksi dan meneliti tingkat otentitas (keaslian sumber) dan tingkat kredibilitas (kebenaran suatu sumber untuk dapat dipercaya).³⁰ Kritik sumber perlu dilakukan guna menghindari adanya ketidakeaslian atau kepalsuan dan adanya subyektifitas yang tinggi dalam suatu sumber.

Kritik sumber dibedakan menjadi dua yaitu kritik eksteren dan kritik interen. Kritik eksteren merupakan kritik sumber yang digunakan untuk mengetahui keaslian dari sumber yang digunakan dalam penelitian. Kritik eksteren ini dilakukan dengan cara meneliti bahan yang digunakan yang dilihat dari segi sifat bahan, gaya penulisan, bahasa yang dipakai, dan jenis huruf yang digunakan. Kritik interen adalah kritik sumber yang digunakan untuk menilai apakah suatu sumber dapat dipercaya atau tidak sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kritik interen ini dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber yang ada, sehingga dapat diperoleh suatu fakta yang dapat dipercaya kebenarannya untuk kemudian direkonstruksi ulang.

Dalam penulisan skripsi ini kritik sumber yang digunakan adalah kritik Interen. Kritik eksteren dalam penulisan skripsi ini tidak dilakukan karena keaslian sumber yang digunakan tidak perlu diragukan lagi. Hal ini dikarenakan sumber yang digunakan berupa buku pustaka asli yang merupakan hasil karya asli dari pelaku sejarah atau saksi sejarah maupun bukan saksi atau pelaku sejarah. Sebagai contohnya buku *Mohammad Hatta Memoir* merupakan karya tulis dari Bung Hatta

³⁰ Koentowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Benteng Budaya, 1995, hlm. 99-100.

sendiri yang diterbitkan oleh Tintamas Indonesia, Jakarta, tahun 1979. Dengan demikian keaslian sumber tidak perlu dipertanyakan lagi.

Seperti yang disebutkan di atas bahwa penulis dalam melakukan kritik sumber menggunakan kritik interen. Kritik interen perlu dilakukan dalam penelitian ini karena dalam sumber data sejarah khususnya dalam bentuk buku pustaka ada kemungkinan terjadinya penyampaian sejarah yang keliru. Oleh karena itu kebenaran sumber yang ada masih perlu diuji kebenarannya. Contoh kritik interen dalam skripsi ini yaitu mengenai perbedaan penyampain tanggal terjadinya pemberontakan PKI di Madiun ada sumber yang mengatakan pemberontakan terjadi tanggal 18 September 1948 dan ada juga yang mengatakan bahwa pemberontakan terjadi pada tanggal 19 September 1948. Setelah dilakukan cek silang di antara data yang ada, dapat disimpulkan bahwa perbedaan tersebut terjadi karena berita terjadinya pemberontakan PKI di Madiun baru disiarkan dalam sekala nasional pada tanggal 19 September 1948 oleh Presiden, sehingga terkesan bahwa pemberontakan itu terjadi pada tanggal 19 September 1948, sementara yang sebenarnya terjadi pada tanggal 18 September 1948. Penetapan tanggal 18 ini juga didasarkan dari pidato Muso yang mengatakan bahwa “Pada tanggal 18 September 1948 rakyat daerah Madiun telah memegang kekuasaan negara dalam tangannya sendiri.”³¹ Dalam skripsi ini tanggal yang digunakan adalah tanggal 18 September 1948.

c. Interpretasi

Interpretasi merupakan tahap memaknai suatu peristiwa dan merangkaikan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Dengan kata lain interpretasi merupakan upaya

³¹ A.H. Nasution, *op.cit*, hlm. 246.

untuk menganalisa data yang ditemukan dari berbagai sumber yang kemudian mensintesiskan temuan data dari berbagai sumber yang ada. Interpretasi ini diperlukan guna mengurangi unsur subyektifitas dari penulis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagai contohnya adalah dalam buku yang berjudul “Negara Madiun Kesaksian Soemarsono Pelaku Perjuangan” yang di dalamnya terdapat pernyataan Soemarsono yang intinya mengatakan bahwa peristiwa Madiun bukan suatu pemberontakan, tetapi hanya sekedar upaya *defensif* PKI.³² Akan tetapi setelah di analisa dan dicocokkan dengan berbagai data yang ada pernyataan tersebut tidak logis dan tidak sesuai dengan fakta.³³ Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Soemarsono melalui pidatonya setelah merebut Madiun.

Pidato Soemarsono tersebut di atas disampaikan melalui Radio Gelora Pemuda pukul 10:00 pagi yang intinya mengatakan bahwa PKI telah membentuk pemerintahan baru di Madiun. Membentuk pemerintahan baru mengandung arti lepas dari pemerintah, karena tidak mungkin dalam satu negara terdapat dua pemerintahan. Dengan demikian pernyataan Soemarsono tersebut di atas kontra dengan pernyataannya dari pidato Soemarsono sendiri.

Pernyataan bahwa peristiwa Madiun bukan suatu pemberontakan merupakan pernyataan yang mengandung unsur subjektifitas yang cukup tinggi. Berdasarkan analisa di atas diambil kesimpulan bahwa peristiwa Madiun adalah suatu pemberontakan. Hal ini dikarenakan, jika PKI hanya sekedar untuk bertahan dan

³² Hersri Setiawan, *Negara Madiun Kesaksian Soemarsono Pelaku Perjuangan*, Jakarta, FuSPAD, 2002, hlm, 96.

³³ Untuk *cross chek* lihat Hersri Setiawan, *Negara Madiun Kesaksian Soemarsono Pelaku Perjuangan*, Jakarta, FuSPAD, 2002, hlm, 96; Himawan Soetanto, *Perintah Presiden Soekarno Rebut Kembali Madiun*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm.144-145.

membela diri tidak perlu sampai menyatakan lepas dari pemerintahan Soekarno Hatta dan membentuk pemerintahan yang baru.

d. Historiografi

Historiografi merupakan langkah terakhir dalam metode penulisan sejarah. Historiografi adalah rekonstruksi yang imajinatif dari pada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh.³⁴ Skripsi dengan topik Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 18 September 1948 ini disusun secara kronologis, sistematis, dan menggunakan gaya bahasa Indonesia yang baku dan benar. Adapun yang dimaksud dengan kronologis yaitu bahwa penulisan penelitian ini disusun berdasarkan urutan waktu atau tahun kejadian dari peristiwa yang akan dikaji. Sedangkan sistematis maksudnya yaitu bahwa tema-tema yang ada disusun secara teratur berdasarkan hubungan yang kronologis yaitu mulai dari latar belakang Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 18 September 1948, usaha-usaha Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun, sampai hasil usaha Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan tersebut.

Skripsi dengan topik Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 18 September 1948 ditulis secara diskriptif-analitis, yang menggambarkan tokoh Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun, yang merupakan hasil akhir dari analisa atas fakta-fakta sejarah dari sumber yang digunakan.

³⁴ Louis Gottschalk, *op.cit*, hlm. 32.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan politikologis. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menyoroti struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, dan pertentangan kekuasaan.³⁵ Pendekatan politikologis digunakan dalam skripsi ini dengan alasan bahwa peristiwa Madiun merupakan persoalan politik, yang pada dasarnya menunjukkan pertentangan politik antara dua golongan politik besar. Golongan tersebut disatu pihak diwakili oleh Hatta dan partai-partai pendukungnya dan di pihak lain diwakili oleh golongan oposisi yang dipimpin oleh PKI. Oleh karena itu dalam menjelaskannya diperlukan penguraian dan analisis politik. Pendekatan politik digunakan untuk menganalisa situasi politik bangsa khususnya pada masa Kabinet Hatta sampai upaya mengatasi pemberontakan PKI di Madiun 1948. Dengan diketahuinya situasi politik pada masa itu akan membantu penulis dalam menganalisa suatu peristiwa, dalam rangka memecahkan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Sebagai contohnya pendekatan ini digunakan untuk menganalisa mengapa Hatta memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam masa kepemimpinannya.

Pendekatan ini juga digunakan untuk melihat golongan sosial mana yang terlibat dalam konflik antara PKI dengan pemerintah. Dalam hal ini diketahui bahwa pada peristiwa Madiun, yang terlibat dalam konflik atau ikut terseret dalam konflik, bukan hanya dari golongan sosial seperti elit politik melainkan juga melibatkan golongan sosial yang lainnya, seperti golongan petani, santri, dan golongan abangan di Madiun. Golongan santri merupakan golongan yang pro pemerintah, golongan ini

³⁵ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, Gramedia, 1992, hlm. 4.

bergabung ke dalam partai Masyumi. Sebaliknya golongan petani merupakan golongan yang mendukung PKI dan golongan abangan secara samar-samar juga memberikan dukungan kepada PKI.

Di samping untuk melihat golongan sosial mana yang terlibat dalam konflik, pendekatan ini juga digunakan untuk melihat struktur kekuasaan organisasi dari pihak yang berkonflik. Sebagai contohnya penulis mengambil struktur organisasi PKI. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh CC (Comite Central) atau Sekretaris Jendral. CC ini merupakan penggerak atau yang menjalankan roda partai sehari-hari.³⁶ Anggota dari CC adalah pejabat-pejabat penting partai, pemimpin-pemimpin departemen dari CC,³⁷ seperti Muso, Maruto Darusman, Tan Ling Djie, dan Ngadiman.³⁸ Polit Biro adalah penentu garis kebijaksanaan partai politik dan langsung bertanggung jawab kepada ketua CC,³⁹ yakni Muso. Berdasarkan wilayahnya, organisasi di bawah CC adalah CDB (Comite Daerah Besar), CS (Comite Seksi) yang meliputi daerah kabupaten dan Kota Besar, CSS (Comite Sub Seksi) melingkupi kecamatan atau kota kecil, CR (Comite Ranting) merupakan daerah terendah yang meliputi suatu desa atau bagian kota. Jika dilihat dari jumlah anggotanya, terdapat organ kecil lainnya yang menjadi sokoguru PKI yaitu Grup dan Sel. Jika digambarkan dalam diagram, struktur organisasi PKI adalah sebagai berikut:

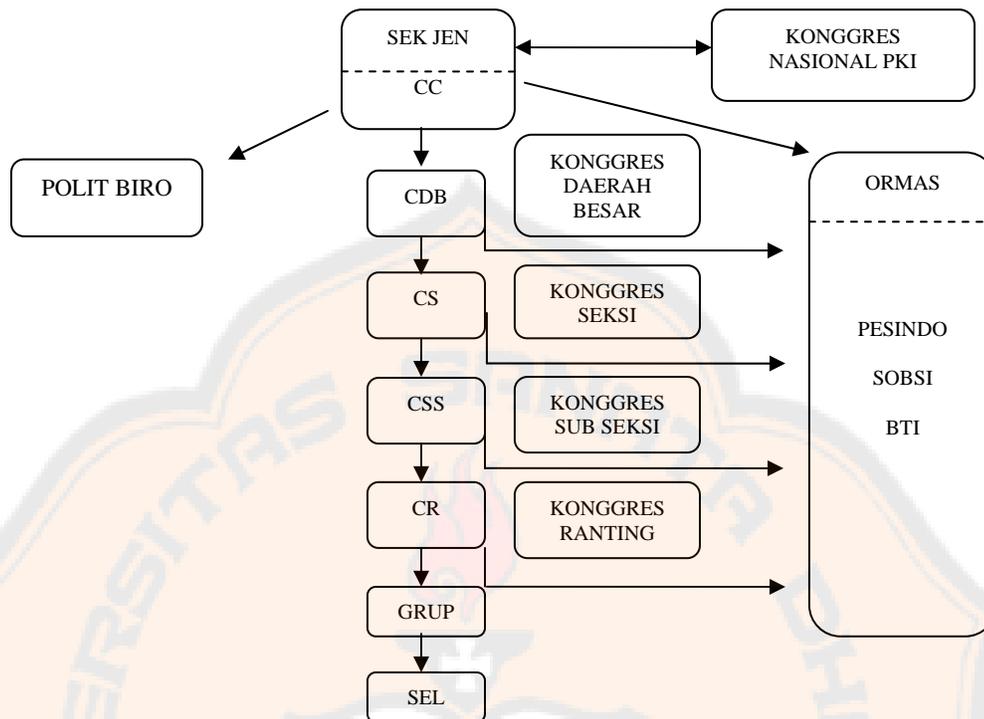
³⁶ Arbi Sanit, *Badai Revolusi Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 74.

³⁷ *Idem*

³⁸ Sho Hok Gie, *op.cit*, hlm. 221.

³⁹ Arbi Sanit, *op.cit*, hlm. 74.

Struktur Organisasi PKI 1948⁴⁰



Keterangan :

Garis tanggung jawab : →

I. Sistematika Penulisan

Skripsi dengan topik Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 18 September 1948, akan disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut: Bab I, berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, hipotesis, metode penelitian dan pendekatan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II, berisi Bung Hatta sebagai perdana menteri, dan berisi penjelasan mengenai latar belakang Bung Hatta menghadapi pemberontakan PKI Madiun

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 76.

Perbedaan struktur organisasi PKI pimpinan Muso dengan PKI pimpinan Aidit, terletak pada Biro Khusus. Biro ini baru terbentuk secara resmi tahun 1964 dan sudah beroperasi mulai tahun 1954.

1948. Bab III, berisi penjelasan mengenai usaha-usaha Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 1948. Bab IV, berisi mengenai hasil usaha Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 1948. Bab V penutup, berisi kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dan berisi saran.



BAB II
LATAR BELAKANG BUNG HATTA
DALAM MENGHADAPI PEMBERONTAKAN PKI DI MADIUN 1948

A. Bung Hatta Sebagai Perdana Menteri

Pada sub pokok bahasan ini penulis akan menerangkan asal mula Bung Hatta memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam pemerintahan tahun 1948, yaitu dengan dipegangnya kekuasaan eksekutif oleh Bung Hatta sebagai perdana menteri. Hal ini perlu untuk dijelaskan karena sistem pemerintahan yang diterapkan pada tahun 1948 adalah sistem pemerintahan presidensial. Di dalam sistem pemerintahan presidensial secara teoritis presiden yang memegang kekuasaan eksekutif atau kekuasaan pemerintahan, akan tetapi pada tahun 1948 pelaksanaannya tidak demikian. Pada prakteknya kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang perdana menteri. Dalam rangka memperoleh jawaban dari permasalahan di atas kita harus kembali menelusuri sejarah mengenai situasi Republik Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1949.

Kabinet pertama yaitu kabinet presidensial terbentuk dalam kurun waktu kurang dari satu bulan sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, tepatnya pada tanggal 2 September 1945 yang ditandai dengan dilantiknya menteri-menteri sebagai pembantu presiden. Sebelumnya perlu untuk diketahui bahwa pada masa pertama berlakunya UUD 1945 dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif belum terbentuk. Oleh karena MPR dan DPR belum terbentuk menurut ketentuan UUD 1945 Pasal IV Aturan Peralihan maka segala

tugas dan wewenangnya dilaksanakan sepenuhnya oleh presiden dengan bantuan Komite Nasional Pusat (KNP).¹ Adapun garis besar dari isi Pasal IV Aturan peralihan tersebut sebagai berikut: “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan sepenuhnya oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional Pusat.”² Sesuai dengan ketentuan tersebut maka presiden:

1. Memegang dan menjalankan kekuasaan seperti tersebut dalam Pasal 4 UUD 1945 bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan;
2. Menjalankan kekuasaan DPR, yang berarti kekuasaan menetapkan undang-undang hanya dilakukan oleh presiden sendiri dengan bantuan KNP;
3. Menjalankan kekuasaan MPR, seperti:
 - a. Menetapkan Undang-undang Dasar;
 - b. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara;
 - c. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden;
 - d. Mengubah Undang-undang Dasar 1945.

Pelimpahan kekuasaan tersebut di atas dalam perkembangannya menimbulkan suatu masalah dalam kabinet presidensial Soekarno. Banyak kalangan revolusioner seperti Sjahrir dan mahasiswa yang menjadi tidak puas dengan pola pemerintahan Soekarno pada waktu itu yang terkesan otoriter, sebagai dampak dari pelimpahan kekuasaan legislatif ke tangan presiden. Hal ini tentunya memunculkan sebuah pertanyaan mengapa pelimpahan kekuasaan tersebut dapat memunculkan kesan

¹ Muhammad Ridhwan Indra, *MPR Selayang Pandang*, Jakarta, CV HAJI MASAGUNG, 1988, hlm. 3.

² *Idem*

bahwa pemerintahan presidensial yang dijalankan oleh Soekarno terkesan mencerminkan pemerintahan yang otoriter ? Sementara pelimpahan kekuasaan itu sendiri didasarkan oleh UUD 1945, yang menjadi dasar hukum yang kuat. Penjelasan atas permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

Menurut “Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa Majelis ini dipandang sebagai penjelamaan rakyat yang memegang kedaulatan negara. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 3 dikatakan bahwa oleh karena MPR memegang kedaulatan rakyat maka kekuasaannya tidak terbatas.”³

Berdasarkan pasal dan penjelasan pasal di atas maka kekuasaan presiden menjadi terlampau besar dan tidak terbatas jika kemudian kekuasaan MPR sepenuhnya dijalankan oleh presiden. Dalam hal ini dapat dikatakan terjadi penumpukan kekuasaan di tangan satu orang yaitu presiden. Di samping itu kedaulatan tidak lagi di tangan rakyat melainkan di tangan seorang presiden. Pelimpahan kekuasaan tersebut juga tidak mencerminkan suatu pemerintahan yang demokratis, mengingat prinsip dasar dari demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam menjalankan kekuasaan MPR sebenarnya presiden mendapat pendampingan dari KNP, akan tetapi perlu diingat bahwa status KNP jelas hanya sebagai pembantu presiden. Hal ini berarti bahwa pada dasarnya presiden yang melaksanakan kekuasaan atau tugas dan wewenang MPR. KNP sendiri bukan merupakan suatu badan yang sebanding atau tidak memiliki kedudukan yang sama dengan presiden dalam melaksanakan kekuasaan yang dimaksud dalam Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Dengan demikian tidak ada yang dapat mengontrol

³ A.S.S. Tambunan , *MPR Perkembangan dan Pertumbuhannya Suatu Pengamatan dan Analisis*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1991, hlm. 15.

kekuasaan seorang presiden dan memunculkan ketidak seimbangan kekuasaan. Di sini letak permasalahannya, sehingga pemerintahan semasa kabinet presidensial Soekarno terkesan berjalan otoriter.

Menanggapi permasalahan tersebut pada bulan Oktober 1945 atas prakarsa Sjahrir semua anggota KNP antarlain Supeno, Sukarni, Subadio, Ir.Sakirman, dan suami-istri Mangunsarkoro membuat suatu rencana untuk mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer, sebagai suatu solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas.⁴ Tindakan pertama yang mereka tempuh adalah dengan mengubah status KNP sebagai pembantu presiden menjadi badan legislatif. Pada tanggal 7 Oktober 1945 KNP menyampaikan sebuah petisi kepada Presiden Soekarno untuk mengubah status KNP menjadi badan legislatif. Dalam hal ini baik Soekarno maupun Hatta menanggapi dan menerima tuntutan tersebut dengan baik.

Berkaitan dengan upaya mengubah status KNP menjadi badan legislatif, pada tanggal 16 Oktober 1945 KNP mengusulkan kepada wakil presiden untuk mengeluarkan sebuah maklumat yang menetapkan perubahan status KNP tersebut. Pada tanggal yang sama Wakil Presiden Mohammad Hatta mengumumkan maklumat yang disebut Maklumat No.X yang menetapkan “bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat disertai kekuasaan legislatif dan ikut dalam menetapkan garis-garis besar haluan negara.”⁵

⁴ Kahin. George Mc Truman, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, UNS Perss- Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm.190.

⁵ Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif Suatu Penyelidikan dalam Hukum Tata Negara*, Jakarta, Aksara Baru, 1986, hlm. 28.

Sebagai informasi tambahan, Maklumat No. X ini pada intinya merupakan putusan presiden sebagai jawaban atas usul KNP dalam rapatnya tanggal 16 Oktober 1945 untuk mengubah status KNP sebagai badan legislatif. Jadi secara yuridis maklumat tersebut sebenarnya harus dinamakan maklumat presiden atau maklumat pemerintah.⁶ Pertanyaanpun muncul, mengapa dalam maklumat tersebut dinamakan maklumat wakil presiden ? Hal ini dikarenakan dalam rapat tersebut Presiden Soekarno berhalangan hadir, sehubungan kepergiannya ke luar kota Jakarta. Oleh karena itu sebagai wakil presiden Bung Hatta yang mengesahkan maklumat tersebut dengan menandatangani dalam batas untuk mewakili pemerintah sehubungan presiden berhalangan hadir. Dilihat dari sudut pandang hukum pengesahan maklumat tersebut oleh Bung Hatta dapat dibenarkan. Sebagai dasar hukumnya adalah Pasal 2 ayat (4) UUD 1945. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh wakil presiden. Hal ini mengandung arti bahwa, apabila presiden berhalangan sementara waktu, wakil presiden dapat melakukan jabatan presiden untuk sementara waktu. Sehingga dalam kasus ini wakil presiden dapat menjalankan tugas-tugas presiden di antaranya mengeluarkan maklumat. Oleh sebab itu maklumat tersebut dinamakan Maklumat Wakil Presiden atau secara lengkap dinamakan Maklumat Wakil Presiden No. X.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Maklumat No. X ini maka status KNP tidak lagi sebagai pembantu presiden melainkan sebagai badan legislatif yang setaraf dengan MPR. Kekuasaan presiden yang semula terlampau besar sebagai dampak dari pelimpahan kekuasaan berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, mulai

⁶ Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, hlm. 56.

terpangkas atau berkurang dengan berubahnya status KNP menjadi badan legislatif. Agar memiliki dasar hukum yang kuat Maklumat No.X memberikan keterangan mengenai dasar pertanggung jawaban atas dikeluarkannya maklumat tersebut dalam *considerans* Maklumat Wakil Presiden No.X. Adapun isinya sebagai berikut :

“bahwa di dalam keadaan yang genting ini perlu ada badan yang ikut bertanggung jawab tentang nasib bangsa Indonesia di sebelah pemerintah dan oleh dictumnya ditegaskan bahwa kekuasaan Komite Nasional Pusat itu hanya bersifat sementara sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.”⁷

Penjelasan di atas mengandung arti bahwa KNP sebagai lembaga legislatif pengganti MPR hanya berlaku sebelum MPR dan DPR terbentuk. Status KNP sebagai badan legislatif tidak berlaku lagi setelah MPR dan DPR terbentuk. Jadi jelas bahwa status KNP sebagai badan legislatif tidak bersifat permanen. Pertanggung jawaban tersebut memiliki dasar yang kuat karena di dalamnya terkandung ukuran yang jelas mengenai status perubahan KNP menjadi badan legislatif bahwa perubahan tersebut hanya bersifat sementara. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa segala perubahan yang radikal bahkan segala perubahan yang bertentangan dengan undang-undang dalam keadaan genting atau bahaya harus bersifat sementara. Setelah keadaan kembali normal atau situasi yang diharapkan terwujud, maka segala kebijakan yang dibuat dalam keadaan genting atau bahaya tidak berlaku kembali dan harus dikembalikan pada aturan semula.

Dalam Maklumat No. X disebutkan juga bahwa dalam menjalankan tugas sehari-hari KNP mendelegasikan kekuasaannya kepada suatu badan pekerja yang dipilih di antara mereka yang bertanggung jawab kepada KNP. Badan Pekerja

⁷ Ismail Suny, *op.cit*, hlm. 29.

terkenal dengan sebutan Badan Pekerja KNP (BPKNP). Badan ini di ketuai oleh Soetan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin sebagai wakilnya. Adapun tugas dan wewenang dari BPKNP adalah sebagai berikut, membuat peraturan perundang-undangan menurut pasal-pasal 5 ayat(1), 20, 21, dan 22 UUD 1945 dan, menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) (Pasal 3 UUD 1945).⁸ Hal ini berarti segala penetapan peraturan perundang-undangan dan GBHN yang sebelumnya hanya diputuskan oleh presiden, harus mendapat persetujuan dari BPKNP dan presiden.

Setelah berhasil mengubah status KNP dari badan pembantu presiden menjadi badan legislatif, BPKNP di bawah pimpinan Sjahrir pada tanggal 11 Nopember 1945 mengusulkan kepada presiden adanya sistem pertanggung jawab menteri-menteri kepada parlemen yaitu KNP. Pada intinya BPKNP mengusulkan untuk mengganti sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Perubahan ini diajukan dengan alasan “Supaya lebih tegas adanya kedaulatan rakyat dalam susunan Pemerintah RI”.⁹ Atas usulan BPKNP tersebut presiden menerima usulan tersebut dengan baik. Sejak diterimanya usulan BPKNP oleh presiden para menteri mulai bertanggung jawab kepada parlemen bukan kepada presiden, dengan demikian sistem pemerintahan parlementer mulai dijalankan. Pusat kekuasaan eksekutif yang semula berada di tangan presiden telah bergeser ke tangan perdana menteri. Sebagai dampak dari perubahan yang besar tersebut pada tanggal 14 Nopember 1945 kabinet presidensial di bawah pimpinan Presiden Soekarno meletakkan jabatan dan diganti dengan kabinet baru di bawah pimpinan Sjahrir. Kabinet ini merupakan Kabinet Sjahrir yang pertama sekaligus merupakan kabinet parlementer pertama dalam

⁸ Muhammad Ridhwan Indra, *op.cit*, hlm. 5.

⁹ *Ibid*, hlm. 96.

sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Sistem pemerintahan parlementer tersebut memiliki beberapa perbedaan pokok dengan presidensial seperti terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel. Perbedaan Pokok Sistem Pemerintahan Presidensial dengan Parlementer

PRESIDENSIAL	PARLEMENTER
Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan	Presiden hanya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri
Para menteri merupakan pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden	Para menteri merupakan anggota kabinet yang diketuai oleh perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen

Praktek parlementer ini berjalan secara silih berganti dalam waktu yang relatif singkat yaitu dari Kabinet Sjahrir pertama (14 Nopember 1945 - 12 Maret 1946), Kabinet Sjahrir kedua (12 Maret 1946 - 2 Oktober 1946), Kabinet Sjahrir ketiga (2 Oktober 1946 – 3 Juli 1947), Kabinet Amir Sjarifuddin pertama (3 Juli 1947 - 11 Nopember 1947), dan Kabinet Amir Sjariffuddin kedua (11 Nopember 1947 -29 Januari 1948). Kabinet Amir Sjarifuddin yang kedua ini digantikan kembali dengan kabinet presidensial yang dipimpin oleh Bung Hatta yaitu dari tanggal 29 Januari 1948 sampai dengan tanggal 4 Agustus 1949.

Menurut Moh. Kusnardi, S.H. dan Bintang S. Saragih, S.H. dalam bukunya yang berjudul Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, Praktek kabinet parlementer sebagai akibat diterimanya usul BPKNP jelas-jelas menyimpang dari UUD 1945 khususnya Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 dan penjelasannya. Pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan Presiden Republik Indonesia

memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD. Pada Pasal 17 disebutkan antaralain presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, dan menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Di samping itu menurut UUD 1945 sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah sistem presidensial. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Dalam Pasal 4 ayat (1) terkandung makna bahwa presiden merupakan kepala pemerintahan atau pemegang kekuasaan eksekutif. Sementara pada Pasal 11 sampai Pasal 15 menyebutkan mengenai beberapa kekuasaan yang merupakan kekuasaan seorang kepala negara. Jadi jelas bahwa dalam UUD 1945 presiden di samping berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Dengan melihat kedudukan tersebut menjadi semakin jelas bahwa sistem pemerintahan yang dianut menurut UUD 1945 adalah sistem presidensial. Dengan demikian praktek parlementer tersebut secara teoritis adalah menyimpang.

Dalam kasus ini yang menjadi pertanyaan faktor apa yang mendorong praktek parlementer tersebut tetap dijalankan jika ternyata itu menyimpang dari UUD 1945? Adapun faktor pendorong yang dimaksud adalah untuk mewujudkan pemerintahan Indonesia yang diakui oleh dunia internasional. Sebagai negara yang baru merdeka dukungan dan pengakuan dari dunia internasional atas eksistensi negara kita mutlak diperlukan. Salah satu upayanya adalah dengan mewujudkan suatu pemerintahan yang diakui oleh dunia internasional, yaitu suatu pemerintahan yang demokratis.

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Indonesia secepat mungkin membangun sebuah pemerintahan yang ditandai dengan dibentuknya kabinet presidensial pertama pimpinan Presiden Soekarno pada tanggal 2 September 1945.

Kriteria pemerintahan yang demokratis belum begitu nampak dominan dalam kabinet presidensial tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan belum terbentuknya MPR dan DPR sebagai badan legislatif. Permasalahan ini diatasi dengan mengeluarkan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 yang intinya melimpahkan segala kekuasaan yang dimiliki MPR dan DPR kepada presiden. Secara lengkapnya dapat dibaca di halaman sebelumnya.

Akan tetapi pelimpahan ini dipandang tidak tepat oleh banyak kalangan seperti Sjahrir dan para mahasiswa. Mengingat dengan pelimpahan tersebut presiden terkesan otoriter. Tentunya hal ini akan menjadi nilai minus di mata dunia internasional karena tidak menggambarkan suatu pemerintahan yang demokratis. Masalah ini diatasi dengan mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No.X yang intinya mengubah status KNP sebagai pembantu presiden menjadi badan legislatif, yang bertujuan untuk mengurangi penumpukan kekuasaan di tangan presiden. Akan tetapi hal ini masih dipandang kurang karena meskipun status KNP telah berubah menjadi badan legislatif, kekuasaan presiden masih terlihat cukup besar. Hal ini dikarenakan meskipun KNP memiliki kekuasaan legislatif namun perlu diketahui bahwa tidak semua kekuasaan legislatif sepenuhnya berada di tangan KNP.

Kekuasaan KNP hanya meliputi kekuasaan untuk menetapkan UU dan menetapkan garis-garis besar haluan negara bersama presiden. Jadi dalam hal ini presiden masih memegang sebagian kekuasaan MPR dan DPR seperti: memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, mengubah UUD 1945 dan melakukan kedaulatan rakyat menurut Pasal 1 ayat(2) UUD 1945.¹⁰ Oleh karena itu BPKNP

¹⁰ *Ibid*, hlm. 5.

mengusulkan untuk merubah sistem pemerintahan presidensial ke sistem parlementer dengan alasan untuk memperlakukan kedaulatan rakyat dan menyempurnakan tata usaha negara kepada susunan demokrasi. Dalam sistem pemerintahan parlementer ini kekuasaan presiden yang terlampau besar tersebut menjadi berkurang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan presiden dalam sistem ini yaitu presiden hanya berstatus sebagai kepala negara sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri.

Perubahan praktek presidensial ke praktek parlementer ini merupakan perubahan yang dipandang menyimpang dari UUD 1945. Dalam hal ini dapat dimaklumi jika formalitas dan legalitasnya tidak sempurna, mengingat semua tindakan perubahan mulai dari merubah KNP menjadi badan legislatif hingga merubah sistem pemerintahan presidensial ke parlementer merupakan upaya darurat yang secepat mungkin harus dilakukan. Hal ini dipengaruhi oleh kedatangan pihak Belanda yang ingin menjajah kembali Republik Indonesia yang pada waktu itu Belanda membonceng NICA untuk kembali masuk ke Republik Indonesia. Upaya Belanda untuk kembali menduduki Republik Indonesia ini dapat dihambat dengan meningkatkan simpati atau dukungan dunia internasional kepada Republik Indonesia, dengan menunjukkan bahwa negara kita mengembangkan pemerintahan yang bertanggung jawab dengan dasar pemerintahan yang demokratis.

Pada paragraf sebelumnya penulis menerangkan bahwa praktek parlementer ini berjalan dalam waktu yang relatif singkat bahkan tidak sampai satu tahun kabinet jatuh bangun. Hal ini dikarenakan eksistensi kabinet sangat ditentukan oleh mosi tidak percaya atau kepercayaan parlemen terhadap kabinet. Kabinet parlementer

pimpinan Amir Sjarifuddin yang kedua digantikan dengan kabinet presidensial yang dipimpin oleh Bung Hatta. Kabinet Hatta ini merupakan kabinet yang dibangun untuk mengatasi krisis kabinet sebagai akibat mundurnya Kabinet Amir Sjarifuddin kedua dan untuk mengatasi berbagai persoalan yaitu masalah persetujuan Renville dan oposisi dari golongan kiri sampai dengan pemberontakan PKI di Madiun.

Sebelum terbentuknya kabinet Hatta perlu diingat bahwa, Presiden Soekarno statusnya hanya sebagai kepala negara mengingat sistem pemerintahan yang diterapkan sebelumnya adalah sistem parlementer. Sebagai Kepala Negara Presiden Soekarno menunjuk Bung Hatta sebagai perdana menteri. Dalam hal ini presiden menunjuk Bung Hatta karena tidak ada satu wakil dari partai manapun termasuk Masyumi sebagai partai yang terbesar, yang bersedia memangku jabatan tersebut. Oleh karena itu presiden memilih Bung Hatta, di samping itu hanya Bung Hatta yang dipandang mampu menyelesaikan krisis tersebut. Tidak adanya salah satu wakil dari partai yang bersedia menerima jabatan perdana menteri ini dapat ditarik logika bahwa jabatan tersebut tidak menguntungkan. Hal ini dikarenakan krisis yang dihadapi begitu kompleks mulai dari upaya mempertahankan kemerdekaan dan kelangsungan nasib bangsa sampai dengan upaya mengatasi pemberontakan PKI di Madiun. Jadi seorang perdana menteri memikul beban dan tanggung jawab yang terlalu berat, sehingga dapat diistilahkan jika berhasil mendapat pujian sedangkan jika gagal akan mendapatkan kritikan pedas dan cacian.

Dalam mengatasi krisis tersebut diputuskan bahwa kabinet yang dibentuk adalah kabinet presidensial. Penerapan kembali sistem pemerintahan presidensial ini memunculkan beberapa pertanyaan. Pertama, mengapa kabinet presidensial dipimpin

oleh seorang perdana menteri? Kedua, mengapa pemerintahan semacam itu dinamakan pemerintahan presidensial ?

Ada beberapa alasan mengapa dalam Kabinet Presidensial Hatta kekuasaan pemerintah dipegang oleh seorang perdana menteri. Pada masa Kabinet Hatta ini dibutuhkan sebuah kabinet yang kuat sekaligus tidak meninggalkan unsur demokratis guna mengatasi krisis. Sebuah krisis atau suatu masalah tidak akan dapat terpecahkan secara tuntas dan efektif jika kabinet yang baru dijalankan beberapa waktu harus jatuh karena mosi tidak percaya dari parlemen sebagaimana yang sering terjadi pada masa kabinet parlementer. Oleh karena itu diperlukan suatu kabinet yang benar-benar kuat. Jadi dalam hal ini tidak akan terpenuhi jika kabinet yang dibentuk adalah kabinet parlementer. Hal tersebut hanya mungkin terpenuhi jika kabinet yang dibentuk adalah kabinet presidensial. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa kabinet presidensial ini dipandang kurang mencerminkan praktek pemerintahan yang demokratis. Untuk menutup kekuarangan dari kabinet presidensial maka kekuasaan pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri. Dengan demikian pemerintahan yang kuat sekaligus demokratis menjadi terpenuhi.

Kabinet ini secara teoritis jelas bukan kabinet presidensial murni, akan tetapi ada beberapa argumen mengapa kabinet ini dikatakan sebagai kabinet presidensial. Dalam kenyataanya jabatan perdana menteri ini dipegang oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta, di samping kedudukannya sebagai wakil presiden Bung Hatta merupakan kepala negara nomor dua atau juga dapat disebut sebagai wakil kepala

negara.¹¹ Jadi dalam hal ini akan menjadi lain persoalannya jika selama Bung Hatta menjabat perdana menteri ia meletakkan jabatannya sebagai wakil presiden maka kabinet ini baru dapat dikatakan sebagai kabinet parlementer. Dalam kenyataannya ketika Bung Hatta menjabat sebagai perdana menteri ia tetap berstatus sebagai wakil presiden yang dapat dikatakan juga tetap sebagai kepala negara nomor dua atau wakil kepala negara.

Selain argumentasi di atas, dapat dilihat bahwa kabinet ini dalam kenyataannya tidak dapat dijatuhkan dengan mosi tidak percaya dari parlemen, dengan kata lain eksistensi kabinet ini tidak bergantung pada kepercayaan parlemen terhadap kabinet. Kabinet ini juga tidak dihasilkan oleh tawar-menwar berbagai partai politik sebagaimana kabinet parlementer pada umumnya. Berdasarkan realita tersebut, kabinet ini lebih condong untuk dikatakan sebagai kabinet presidensial. Walaupun dengan catatan bahwa praktek kabinet yang semacam ini bukan merupakan praktek kabinet presidensial yang murni.

B. Latar Belakang Bung Hatta Menghadapi Pemberontakan PKI di Madiun 1948

1. Bung Hatta Memiliki Kekuasaan Sebagai Perdana Menteri

Penulis pada bagian ini akan langsung membahas pada pokok permasalahan mengenai apa yang melatarbelakangi Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun. Adapun latarbelakangnya adalah pada saat berlangsungnya peristiwa Madiun 1948, kekuasaan pemerintahan berada di tangan Bung Hatta dengan

¹¹ Mohammad Kusnardi & Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang Undang Dasar 1945*, Jakarta, Gramedia, 1986, hlm.140.

dipegangnya jabatan perdana menteri. Di samping itu kekuasaan menteri pertahanan berada di tangan Bung Hatta. Perlu diketahui bahwa bentuk pemerintahan yang berjalan pada masa Kabinet Hatta adalah pemerintahan presidensial yang dalam parakteknya tidak berjalan seperti pada umumnya. Hal ini dikarenakan adanya jabatan perdana menteri dalam Kabinet Presidensial Hatta. Dengan demikian kekuasaan eksekutif yang secara teoritis berada di tangan presiden beralih ke tangan perdana menteri. Presiden sendiri kemudian hanya berstatus sebagai kepala negara.

Sebagai Perdana Menteri Bung Hatta memiliki kekuasaan sebagai kepala pemerintahan, yang berarti tanggung jawab atas jalannya pemerintahan dibebankan kepada Bung Hatta. Di samping itu sebagai kepala pemerintahan Bung Hatta juga memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijaksanaan pemerintah yang akan dijalankan. Hal ini mengandung arti bahwa jika pemerintah menghadapi suatu permasalahan atau krisis maka segala upaya penyelesaiannya dibebankan kepada kepala pemerintahan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa persoalan pemberontakan PKI di Madiun yang terjadi pada tahun 1948, juga menjadi tanggung jawab Bung Hatta untuk menyelesaikannya. Selain itu dengan menjadi perdana menteri dalam pemerintahan presidensial, Bung Hatta memiliki wewenang untuk menyelesaikan persoalan pemberontakan tersebut.

2. Bung Hatta Memiliki Kekuasaan Sebagai Menteri Pertahanan

Bung Hatta di samping memiliki kekuasaan sebagai perdana menteri, ia juga menjabat sebagai menteri pertahanan. Dengan statusnya sebagai menteri pertahanan Bung Hatta membawahi angkatan perang. Status angkatan perang di bawah

kekuasaan menteri pertahanan mengadung arti bahwa komando angkatan perang berada di tangan Bung Hatta. Menteri pertahanan memiliki hak untuk mengatur beberapa hal mengenai pengorganisasian angkatan perang, administrasi angkatan perang, perlengkapan persenjataan, politik pertahanan dan siasat militer. Menteri pertahanan juga bertanggungjawab atas kualitas perang angkatan perang.

Dipegangnya komando angkatan perang dan beberapa wewenang yang dimiliki oleh Bung Hatta atas angkatan perang sesuai undang-undang no 3 tahun 1948, menunjukkan bahwa yang berhak menggerakkan angkatan perang untuk melaksanakan tugas dari pemerintah adalah Bung Hatta selaku menteri pertahanan. Selain itu menjadi tanggung jawab seorang menteri pertahanan untuk mengatasi suatu konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah melalui jalur diplomasi, untuk kemudian menyelesaikannya menggunakan kekerasan militer. Seperti halnya konflik antara PKI Muso dengan pemerintah yang mencapai puncaknya ketika PKI Muso melakukan kudeta di Madiun. Jadi dalam kasus Madiun, ketika pemerintah memutuskan untuk menghadapi pemberontakan PKI berdasarkan ketetapan sidang kabinet, Bung Hatta juga yang kemudian mengerahkan dan memerintahkan angkatan perang untuk menumpas pemberontakan PKI. Sebagai menteri pertahanan Bung Hatta juga bertanggung jawab atas keberhasilan angkatan perang dalam menjalankan gerakan penumpasan pemberontakan di Madiun.

3. Latar Belakang PKI Memberontak di Madiun

Peristiwa pemberontakan PKI di Madiun tidak terjadi dengan sendirinya melainkan ada beberapa sebab yang menjadi latar belakang dari peristiwa tersebut. Adapun latar belakang yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. PKI tidak puas dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah

Terdapat perbedaan antara PKI dengan Kabinet Hatta dalam hal penentuan kebijakan-kebijakan untuk mempertahankan kemerdekaan, terkait dengan upaya Belanda untuk menguasai kembali Republik Indonesia. Perbedaan tersebut dalam hal pelaksanaan persetujuan Renville dan dalam hal penerapan politik luar negeri. Dilihat dari sudut pandang PKI kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dinilai keliru dan harus diubah. Berkaitan dengan Renville, PKI tidak setuju atau tidak sependapat jika pemerintah melaksanakan dan melanjutkan persetujuan tersebut. Alasan penolakan tersebut "...karena persetujuan-persetujuan itu kalau dipraktikkan, akan mewujudkan negara yang pada hakikatnya sama saja dengan jajahan..."¹²

PKI menginginkan bahwa pelaksanaan persetujuan Renville harus dibatalkan. Segala perundingan dengan Belanda akan dilaksanakan setelah Belanda meninggalkan Republik Indonesia. Secara logis tuntutan PKI ini tidak masuk akal, karena Belanda jelas-jelas tidak akan mau hengkang dari Republik Indonesia, mengingat tujuan utama Belanda adalah mengambil alih Republik ini. Keberhasilan Belanda masuk kembali ke Republik Indonesia, dapat dikatakan sebagai peluang emas yang tidak akan disia-siakan oleh Belanda. Jadi tidak akan mungkin Belanda

¹² Soe Hok Gie, *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan Kisah Pemberontakan Madiun September 1948*, Yogyakarta, Benteng Budaya, 1997, hlm. 217.

mau henggang dari Republik Indonesia, kemudian menjalankan perundingan. Berkaitan dengan hal ini Muso datang menemui Bung Hatta, inti dari pertemuan tersebut adalah agar persetujuan Renville dibatalkan pelaksanaannya.¹³ Menanggapi tuntutan Muso tersebut, Bung Hatta menjawab antarlain :

“Bung, dalam perundingan untuk melaksanakan persetujuan Renville banyak sekali perbedaan pendapat antara delegasi kita dengan delegasi Belanda. Ada kemungkinan Belanda menarik diri dan mengadakan aksi militer lagi. Dan dengan sendirinya masalah itu kembali ke PBB. Dengan itu kita makin dekat dengan penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada kita. Karena itulah pentingnya untuk melaksanakan persetujuan Renville.”¹⁴

Secara halus usulan Muso tersebut ditolak oleh pemerintah, melalui jawaban Bung Hatta di atas.

Sikap Kabinet Hatta mempertahankan pelaksanaan persetujuan Renville sebagai salah satu jalan yang paling mungkin untuk ditempuh dan paling tepat untuk mempertahankan kemerdekaan, terbukti ada benarnya. Hal ini dapat dilihat bahwa Belanda pada akhirnya melakukan Agresi Militer yang kedua. Pada agresi tersebut KTN yang kebetulan sedang berada di Kaliurang, menyaksikan langsung agresi militer tersebut, dengan sendirinya Belanda mendapat penilaian yang tidak baik di mata KTN. Permasalahan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia pada akhirnya dikembalikan kepada PBB. Akan tetapi bukti yang paling nyata adalah Indonesia Merdeka, yaitu ketika Belanda menyerahkan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949.

Dalam hal politik luar negeri, PKI menginginkan dan mendesak pemerintah untuk berkiblat ke Uni Soviet dan terus menuntut hubungan dengan negara tersebut,

¹³ Wangsa Widjaja, I., *Mengenang Bung Hatta*, Jakarta, CV Haji Masagung, 1988, hlm. 63.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 63-64.

yang berarti bahwa politik bebas aktif tidak perlu untuk dilanjutkan. PKI mengajukan tuntutan ini karena Muso dan para pemimpin PKI lainnya mencurigai bahwa Amerika Serikat mendukung Belanda, hal ini kemudian mendorong perlunya Indonesia tergantung dan bersekutu dengan kutub internasional yang sebaliknya, yaitu Uni Soviet.¹⁵ Muso memberikan tekanan besar kepada tema bahwa, di dalam suatu dunia yang terbagi menjadi dua blok besar, Indonesia tidak mungkin tetap netral, tetapi harus memilih antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.¹⁶ Berkaitan dengan pendapat ini, dalam pidatonya di hadapan Federasi Pelajar Indonesia pada tanggal 5 September 1948, Muso menyatakan : “Suatu bangsa seperti Indonesia yang sedang berjuang melawan imperialisisme, jelas tidak dapat memihak kepada kekuatan imperialis; ia harus menggabungkan dirinya dengan kekuatan-kekuatan yang berperang melawan imperialis, dan ini berarti Rusia”.¹⁷

Pernyataan-pernyataan Muso yang mengarah dan berkaitan dengan tuntutan PKI untuk berkiblat ke Uni Soviet sering dilontarkannya, seperti pada tanggal 8 September 1948 di depan suatu rapat raksasa di Madiun, ia mengatakan antarlain sebagai berikut : “...Sovyet Uni adalah pemimpin revolusi dunia, di mana revolusi kita merupakan bagian dari padanya, karena itu kita harus berada di bawah pimpinannya...”.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa PKI sangat mengharapkan hubungan dengan Uni Soviet bisa terrealisasikan. Sementara PKI mengajukan tuntutan-tuntutan untuk mengikatkan diri pada salah satu blok yang bertikai yaitu Uni Soviet. Pemerintah dalam hal ini Kabinet Hatta tetap mempertahankan untuk tetap bersikap

¹⁵ Kahin. George Mc Truman , *op.cit*, hlm. 359.

¹⁶ *Idem*

¹⁷ *Idem*

¹⁸ Himawan Soetanto, *Perintah Presiden Soekarno Rebut Kembali Madiun*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm.118.

netral. Perdana Menteri Hatta sebagai seorang nasionalis, bersikap keras, menolak tuntutan PKI, agar Indonesia berpihak kepada Uni Soviet.¹⁹

Pemerintah memiliki alasan tersendiri untuk tetap bersikap netral. Penjelasan tentang sikap pemerintah tersebut disampaikan oleh Bung Hatta di depan BPKNP pada tanggal 2 September 1948. Inti dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

“pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya”.²⁰

Selanjutnya Bung Hatta menyatakan lebih lanjut: “perjuangan kita harus diperjuangkan atas dasar...percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan kita sendiri. Ini bukan berarti bahwa kita tidak akan mengambil keuntungan dari pergolakan politik internasional. Perjuangan bangsa kita tidak bisa dipecahkan dengan menuruti simpati saja, tetapi hendaknya didasarkan kepada realitas, kepada kepentingan negara kita setiap waktu.”²¹

Kelemahan jika menempuh cara yang dianjurkan oleh komunis juga disinggung. Pada intinya jika kita berkiblat ke Uni Soviet hanya kepentingan Uni Soviet dalam perjuangan politik internasional yang akan diutamakannya,²² jadi negara-negara yang bersekutu hanya akan dijadikan alat untuk mendukung kepentingan Uni Soviet. “Kalau perlu untuk memperkuat kedudukan Uni Soviet, segala kepentingan di luar Uni Soviet dikorbankan, terhitung juga kepentingan kemerdekaan negara-negara jajahan, sebagaimana terjadi pada tahun 1935”.²³ Kemerdekaan Indonesia menjadi tergantung kepada Uni Soviet bukan kepada usaha

¹⁹ *Ibid*, hlm.113.

²⁰ Sri Edi Swasono & Fauzie Ridjadi, *Mohammad Hatta Beberapa Pokok Pikiran*, Jakarta, UI Press, 1992, hlm. 30.

²¹ *Idem*

²² *Ibid*, hlm. 31.

²³ *Idem*

bangsa kita, mengingat menurut pendapat komunis kemerdekaan akan datang dengan sendirinya jika Uni Soviet berhasil mencapai kemenangan dalam pertempuran dengan imperialis.²⁴ Bung Hatta mengatakan bahwa seorang nasionalis meskipun punya pandangan sosialis, ia akan lebih menekankan bahwa kemerdekaan nasional adalah yang terutama, taktik-taktik perjuangan disesuaikan dengan keadaan.²⁵ Oleh karenanya seorang nasionalis tidak memilih salah satu dari kedua ideologi yang saling bertentangan itu, betapapun ia sangat bersimpati pada salah satunya.²⁶

Berubahnya strategi politik komunis internasional dari strategi Dimitrov ke strategi Zhdanov tidak bisa dipungkiri memberikan pengaruh kepada orang komunis di Indonesia, sehingga PKI menuntut pembatalan persetujuan Renville dan menuntut agar politik luar negeri RI memilih blok Uni Soviet.²⁷ Semula PKI berpegang pada strategi politik Dimitrov tahun 1935. Menurut strategi ini kaum komunis merasa perlu bekerja sama dengan kaum liberal kapitalis untuk menghadapi ancaman fasisme yang dipandang lebih berbahaya. Oleh karena itu setelah Indonesia merdeka, orang-orang komunis menempuh garis lunak, berunding dan berkompromi dengan Belanda. Perlu diingat bahwa pemerintahan pada waktu itu didominasi oleh golongan kiri.

Setelah blok komunis dan blok liberal berhasil mengalahkan fasisme, strategi politik Dimitrov ini masih terus dilanjutkan. Hal ini dikarenakan komunis percaya bahwa Eropa akan jatuh ke tangan komunis sebagai akibat keguncangan-keguncangan ekonomi, politik dan sosial, setelah Perang Dunia II. Sementara sejak

²⁴ *Idem*

²⁵ *Ibid*, hlm. 32.

²⁶ *Idem*

²⁷ Himawan Soetanto, *op.cit*, hlm. 111.

pertengahan tahun 1947, golongan-golongan non komunis dalam hal ini Amerika Serikat, mulai sadar akan bahaya komunis, sehingga mengambil tindakan-tindakan yang drastis. Amerika Serikat mulai mengorganisasikan Rencana Marshall pada bulan juli 1947, untuk membendung komunisme. Harapan komunis untuk mengkomunikasikan Eropa menjadi hilang. Oleh karena itu Uni Soviet kemudian merubah strategi politiknya ke strategi Zhdanov pada tanggal 22 September 1947. Zhdanov melancarkan teori dua kubu, imperialis dipimpin oleh Amerika Serikat dan kubu anti imperialis dipimpin oleh Uni Soviet. “Pada pokoknya teori Zhdanov ini menyatakan bahwa kerjasama dengan kaum imperialis tidak usah dilanjutkan dan partai-partai komunis harus mengambil garis keras dan memimpin perjuangan di negaranya”.²⁸ Aplikasi tentang teori ini dapat dilihat dalam analisis Muso terhadap Revolusi Indonesia, yang dituangkan dalam tesisnya tentang “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”.

b. PKI tidak puas dengan susunan Kabinet Hatta

PKI tidak puas dengan Kabinet Hatta, hal ini digambarkan oleh Muso melalui pidatonya pada tanggal 8 September 1948 di dalam rapat raksasa di Madiun. Muso menyatakan bahwa “proklamasi kemerdekaan telah menempuh jalan yang salah dan kini pimpinan revolusi seluruhnya berada di tangan kaum borjuis. Jika kaum buruh mengambil pimpinan, maka keadaan akan berlainan”.²⁹ Kaum borjuis yang dimaksud oleh Muso adalah orang-orang yang tergabung dalam Kabinet Hatta termasuk Soekarno-Hatta. Lebih lanjut ia mengatakan “bahwa pimpinan di negeri kita itu

²⁸ Soe Hok Gie, *op.cit*, hlm 166.

²⁹ A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 8 Pemberontakan PKI 1948*, Bandung, DISJARA-AD, Angkasa, 1979, hlm. 138.

harus berada di tangan kaum buruh progresif yang tergabung dalam PKI”.³⁰ Menurut Muso, suatu kesalahan jika pimpinan revolusi tidak berada di tangan kelas yang paling revolusioner, yaitu kelas buruh. Mengapa harus kelas buruh ?, Muso mengatakan karena hanya kelas buruh yang paling konsekuen dalam menjalankan revolusi dan anti imperialis.

Untuk memperbaiki jalannya revolusi Muso mengajukan tentang pemerintahan Front Nasional. “PKI harus berdaya agar pemerintahan Front Nasional segera dapat menggantikan pemerintah yang sekarang. Hanya pemerintah semacam ini yang sanggup mengatasi kesukaran-kesukaran dalam negeri serta menyusun perlawanan anti imperialis secara konsekuen”.³¹ Dalam hal ini Front Nasional tentunya akan dipimpin oleh PKI.³² Keterangan secara singkat tentang Front Nasional akan dijelaskan pada bagian berikutnya, di bawah ini.

c. Gagalnya segala upaya parlementer PKI untuk duduk dalam pemerintahan

Jalur legal atau jalur parlementer menjadi langkah awal bagi Muso dalam upayanya memasukkan PKI dalam pemerintahan. Langkah parlementer awal yang ditempuh Muso adalah dengan menempatkan perwakilannya di KNP dan BPKNP. Dalam hal ini Muso berhasil menempatkan 116 orang perwakilan dari jumlah total 413 anggota KNP.³³ Sementara di BPKNP Muso hanya mampu menempatkan 8 orang dari jumlah total 43 anggota BPKNP.³⁴ Jumlah ini masih tergolong kurang untuk dapat memenangkan suara mayoritas untuk mendapatkan kekuasaan politik.

³⁰ *Idem*

³¹ Soe Hok Gie, *op.cit*, hlm. 218.

³² *Idem*

³³ Himawan Soetanto, *op.cit*, hlm.117.

³⁴ *Idem*.

Meskipun usaha untuk menempatkan perwakilannya di KNP dan BPNKP kurang berhasil, Muso masih bertahan di jalur parlementer dengan melakukan kampanye ke beberapa daerah untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat dalam menentang setiap program Kabinet Hatta. Daerah-daerah yang menjadi lokasi kampanye adalah Yogyakarta (3 September 1948), Surakarta (7 September 1948), Madiun (8 September 1948), Kediri (10 September 1948), Jombang (13 September 1948), Bojonegoro (14 September 1948), dan Cepu (16 September 1948).

Di samping mengadakan kampanye Muso juga mengupayakan terbentuknya suatu Front Nasional. Mengingat Muso masih melakukan perjalanan untuk melakukan kampanye, tugas pembentukan Front Nasional ditugaskan antarlain kepada Alimin, Sakirman, Tan Ling Djie, dan Abdoel Madjid. Menurut Muso Front Nasional merupakan persatuan para anggota semua partai yang masuk secara individual.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Front Nasional dapat disamakan dengan partai besar tunggal, hal ini dapat dilihat dari sifat keanggotaan dari front tersebut bahwa front beranggotakan semua anggota partai yang masuk secara individual. Dalam hal ini keanggotaannya tidak atas nama partai tetapi atas nama individu. Pembentukan Front Nasional ini mutlak diperlukan oleh PKI untuk kembali duduk dalam kursi pemerintahan. Gagalnya pembentukan Front Nasional dapat disamakan dengan berakhirnya harapan PKI untuk dapat kembali dalam pemerintahan melalui jalur parlementer atau jalur legal, mengingat PKI sudah kalah dalam perwakilannya di KNP dan BPKNP untuk memenangkan suara agar dapat duduk kembali dalam pemerintahan.

Berkaitan dengan Front Nasional, Muso juga berpendapat supaya dibentuk suatu kabinet yang terdiri dari wakil-wakil Front Nasional yang paling cakap sebagai jalan untuk meneguhkan pemerintahan.³⁵ Dari pendapat Muso ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabinet Hatta harus mundur dan diganti dengan kabinet baru yang beranggotakan wakil-wakil dari Front Nasional. Untuk merealisasikan terbentuknya Front Nasional, PKI pertama kali mengajak dua partai terbesar yaitu Masyumi dan PNI untuk bergabung ke dalam front tersebut. Upaya ini ternyata sia-sia dan gagal sebagai akibat Masyumi dan PNI menolak tawaran tersebut. Secara formal Masyumi menolak pada tanggal 11 September 1948 dan PNI menolak pada tanggal 13 September 1948. Gagalnya upaya pembentukan Front Nasional ini semakin meyakinkan Muso bahwa jalur parlementer sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk memperjuangkan partainya agar dapat ambil bagian dalam pemerintahan dan dalam memperjuangkan cita-cita partainya, yaitu memegang kendali dalam memimpin revolusi rakyat Indonesia menggunakan dasar perjuangan kaum komunis. Sebagai dampaknya muncul peristiwa yang terkenal dengan sebutan Peristiwa Madiun 1948.

d. Madiun Sebagai Basis Perlawanan PKI Muso

Madiun adalah sebuah kota di Propinsi Jawa Timur dengan luas 6506 Km². Madiun terletak 169 km sebelah barat Surabaya, atau 114 km sebelah timur Surakarta. Pada waktu revolusi sesudah Renville, kota Madiun yang berpenduduk 200.000 merupakan kota ketiga Republik Indonesia. Madiun memiliki arti penting dalam Peristiwa Madiun, mengingat kota ini dipilih sebagai pusat atau basis

³⁵ A.H. Nasution, *op.cit.*, hlm. 120.

dilancarkannya perlawanan PKI pimpinan Muso terhadap pemerintah pada tahun 1948. Berbicara tentang Madiun sebagai basis dilancarkannya perlawanan PKI Muso, tentunya ada pertimbangan tersendiri mengapa Madiun dipilih sebagai basis dilancarkannya perlawanan terhadap pemerintah.

Berdasarkan kesaksian Soemarsono, Madiun dipilih sebagai basis dilancarkannya perlawanan karena di Madiun terdapat kesatuan pendukung PKI Muso yaitu kesatuan Brigade 29 di bawah pimpinan Kolonel Dachlan.³⁶ Kekuatan Brigade 29 di Madiun terutama bersandar pada batalyon-batalyon Mustofa, Mursid, Darmintoadji, Pajang Djokoprojono, Abdurahman dan Maladi Yusuf.³⁷ Batalyon-batalyon tersebut kebanyakan terdiri dari eks-Pesindo yang kemudian bergabung dalam Brigade 29.

Sebenarnya, “ketika di Solo mulai terjadi *clash-clash* kecil antara kekuatan kiri dan kekuatan pro-Pemerintah, FDR Pusat Yogya, bertolak dari kuatnya FDR di Madiun, menginstruksikan kepada Soemarsono: Bilamana terjadi sesuatu Madiun akan dijadikan basis. Karena itu Madiun harus diperkuat dengan satuan-satuan untuk mempertahankan FDR”.³⁸

Kutipan di atas menunjukkan bahwa sebelum Pemberontakan PKI di Madiun meletus, Madiun sudah pernah direncanakan sebagai basis gerilya paling kuat untuk perjuangan jangka panjang golongan kiri oleh FDR. Bertolak pada instruksi yang pernah diberikan pada jaman FDR dan dari kejadian maupun pengalaman-pengalaman di Blitar, Nganjuk dan Solo maka Soemarsono, Mustopha bersama perwira-perwira Kiri lainnya memutuskan untuk mendislokasikan pasukan ke

³⁶Hersri Setiawan, *Negara Madiun Kesaksian Soemarsono Pelaku Perjuangan*, Jakarta, FuSPAD, 2002, hlm, 93.

³⁷ Soe Hok Gie, *op.cit*, hlm. 249.

³⁸ Imam Soedjono, *Yang Berlawan Membongkar Tabir Pemalsuan Sejarah PKI*, Yogyakarta, Resist Book, 2006, hlm. 228.

Madiun.³⁹ Berkaitan dengan kepentingan tersebut sejak tanggal 14 September 1948 batalyon-batalyon dari brigade 29 diberangkatkan ke Madiun guna memperkuat Madiun.

Batalyon-batalyon tersebut ditempatkan secara taktis di Madiun dan beberapa daerah abangan di Karesidenan Madiun. Adapun pembagian penempatannya adalah sebagai berikut: di daerah abangan Ponorogo ditempatkan batalyon Pajang Djokoprojono, Abdurahman dan Maladi Yusuf, di Magetan ditempatkan batalyon Mursid, yang terletak disebelah timur lereng gunung Lawu, dan di Ngawi di tempatkan batalyon Darmintoadji, guna mencegat jalur kunci perhubungan jalan raya dan jalan kereta api Solo-Madiun. Sementara di Madiun sendiri di tempatkan batalyon Mustofa dan diperkuat lagi dengan ditariknya satuan-satuan kiri yang menjaga garis (demarkasi) Van Mook.⁴⁰

Nilai taktis dari penempatan batalyon-batalyon tersebut adalah pertama, penempatan batlyon di daerah abangan seperti di Ponorogo memiliki perhitungan jika terjadi *clash* antara pasukan Kiri dengan pasukan pro pemerintah, maka semakin pasukan Kiri dapat membaur dengan masyarakat abangan akan semakin sulit bagi pasukan pro pemerintah untuk mengejar pasukan Kiri.⁴¹ Kedua, penempatan pasukan di tiga tempat yaitu Ponorogo, Magetan dan Ngawi dimaksudkan sebagai benteng pertahanan guna melindungi Madiun dan menahan serangan dari pasukan pro pemerintah. Hal ini didasarkan adanya perhitungan pasukan kiri bahwa jika terjadi serangan, maka serangan terbesar pasukan pro pemerintah akan datang dari arah

³⁹ *Idem*

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 229.

⁴¹ *Idem*

barat.⁴² Dengan adanya pendislokasian pasukan ke Madiun dan penarikan pasukan kiri yang menjaga garis Van Mook untuk dipindahkan di Madiun, menunjukkan bahwa Madiun dilihat dari kekuatan militernya lebih unggul dari daerah lain yang diduduki PKI Muso semisalnya Pati.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pertimbangan pertama PKI memilih Madiun sebagai basis dilancarkannya perlawanan terhadap pemerintah, karena kekuatan militer PKI terkonsentrasi di Madiun. Hal ini merupakan pertimbangan yang logis jika kemudian Madiun dipilih sebagai basis perlawanan, karena suatu kudeta tidak dapat dilepaskan dari kekuatan militer yang kuat. Militer sendiri merupakan satu-satunya alat untuk melakukan kudeta. Oleh karena itu kudeta tidak dapat dilepaskan dari militer.

Pertimbangan kedua, mengapa Madiun dipilih sebagai basis perlawanan terhadap pemerintah karena di Madiun, PKI mendapatkan dukungan dari sebagian rakyat setempat. Pada tahun 1948, sokongan terhadap PKI di Madiun datang dari petani-petani di sekitar perkebunan, buruh-buruh perkebunan dan pabrik-pabrik gula, buruh kereta api dan sarekat pegawai atau buruh pamong praja.⁴³ Selain itu secara samar-samar dukungan juga datang dari penduduk abangan di karesidenan Madiun.⁴⁴

Perlu diketahui bahwa sejak pecahnya revolusi, kehidupan politik di karesidenan Madiun dikuasai oleh sayap kiri yang terdiri dari Sarekat Rakyat (SR), generasi tua dan Pesindo.⁴⁵ Hal ini tentunya turut mempermudah PKI dalam mencari dukungan politik di Madiun. Di samping itu situasi di Madiun turut mendukung,

⁴² *Idem*

⁴³ Onghokham, *Rakyat dan Negara*, Jakarta, Sinar Harapan, 1983, hlm. 163.

⁴⁴ *Idem*

⁴⁵ *Idem*

bahwa Madiun merupakan daerah yang minus dalam produksi beras, hal ini menimbulkan tekanan-tekanan keras dari petani-petani tanpa tanah dan pihak lain untuk mengubah berbagai perkebunan menjadi sawah.⁴⁶ Situasi ini dimanfaatkan oleh PKI untuk mencari dukungan dan untuk mendapatkan simpati dari rakyat. PKI Muso sering mengungkapkan bahwa PKI memperjuangkan kepentingan kaum buruh dan petani, akan tetapi pihak yang paling diperhatikan adalah kaum tani.⁴⁷ Petani sendiri merupakan golongan mayoritas sehingga golongan ini yang ditonjolkan sebagai partner kaum buruh dalam revolusi. Berkaitan dengan hal tersebut guna menarik simpati dan dukungan rakyat, Muso menekankan keharusan *land reform* yang berkisar pada demokratisasi pamong desa, yang berarti bahwa tanah *bengkok* harus dihapuskan.⁴⁸ “Kepada kaum tani hendaknya ditolong dengan membagi-bagikan tanah pada desa dan kemudian dikerjakan secara kolektif.”⁴⁹ Hal ini tentu memberikan dan membangkitkan harapan kaum tani untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian tidak mengherankan jika kemudian PKI mendapatkan dukungan dari kalangan petani di Madiun.

Di atas telah disebutkan bahwa di samping kaum petani PKI juga mendapatkan dukungan walaupun secara samar-samar dari kaum abangan. Di Madiun terdapat dua golongan sosial yang saling bertentangan, yaitu golongan santri dan golongan abangan. Benih pertentangan ini berasal dari perbedaan agama antara santri dan abangan, yang kemudian berkembang ke pertentangan politik, ketika partai politik mulai masuk ke dalam kehidupan kedua golongan tersebut untuk

⁴⁶ *Idem*

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 162.

⁴⁸ *Idem*

⁴⁹ Soe Hok Gie, *op.cit*, hlm. 217.

mendapatkan dukungan politik. Penulis tidak akan membahas konflik ini secara mendetail, penulis hanya membahas keterkaitan antara konflik santri dan abangan dengan dukungan kedua golongan ini kepada partai politik yang saling bertentangan pada masa pemberontakan PKI di Madiun.

Golongan santri merupakan golongan yang menganut agama Islam, sedangkan golongan abangan merupakan golongan yang menganut Sinkretisme. Perbedaan dari agama golongan santri dengan abangan secara singkat sebagai berikut: pertama, bagi golongan abangan doktrin agama tidak begitu dipentingkan, mereka hanya mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang tua mereka dan apa yang dicontohkan oleh pimpinan mereka. Ajaran agama golongan abangan tidak mengatur kehidupan bermasyarakat, akan tetapi hanya mengatur kehidupan kerohanian mereka. Sebaliknya doktrin untuk golongan santri merupakan sesuatu hal yang penting karena di dalamnya diatur semua aspek upacara agama, yang harus dilakukan oleh seorang muslim.

Doktrin Islam di samping mengatur tentang kehidupan keagamaan juga mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Golongan santri diwajibkan menyesuaikan tingkah laku anggotanya, mencocokkan susunan dan sistem masyarakat sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist.⁵⁰ Berbeda dengan golongan abangan, bahwa tidak ada kewajiban untuk menyesuaikan susunan masyarakat sesuai dengan agama mereka.⁵¹ Hal ini yang kemudian menjadi benih konflik kedua golongan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa prinsip santri tersebut secara tidak langsung akan mendesak eksistensi dari golongan abangan.

⁵⁰ Arbi Sanit, *Badai Revolusi Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 208.

⁵¹ *Idem*

Kedua, golongan abangan tidak mempercayai akan adanya Allah, tetapi mereka percaya kepada kekuatan gaib.⁵² Sebaliknya golongan santri mengimani Allah sebagai satu-satunya penguasa tertinggi alam semesta. Ketiga, golongan santri memiliki satu aturan yang disusun dalam suatu naskah yaitu Qur'an. Abangan tidak memiliki hal semacam ini, ajaran agama mereka diwariskan melalui sistem adat secara turun temurun.⁵³

Dilihat dari segi kepemimpinannya golongan santri dipimpin oleh kyai, sedangkan golongan abangan dipimpin oleh dukun, pawang dan guru.⁵⁴ Ikatan kepemimpinan dari kedua golongan tersebut sangat kuat pengaruhnya di kalangan masyarakat dari masing-masing golongan. Seorang pemimpin dianggap sebagai bapak, ia dipatuhi dan bahkan ditakuti, darinya diharapkan perlindungan dan kepemimpinan.⁵⁵ Sifat kepemimpinan yang demikian ini kemudian dimanfaatkan oleh partai-partai politik yang saling bertentangan seperti Masyumi dan PKI untuk memperoleh dukungan massa sebanyak mungkin. Partai-partai politik mulai mengambil orang desa sebagai pemimpin-pemimpin partai tingkat desa.⁵⁶ Hal ini mulai menyadarkan masyarakat dari golongan santri dan abangan bahwa melalui partai orang bisa menempati status yang baik dalam masyarakat dan dapat dipakai untuk mempertahankan suatu status dalam masyarakat.⁵⁷ Golongan santripun menjadi tertarik untuk masuk ke dalam partai politik. Partai politik yang dipilih oleh golongan santri adalah partai Islam yaitu Masyumi, dasarnya adalah persamaan

⁵² *Ibid*, hlm. 167.

⁵³ *Ibid*, hlm. 170.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 175.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 175.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 196.

⁵⁷ *Idem*

agama dalam golongannya sendiri. Guna menjaga perimbangan sosial golongan abangan mengimbangi dengan mendukung partai sekuler seperti PKI, karena tidak mungkin golongan abangan masuk dalam partai Islam, dan karena PKI yang berani mengakui sebagai partai abangan. Dari sini awal mula golongan abangan mendukung PKI.

4. Kudeta yang dilakukan oleh PKI Muso Membahayakan Kepentingan Nasional

Latar belakang yang ketiga ini sebenarnya merupakan latar belakang sekunder, yang melatarbelakangi Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun. Berbicara tentang peristiwa Madiun, Bung Hatta mengungkapkan pendapatnya mengapa pemberontakan itu perlu untuk di padamkan. Bung Hatta menilai bahwa pemberontakan PKI tidak menguntungkan bagi Republik Indonesia (RI). Pemberontakan ini justru hanya akan menghancurkan segala upaya Republik Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Dengan kata lain akan membahayakan kemerdekaan Indonesia.⁵⁸ Lebih singkatnya membahayakan kepentingan nasional.

Bung Hatta mengungkapkan bahwa, jika PKI Muso berhasil merebut kekuasaan negara melalui kudetanya, tidak menutup kemungkinan Amerika Serikat akan membantu Belanda dengan kekuatan militernya untuk menyerbu dan menguasai Republik Indonesia.⁵⁹ Mengingat Amerika Serikat merupakan musuh komunisme nomor satu di dunia internasional. Dapat dianalisis bahwa dalam penyerangan

⁵⁸ Deliar Noer, *Mohammad Hatta Biografi Politik*, Jakarta, LP3ES, 1990, hlm. 335.

⁵⁹ *Idem*

tersebut Amerika Serikat akan menggunakan dalih membendung penyebarluasan paham komunis di Republik Indonesia, karena Republik Indonesia dinilai telah menjadi negara komunis. Dinilai menjadi komunis karena, jika pemerintahan jatuh ke tangan PKI Muso sudah dapat dipastikan pemerintahan yang dipimpinnya akan berhaluan komunis.

Dengan serangan tersebut, dapat dipastikan Republik Indonesia akan jatuh ke tangan Belanda dalam waktu yang relatif singkat. Seperti yang diketahui oleh dunia internasional pada umumnya bahwa kekuatan militer Amerika Serikat merupakan salah satu kekuatan militer yang diperhitungkan di dunia. Sementara kondisi pertahanan RI tidak menguntungkan sebagai dampak dari persetujuan Renville dan pemberontakan PKI di Madiun. Selain itu dilihat dari fasilitas dan kemampuan militer RI waktu itu sangat tertinggal jauh dengan Amerika Serikat. Dengan demikian kemerdekaan yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun menjadi semakin sulit untuk dipertahankan. Republik Indonesia justru akan menjadi semakin jauh dari terwujudnya kemerdekaan yang dicita-citakan. Republik Indonesia menghadapi resiko lenyap dan PKI Muso tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun dari kudeta yang dilakukannya.

Selain hal di atas ada hal yang dapat dipastikan bahwa Belanda akan memperoleh keuntungan dari pemberontakan PKI di Madiun. Pada masa pemberontakan tersebut, Republik Indonesia dihadapkan pada realita bahwa kondisi pertahanan tidak begitu menguntungkan. Perjanjian Renville yang disetujui oleh pemerintah masa kabinet Amir Sjarifuddin pada tanggal 17 Januari 1948 turut berperan dalam menimbulkan permasalahan pertahanan dalam negara. Hal ini

berkaitan dengan salah satu isi dalam perjanjian Renville yang menyatakan diterimanya garis (demarkasi) Van Mook.

Garis Van Mook memiliki arti garis batas antara daerah kedudukan masing-masing pihak (Belanda dan Republik Indonesia) pada saat gencatan senjata diselenggarakan.⁶⁰ Diterimanya garis Van Mook oleh Amir Sjarifuddin membuat posisi pertahanan negara menjadi semakin terdesak oleh tentara Belanda. Hal ini dikarenakan garis Van Mook merupakan penghubung antara titik-titik terdepan dari kedudukan tentara Belanda dalam penyerbuan atas daerah RI, sehingga menutup daerah-daerah yang secara efektif masih dikuasai oleh RI.⁶¹ Dengan demikian pasukan militer RI yang berada di daerah garis Van Mook mau tidak mau harus meninggalkan daerah tersebut walaupun dengan perasaan tidak rela.

Situasi ini menunjukkan bahwa sebelum Pemberontakan PKI di Madiun terjadi, kondisi pertahanan RI dalam keadaan terdesak dan melemah, sebagai akibat berkurangnya ruang gerak pasukan RI dan menyempitnya wilayah kekuasaan RI. Dengan dilancarkan kudeta oleh PKI Muso, Belanda mendapatkan keuntungan tersendiri. Keuntungan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Adanya pemberontakan PKI berarti RI yang sudah terdesak menjadi semakin terdesak. Pemberontakan PKI dapat dimanfaatkan Belanda sebagai sarana tidak langsung untuk melemahkan kekuasaan RI. Dengan demikian dapat diistilahkan Belanda tidak perlu turun tangan dalam upaya melemahkan kekuatan RI. Belanda hanya perlu menunggu waktu yang tepat sampai kekuatan RI hancur untuk kemudian menyerang RI dan merebutnya. Di samping itu terjadinya pemberontakan PKI Muso ini dapat

⁶⁰ Moedjanto.G., *Indonesia Abad Ke-20 Jilid 2 Dari Perang Kemerdekaan Sampai PELITA III*, Yogyakarta, Kanisius, 1988, hlm. 17.

⁶¹ *Idem.*

dijadikan alasan bagi Belanda untuk masuk ke wilayah RI dengan dalih ikut membantu membendung komunisme. Hal ini terbukti dengan diberikannya tawaran oleh Belanda kepada Bung Hatta untuk membantu memadamkan pemberontakan di Madiun, akan tetapi Bung Hatta menyikapi tawaran tersebut dengan tepat yaitu dengan menolak tawaran tersebut. Bung Hatta mengatakan bahwa peristiwa Madiun adalah masalah dalam negeri RI dan Belanda tidak berhak campur tangan.

Terjadinya konflik senjata antara saudara sebangsa ini mengakibatkan kekuatan pertahanan menjadi berkurang dan semakin melemah, mengingat konsentrasi pasukan yang semula diarahkan untuk memblokir tentara Belanda sebagian harus dialihkan untuk saling menyerang di antara saudara sebangsa. Hal ini tentunya memberi peluang bagi pasukan militer Belanda untuk memenangkan pertempuran dalam merebut RI. Khususnya dalam agresi militer ke dua, yang telah lama direncanakan Belanda dan telah diprediksikan oleh Bung Hatta bahwa agresi itu akan terjadi, sebagai dampak perundingan antara Belanda dan RI tidak pernah mencapai titik temu. Perhatian pemerintah menjadi terpecah belah di salah satu sisi harus mempertahankan garis demarkasi Van Mook di sisi yang lain harus menghadapi pemberontakan PKI. Sementara Belanda dapat dengan leluasa mempersiapkan strategi dalam menghadapi pemerintahan RI. Sehingga dapat sewaktu-waktu Belanda menyerang RI dari belakang. Terbukti Belanda melancarkan Agresi Militernya yang kedua dan berhasil menduduki ibu kota RI di Yogyakarta. Walaupun hanya sementara dan Agresi itu sendiri akhirnya menjadi bumerang bagi Belanda.

Bung Hatta menegaskan juga bahwa tindakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI di Madiun sebagai tindakan ilegal, sehingga pemerintah perlu mengambil tindakan tegas untuk menghentikannya. Adapun alasannya adalah sebagai berikut, pemerintah telah menyatakan berulang kali bahwa pemerintah membela demokrasi dan menghormati segala bentuk ideologi yang ada.⁶² Pemerintah juga menyatakan tidak akan menindas segala bentuk ideologi yang ada seperti apapun coraknya. “Tetapi segala tindakan anarki, dari manapun datangnya, dan kekacauan-kekacauan yang membahayakan negara dan mengganggu keselamatan umum akan dibasmi”.⁶³

Sikap pemerintah menghormati segala macam bentuk ideologi antarlain dapat dibuktikan dari itikat baik Bung Hatta untuk mengajak Partai Sosialis, partainya Amir Sjarifuddin (Sebelum terbentuknya FDR) untuk duduk dalam kabinetnya, guna bekerjasama mengatasi pemasalahan politik dalam negeri, walaupun tidak ditanggapi dengan baik oleh Amir Sjarifuddin. Bung Hatta menegaskan kembali bahwa dalam pemerintahan yang demokratis tiap-tiap golongan dapat merebut kekuasaan pemerintahan melalui jalur pemilihan umum, bukan melalui jalur kekerasan. Dalam jalur pemilihan umum ini, rakyat yang akan menentukan golongan atau partai mana yang akan memegang pemerintahan yang baru, menggantikan golongan atau partai sebelumnya. Tentu semua itu didasarkan atas kepercayaan yang diberikan rakyat kepada golongan atau partai yang mereka dukung.

Pemerintah sebenarnya sudah membuka jalan bagi Partai Sosialis untuk ikut serta kembali dalam pemerintahan. Akan tetapi Amir Sjarifuddin tidak menyikapinya dengan bijaksana. Sehingga Kabinet Hatta berjalan tanpa keikutsertaan kelompok

⁶² Wangsa Widjaja, I., *op.cit*, hlm. 264.

⁶³ A.H. Nasution, *op.cit*, hlm. 243.

Amir Sjarifuddin. Dengan Partai barunya yang bernama FDR, Amir Sjarifuddin justru semakin giat dalam melancarkan oposisi untuk menjatuhkan pemerintah. Dalam perkembangannya setelah FDR bubar karena partai-partai yang tergabung di dalamnya mengabungkan diri dalam PKI pimpinan Muso, mereka justru memilih jalur kekerasan atau paksaan untuk merebut kekuasaan pemerintah, dengan memberontak dan menyatakan lepas dari pemerintahan RI pimpinan Soekarno-Hatta. Tindakan PKI ini menunjukkan penyimpangan dari tata cara pergantian pemerintahan yang sah. Dengan kata lain PKI melakukan tindakan ilegal dalam upaya merebut kekuasaan pemerintahan.

Di samping hal di atas Bung Hatta juga mengemukakan pemikirannya sebagai berikut. Pemerintahan yang dibentuk atas dasar kekerasan dengan melakukan pemaksaan kehendak tidak akan menghasilkan suatu pemerintahan yang demokratis. Hal ini justru akan mengarah pada pembentukan pemerintahan yang diktator. Dalam pemerintahan yang diktator, demokrasi justru tidak akan berkembang. Sementara pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat bukan pemerintahan yang diktator.

BAB III
USAHA-USAHA BUNG HATTA
DALAM MENGHADAPI PEMBERONTAKAN PKI DI MADIUN 1948

A. Usaha Preventif Bung Hatta

Usaha preventif yang dimaksud adalah usaha Bung Hatta dalam mencegah FDR melakukan suatu tindakan sabotase atau suatu pemberontakan. Sejak awal mula Bung Hatta sudah menaruh curiga terhadap FDR, bahwa FDR akan melakukan kudeta atau suatu sabotase terhadap pemerintah.¹ Kecurigaan ini mulai muncul sejak Amir Sjarifuddin menuntut separuh kursi dalam kabinet Hatta. Tuntutan itu sendiri dipandang tidak wajar karena jabatan-jabatan yang diminta adalah jabatan yang tergolong penting, dan Amir Sjarifuddin bersikeras untuk mendapatkannya.

Kecurigaan juga dilihat dari oposisi-oposisi yang mulai gencar dilakukan oleh FDR dengan menyerukan pembubaran Kabinet Hatta. Kebenaran prediski Bung Hatta bahwa FDR akan melakukan suatu pemberontakan menjadi terbukti ada benarnya ketika ditemukan dokumen FDR berjudul Menginjak Tingkat Perjuangan Militer Baru. Dokumen tersebut diperoleh pemerintah dua setengah bulan sesudah peristiwa Madiun.² Menurut G.Mc.T. Kahin dalam dokumen FDR tersebut digariskan dua tahapan perjuangan, yang pertama menempuh jalur parlementer, dan yang kedua, jika yang pertama gagal akan ditempuh jalur non parlementer. Program tersebut disusun atau direncanakan pada pertengahan bulan Juli.

¹ Mohammad Hatta, *Mohammad Hatta Memoir*, Jakarta, Tintamas Indonesia, 1979, hlm. 522.

² Kahin, George Mc Truman, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Jakarta, UNS Perss-Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 341.

Tahapan perjuangan FDR yang dirumuskan dalam dokumen tersebut antarlain sebagai berikut:

1. Program tahap parlementer

- a. “Mempengaruhi KNP agar mau mengeluarkan suatu mosi yang menyatakan bahwa Program Nasional FDR akan dijadikan program pemerintah dan untuk itu, maka pemerintah yang ada sekarang harus dibubarkan dan dibentuk kabinet baru (parlementer) yang bertanggung jawab;
- b. Mempercepat pembentukan Front Nasional (organisasi) terutama Front-front Nasional tingkat wilayah;
- c. Front Nasional akan mengadakan suatu kampanye yang luas ukurannya untuk membubarkan kabinet yang ada sekarang;
- d. Bila rencana yang disebutkan di atas gagal, maka para pekerja, petani, militer dan kelompok-kelompok lainnya yang dapat dibujuk untuk memihak kita, akan mengadakan demonstrasi besar-besaran...

2. Program non parlementer

Bila pemerintah kemudian tetap menolak dibubarkan dan membentuk suatu kabinet nasional baru dengan FDR memegang pos-pos kunci, strategi itu harus dipindah ke tahap yang kedua. Konsep tahap kedua itu menyebutkan: ‘Kami akan memutuskan semua hubungan dengan pemerintah dan melanjutkan perjuangan kami di bawah pimpinan kami sendiri, baik sebagai pemberontak maupun sebagai pemerintahan tersendiri’...”³

Dokumen FDR di atas menunjukkan bahwa rencana pemberontakan sudah dipersiapkan sejak awal oleh FDR, jika jalur parlementer yang ditempuh untuk mengambil alih pemerintahan mengalami kegagalan.

“Pemerintah baru mempelajari perincian ini setelah pecah pemberontakan Madiun. Bagaimanapun juga, pemerintah sudah mengetahui sifat rencana-rencana itu secara umum pada pertengahan bulan Juli, yaitu ketika rencana-rencana yang terperinci tersebut sedang dikonsep. Dengan sendirinya pemerintah lalu memulai mengambil langkah untuk menyingkirkan para perwira FDR dari jenjang komando atau memindahkan mereka ke komando-komando yang kurang strategis dilihat dari tingkat dan sejauh mungkin kurang merangsang FDR untuk memberontak”⁴.

Guna menghindari resiko terjadinya suatu pemberontakan atau suatu sabotase, Bung Hatta mengambil inisiatif untuk melakukan tindakan preventif atau

³ *Idem*

⁴ *Ibid*, hlm. 343-344.

pengecahan, sebelum tindakan FDR membahayakan negara. Tindakan preventif yang diambil oleh Bung Hatta dapat dikatakan cukup efektif dalam melemahkan potensi militer dari FDR dan mengurangi pengaruh golongan kiri dalam angkatan perang. Adapun tindakan atau usaha yang dilakukan oleh Bung Hatta untuk mengantisipasi terjadinya tindakan yang tidak diharapkan dari FDR, adalah dengan menjalankan program Rekonstruksi dan Rasionalisasi (Rera) dalam angkatan bersenjata.

Program ini pertama kali muncul atas inisiatif Zainul Baharuddin dari golongan kiri yang dikenal dengan sebutan mosi Baharuddin, pada masa kabinet Amir Sjarifuddin. Program ini diterima oleh BPKNP pada tanggal 20 Desember 1947 yang kemudian melahirkan undang-undang nomor 3/1948 tentang penempatan angkatan perang di bawah menteri pertahanan. Inti dari undang-undang tersebut berbunyi bahwa angkatan perang ditempatkan di bawah kekuasaan menteri pertahanan, menteri pertahanan bertanggung jawab penuh dibidang organisasi, administrasi, perlengkapan persenjataan, kualitas seluruh perang, politik pertahanan dan siasat militer.⁵ Di balik mosi Baharuddin, Amir Sjarifuddin memiliki tujuan agar angkatan perang sepenuhnya berada di bawah kendali Menteri Pertahanan, ketika mosi ini diajukan menteri pertahanan masih dijabat oleh Amir Sjarifuddin. Sedangkan pada masa Kabinet Hatta program Rera oleh Bung Hatta antarlain dipakai sebagai alat untuk melemahkan potensi militer dari golongan kiri yang tergabung dalam FDR.

Program Rera dalam bidang angkatan bersenjata pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan satu tentara yang efektif dan efisien, dengan menerapkan prinsip

⁵ Pinardi, *Peristiwa Coup Berdarah P.K.I September 1948 di Madiun*, Jakarta, INKOPAK-HAZERA, 1967, hlm. 24.

satu tentara satu komando dalam bentuk dan susunan yang efektif. Selain untuk menciptakan satu tentara yang efektif dan efisien, Rera menjadi alat yang ampuh untuk memotong garis politik kelompok FDR. Mengapa demikian ? Hal ini dikarenakan adanya tentara yang efektif dan efisien dengan satu komando, tentara akan menjadi alat negara yang kebal terhadap agitasi kekuatan-kekuatan politik di luar tentara itu sendiri.

Kekuatan politik di luar tentara yang dimaksud dalam kasus ini adalah partai politik khususnya dari kelompok FDR. Tentara tidak lagi berada dalam pengaruh salah satu partai politik yang ada, agar tentara tidak lagi disalah gunakan untuk menjaga kedudukan dan memperjuangkan tuntutan partai. Mengingat ketika dalam lingkungan angkatan perang RI terdapat pasukan resmi dan pasukan tidak resmi, kondisi ini justru membahayakan negara dan dapat menyebabkan stabilitas negara menjadi terganggu. Hal ini khususnya datang dari pasukan-pasukan yang tidak resmi yang dibangun oleh partai politik yang bersangkutan. Sebagai contohnya adalah Pesindo yang menjadi kekuatan inti dari PKI. Dengan kondisi seperti ini ketika tuntutan suatu partai tidak terpenuhi dan kedudukan mereka menjadi terancam mereka cenderung untuk menggunakan kekuatan bersenjata dalam menyelesaikannya. Dengan kata lain membuka peluang terjadinya kekerasan senjata dalam memaksakan tuntutan partai dan dalam mempertahankan kedudukan partai. Seperti halnya yang dilakukan oleh FDR dengan menciptakan kerusuhan di Solo dan diakhiri dengan pemberontakan PKI di Madiun.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya dua pasukan bersenjata yaitu pasukan resmi dan tidak resmi, mengakibatkan pemerintah mengalami

kesulitan dalam mengontrol pasukan-pasukan bersenjata yang ada. Mengingat pasukan yang dibangun oleh partai politik berdiri sendiri di luar pemerintah, dan lebih mematuhi perintah dari partai. Stabilitas negarapun akan menjadi sulit untuk dijaga, jika masih terdapat pasukan bersenjata di luar pasukan bersenjata resmi pemerintah.

Oleh Bung Hatta hal ini diatasi dengan membentuk satu tentara satu komando. Suatu tentara yang berdiri sendiri di luar partai politik dan berada dalam komando pemerintah. Hanya pemerintah yang berhak menggunakan kekuatan tentara dalam batas untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi kepentingan nasional. Hal ini berarti pasukan-pasukan tidak resmi akan ditiadakan, yang berarti juga mematikan potensi militer dari partai politik khususnya FDR.

Adanya upaya menciptakan satu tentara satu komando, memiliki konsekuensi berupa pengurangan terhadap personil angkatan bersenjata, yang menjadi poin dari program Rera. Hal ini berarti akan diadakan seleksi atas personil angkatan bersenjata. Dalam seleksi tersebut pemerintah hanya akan memakai tenaga yang benar-benar berkulitas dan memiliki mentalitas yang baik. Dalam pengertian setia dan menjunjung tinggi kedaulatan Negara RI dan tidak bermental pemberontak.

Dalam melaksanakan program Rera Bung Hatta mendapatkan dukungan sepenuhnya dari BPKNP. Berkaitan dengan dukungan tersebut BPKNP juga menyampaikan bahwa pemerintah jangan ragu-ragu dalam melaksanakannya dan ditegaskan juga bahwa pemerintah harus bertindak bijaksana dalam melaksanakannya. Dukungan ini tidak hanya datang dari BPKNP tetapi juga datang dari Masyumi, PNI, dan Presiden Soekarno. Dalam rangka menindak lanjuti

pelaksanaan program Rera maka Presiden Soekarno pada tanggal 27 Februari 1948 mengeluarkan penetapan Presiden No. 9/1948. Berdasarkan penetapan Presiden tersebut Panglima Divisi Siliwangi Jendral Mayor A.H. Nasution diangkat sebagai Wakil Panglima Besar Angkatan Perang Mobil, untuk mendampingi Jendral Sudirman selaku Panglima Besar Angkatan Perang Mobil (PBAPM).⁶ Pengangkatan ini ditujukan untuk membantu PBAPM Jendral Sudirman dalam mengemban tugas dari pemerintah untuk melaksanakan Rera. Setelah itu disusul dengan ditandatanganinya Undang-undang Baharuddin tentang penempatan angkatan perang di bawah menteri pertahanan pada tanggal 5 Maret 1948 oleh Presiden Soekarno. Adapun inti dari undang-undang ini sudah disebutkan di bagian sebelumnya.

Dengan diresmikannya Undang-undang Baharuddin tentang penempatan angkatan perang di bawah Menteri Pertahanan oleh Presiden maka pada bulan Maret 1948 Bung Hatta melaksanakan program Rera angkatan bersenjata. Pelaksanaan program Rera untuk memotong garis politik atau potensi militer FDR oleh pemerintah dijalankan dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan Mutasi Terhadap Personalia Angkatan Perang

Mutasi ini dilakukan terhadap personalia yang memang dipandang perlu untuk dimutasikan. Mutasi ini diutamakan untuk mengurangi pengaruh golongan kiri dalam tubuh angkatan perang dan kementerian pertahanan. Mutasi ini dilakukan dengan menyisihkan mereka dari kedudukan-kedudukan penting dalam angkatan perang dan kementerian pertahanan, yang sifatnya menentukan. Mutasi juga dilakukan terhadap para perwira yang dipandang pro terhadap FDR. Mereka di geser kedudukannya

⁶ Himawan Soetanto, *Perintah Presiden Soekarno Rebut Kembali Madiun*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 66.

dalam angkatan perang ke tempat-tempat yang kurang penting. Beberapa pejabat yang dimutasikan antarlain adalah para pejabat kementerian pertahanan pada masa Amir Sjarifuddin, yang terdiri dari Sekjen Kementerian Pertahanan bernama Sukono Djojopratiknjo, dan Atmadji (Direktur Jenderal Urusan Laut).⁷ Di samping kedua pejabat tersebut pada tanggal 29 Mei 1948 Gubernur Militer Surakarta bernama Wikana yang merupakan salah satu tokoh komunis dibebaskan tugas dari jabatannya.⁸

2. Melakukan Penyehatan Terhadap Angkatan Perang

Keberadaan pasukan resmi dan pasukan tidak resmi memberikan keuntungan tersendiri bagi FDR. Karena dengan adanya pasukan tidak resmi yang dibangun oleh partai, memberikan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan pertahanan bagi partai khususnya FDR. Dengan demikian walaupun mereka sudah tidak lagi duduk dalam pemerintahan, mereka masih mempunyai kekuatan militer yang potensial untuk menjatuhkan pemerintah. Adapun pasukan milik partai FDR terdiri dari TNI Masyarakat, Pesindo, dan TLRI. Pasukan-pasukan tersebut dipakai oleh FDR untuk mensukseskan tuntutan mereka dalam menjatuhkan pemerintahan Hatta. Oleh karena itu pemerintah mengarahkan program Rera ke dalam kekuatan militer mereka.

Perlu diketahui bahwa Amir Sjarifuddin berhasil menyusupkan pasukannya, dan mempengaruhi pasukan militer di luar pasukan milik FDR sendiri, seperti dalam Divisi IV Panembahan Senopati. FDR juga berhasil dalam mempengaruhi dan menyusupkan personalinya dalam angkatan perang misalnya dalam tubuh TLRI, sehingga pengaruh golongan kiri dalam angkatan perang cukup luas. Oleh karena itu

⁷ Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, *Bahaya Laten Komunis di Indonesia Jilid I*, Jakarta, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1995, hlm. 98.

⁸ *Idem*

pemerintah melakukan penyehatan terhadap seluruh angkatan perang baik itu yang resmi maupun yang tidak resmi, dalam rangka meminimalkan pengaruh golongan kiri dalam tubuh angkatan perang.

Program Rera ini dilaksanakan dengan menghapus dan melebur pasukan, dalam pembahasan ini khususnya pasukan milik FDR. Dalam pelaksanaannya, pemerintah berhasil menghapus organisasi TNI Masyarakat pada tanggal 15 Mei 1948. Divisi-divisi TLRI yang berada di bawah pengaruh FDR juga dihapus, divisi tersebut kemudian dilebur ke dalam Angkatan Darat dijadikan sebagai Infantri (pasukan jalan kaki).⁹ Dalam pelaksanaan program Rera disebut juga bahwa pemerintah akan melakukan pengurangan jumlah anggota angkatan perang. Adanya pengurangan tersebut memberikan arti bahwa akan dilakukan seleksi terhadap para anggota angkatan perang, guna menentukan keanggotaan dalam angkatan perang. Seleksi ini dilakukan atas dasar kecakapan dan kondisi fisik misalnya tinggi badan.

Para calon anggota baru angkatan perang juga diseleksi berdasarkan sikap dan mentalitas yang mereka miliki. Sikap setia terhadap negara dan tidak memiliki mentalitas pemberontak. Seleksi ini juga diterapkan pada bekas anggota pasukan FDR, untuk dipilih mana yang masih setia dan mana yang tidak dapat lagi dipercaya. Karena tidak semua pasukan dari FDR setia mutlak terhadap FDR. Hal ini dapat diketahui dari program FDR yang berbunyi jika kita dipaksa mengirimkan pasukan ke medan perang oleh pemerintah, maka akan kita kirimkan pasukan-pasukan yang belum kita percaya betul.¹⁰

⁹ Himawan Soetanto, *op.cit*, hlm. 67.

¹⁰ Pinardi, *op.cit*, hlm. 34.

Dalam melakukan proses pembersihan atau penyehatan dijalankan secara hati-hati oleh pemerintah. Pada tahap awalnya Rera tidak langsung ditujukan ke dalam potensi militer golongan kiri. Sebelum program tersebut diarahkan ke potensi militer golongan kiri, pemerintah terlebih dahulu melaksanakan Rera pada kesatuan lain yang dipandang tidak begitu mengandung resiko dan berbahaya. Sebagai contohnya Divisi V, dalam divisi ini pengaruh golongan kiri tidak terlalu kuat. Setelah itu Rera diarahkan pada Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI) pimpinan Bung Tomo. Dalam melaksanakan Rera pada BPRI pemerintah terpaksa menggunakan kekerasan senjata, karena BPRI menolak untuk dilucuti senjatanya dan tidak mau didemobilisasikan. Hal ini menunjukkan bahwa Rera tidak hanya ditujukan pada laskar golongan kiri.

Setelah Rera pada laskar yang bertaraf kecil selesai dilakukan, pemerintah mulai mengarahkan Rera pada tubuh Divisi IV Panembahan Senopati. Dalam Tubuh Divisi Panembahan Senopati ini tergabung pasukan dari Pesindo dan Pasukan Tentara Laut yang berada di bawah pengaruh FDR. Oleh karena divisi ini dipandang sebagai tempat berkumpulnya unsur-unsur yang menentang program pemerintah maka hal ini menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengarahkan Rera pada divisi ini.

Semula pemerintah mengalami kelancaran dalam melaksanakan Rera. Akan tetapi ketika program Rera ditujukan kepada Divisi IV Panembahan Senopati yang di dalamnya tergabung Pesindo sebagai kekuatan inti dari potensi militer FDR, pemerintah mendapatkan kendala. Kendala ini muncul karena Divisi IV Panembahan Senopati menolak program Rera. Penolakan ini terjadi karena divisi tersebut

mendapat dukungan dari FDR. Permasalahan ini ditindak lanjuti oleh pemerintah dengan mengadakan kompromi dengan Divisi IV. Sebagai hasil dari kompromi dengan pemerintah akhirnya divisi ini diubah menjadi KPPS dengan pimpinan Kolonel Sutarto. Tidak diketahui alasannya mengapa pemerintah memilih mengambil keputusan untuk merubah divisi ini menjadi KPPS dari pada memaksakan Rera seperti yang terjadi pada BPRI. Diubahnya Divisi IV Panembahan Senopati menjadi KPPS menandakan bahwa Rera gagal dilaksanakan dalam divisi tersebut. Dalam hal ini Pesindo juga tidak berhasil di hapus oleh pemerintah.

B. Usaha-usaha Bung Hatta Dalam Menghadapi Pemberontakan PKI di Madiun 1948

Pada tanggal 10 Agustus 1948 Muso yang sejak tahun 1935 berada di Moskow, tiba di Yogyakarta. Kedatangan Muso di Yogyakarta cepat diterima dan mendapat sambutan yang antusias dari kaum komunis di Indonesia. Mengingat golongan kiri saat itu sedang menghadapi rintangan yang begitu berat dari pemerintah Hatta, dalam upaya merebut kembali kursi pemerintahan yang telah lepas dari tangan mereka. Kedatangan Muso dianggap sebagai datangnya seorang pemimpin kaliber internasional yang sangat dibutuhkan untuk meneruskan perjuangan mereka. Hingga pada akhirnya nanti Muso mampu menggeser posisi Amir Sjarifuddin.

Setibanya di Yogyakarta langkah pertama yang diambil oleh Muso adalah mengeser posisi Amir Sjarifuddin dalam front komunis. Upaya yang dilakukan oleh Muso untuk merealisasikan hal tersebut adalah pertama, yaitu dengan menganjurkan agar semua organisasi yang tergabung dalam FDR untuk meleburkan diri ke dalam PKI. Selanjutnya Muso melakukan koreksi terhadap gerakan revolusi komunis di

Indonesia. Koreksi tersebut dikenal dengan sebutan “Koreksi Besar” atau “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”. Adapun inti dari koreksi Muso terhadap gerakan revolusi komunis di Indonesia adalah sebagai berikut :¹¹

1. Organisasi kepartaian komunis di Indonesia seharusnya sejak proklamasi kemerdekaan tidak lagi bersifat illegal melainkan harus segera tampil sebagai Partai Komunis Indonesia yang harus memimpin dan menjalankan revolusi Indonesia. Intinya harus memegang hegemoni dalam pimpinan revolusi rakyat Indonesia.
2. Penandatanganan Persetujuan Renville merupakan kesalahan besar yang mencelakakan RI.
3. Kabinet Amir Sjarifuddin melakukan kesalahan dengan mengundurkan diri secara sukarela tanpa melakukan perlawanan dan melupakan bahwa pokok dari setiap revolusi adalah kekuasaan negara.

Dari koreksi Muso di atas khususnya pada poin 1 dan 3 dapat disimpulkan bahwa PKI harus selalu menjadi partai yang memegang kendali dalam memimpin revolusi rakyat Indonesia. Selain itu kekuasaan negara harus selalu berada di tangan PKI. Dengan demikian apapun yang terjadi dan bagaimanapun caranya termasuk melalui pemberontakan, PKI harus selalu berada di atas sebagai pemegang kekuasaan negara.

Koreksi Muso ternyata mendapatkan sambutan yang baik dari organisasi-organisasi golongan kiri, dan banyak pengakuan dan pernyataan bersalah dari organisasi-organisasi golongan kiri kepada Muso. Seiring dengan pernyataan bersalah juga diikuti dengan pernyataan meleburkan diri ke dalam PKI dari partai-

¹¹ *Ibid.* hlm. 43.

partai politik dan organisasi massa yang tergabung dalam FDR, misalnya Partai Buruh yang meleburkan diri ke dalam PKI disampaikan pada tanggal 27 Agustus 1948.¹² Disusul kemudian oleh Partai Sosialis Amir Sjarifuddin pada tanggal 29 Agustus 1948, sehingga akhirnya FDR bubar.¹³ Pada tanggal 2 September 1948 PKI di bawah pimpinan Muso telah tersusun, yang terdiri dari partai-partai politik dan organisasi massa yang dahulu sebagai pendukung dari FDR yaitu PKI, Partai Sosialis Amir Sjarifuddin, dan organisasi massa seperti SOBSI, BTI, dan Pesindo. Pesindo yang semula menjadi kekuatan pertahanan FDR beralih menjadi pasukan bersenjata resmi PKI Muso. Jadi sebelum kerusuhan di Solo menguat dari tanggal 13 sampai 17 September 1948 PKI Muso telah tersusun.

Berdasarkan konferensi PKI tanggal 27 sampai dengan 28 Agustus 1948 komposisi PKI Muso (Susunan Politbiro PKI) telah tersusun, dan susunan tersebut diumumkan pada tanggal 1 September 1948 sebagai berikut:¹⁴

Sekretaris Jendral	: Muso, Maruto Darusman, Tan Ling Djie, Ngadiman
Sekretaris Buruh	: A. Tjokronegoro, D.N. Aidit, Sutrisno
Sekretaris Pemuda	: Wikana, Soeripno
Sekretaris Wanita	: (Sementara di bawah Sekretaris Jendral)
Sekretaris Pertahanan	: Amir Sjarifuddin
Propaganda Agitasi	: Lukman, Alimin, Sardjono
Sekretaris Organisasi	: Sudisman

¹² *Ibid*, hlm. 44.

¹³ *Idem*

¹⁴ Soe Hok Gie, *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan Kisah Pemberontakan Madiun September 1948*, Yogyakarta, Bentang Budaya, 1997, hlm. 221.

Sekretaris Hubungan Luar Negeri	: Soeripno
Sekretaris Urusan Perwakilan	: Nyoto
Sekretaris Urusan Kader	: (Sementara di bawah Sekretaris Jendral)
Urusan Daerah Pendudukan	: (Sementara di bawah Sekretaris Jendral)
Sekretaris Keuangan	: Ruskak

Setelah terbentuknya susunan PKI yang baru, dalam meneruskan perjuangannya untuk merebut kursi pemerintahan, Muso mencoba menempuh beberapa jalur parlementer. Adapun upaya tersebut adalah pertama, mengadakan kampanye untuk mendapatkan dukungan guna menjatuhkan Kabinet Hatta. Kampanye ini dilakukan di beberapa tempat di daerah RI yaitu di Yogyakarta (3 September 1948), Surakarta (7 September 1948), Madiun (8 September 1948), Kediri (10 September 1948), Jombang (13 September 1948), Bojonegoro (14 September 1948), dan Cepu (16 September 1948). Kedua, dengan menempatkan perwakilannya di BPKNP, namun jumlahnya belum cukup untuk memenangkan suara secara mayoritas untuk mendapatkan kekuasaan politik. Ketiga, mengupayakan terbentuknya suatu Front Nasional. Tetapi upaya ini juga mengalami kegagalan sebagai akibat gagalnya PKI Muso untuk mengajak Masyumi dan PNI dalam membentuk Front Nasional. Hal ini semakin meyakinkan PKI Muso bahwa jalan untuk mendapatkan kekuasaan melalui jalan parlementer sudah tidak ada harapan lagi.

Pada tanggal 18 September 1948, hari Sabtu pukul 02:00 pagi PKI Muso menjalankan aksi pemberontakannya di Madiun. Pemberontakan ini dilakukan pada saat puncak kerusuhan di Solo terjadi. Pasukan pemberontak ketika itu dipimpin oleh

Soemarsono. Menurut kesaksian Soemarsono sebelum aksi pemberontakan ini terjadi ia terlebih dahulu meminta instruksi dari Muso dan Amir Sjarifuddin. Ketika itu kedua tokoh PKI tersebut sedang mengadakan kampanye di Kediri, sehingga Soemarsono menyusul rombongan Muso ke Kediri.¹⁵

Menurut Soemarsono kedatangannya ke Kediri untuk menemui Muso, berkaitan dengan adanya desakan dari para komandan-komandan bekas batalyon Pesindo di Madiun kepada Soemarsono untuk melucuti pasukan gelap. Keberadaan pasukan gelap yang tidak diketahui identitasnya di Madiun telah melakukan penculikan terhadap pimpinan Serikat Buruh Dalam Negeri. Identitas pasukan gelap itu sendiri sampai sekarang masih menjadi suatu misteri. Terlepas dari semua itu aksi pasukan gelap ini dipandang oleh PKI dapat mengancam eksistensi mereka di Madiun. Sementara Soemarsono tidak memiliki wewenang untuk mengambil tindakan, seperti yang didesakkan oleh para bekas komandan batalyon Pesindo. Oleh karena itu sebelum Soemarsono melucuti pasukan gelap termasuk polisi dan CPM, ia memutuskan untuk menyusul Muso ke Kediri karena Muso merupakan pimpinan tertinggi partai yang berhak memutuskan segala sesuatunya.

Di Kediri Soemarsono melakukan diskusi dengan Muso dan Amir Sjarifuddin, yang akhirnya Muso dan Amir Sjarifuddin mengambil keputusan untuk bertindak yang berarti lucuti saja.¹⁶ Dalam pengertian lucuti saja pasukan gelap dan pasukan pemerintah. Soemarsono juga menegaskan bahwa peristiwa Madiun itu terjadi atas perintah Muso dan sudah diputuskan benar-benar oleh Muso dan Amir Sjarifuddin.¹⁷

¹⁵ Hersri Setiawan, *Negara Madiun Kesaksian Soemarsono Pelaku Perjuangan*, Jakarta, FuSPAD, 2002, hlm. 91.

¹⁶ *Idem*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 113.

Dalam peristiwa Madiun ini Soemarsono hanya bertindak sebagai pelaksana lapangan dalam melakukan pemberontakan atas perintah Muso. Sekembalinya Soemarsono dari Kediri aksi pemberontakan dimulai. Menurut Soemarsono pasukan yang ia siapkan dalam peristiwa Madiun adalah pasukan bekas Pesindo dan Batalyon TNI Brigade 29 dengan Komandan Brigade Kolonel Dachlan, sedangkan komandan batalyon ada Mayor Abdulrahman, Mayor Mustofa, dan Mayor Pajang.¹⁸

Pada tanggal 18 September 1948 setelah pasukan pimpinan Soemarsono melakukan perlucutan dan penangkapan terhadap pasukan gelap dan pasukan bersenjata pemerintah, PKI menduduki gedung-gedung pemerintah, Markas Komando Pertahanan Jawa Timur, Markas STC (Sub Teritorial Command), CPM (Corp Polisi Militer), Kantor-kantor Polisi, Bank-bank, Kantor Pos dan Kantor Telpon.¹⁹ Keberhasilan ini diikuti dengan pidato Soemarsono pada Radio Gelora Pemuda pada tanggal 18 September 1948 pukul 10:00 pagi. Pidato tersebut secara lengkap kurang lebih berbunyi:

“...Kita khawatir, bahwa pemerintah kita menjadi fasistis militeristis, yaitu karena kekuasaan dipegang oleh satu orang, yang menjadi Wakil Presiden, Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Mereka adalah pengkhianat-pengkhianat negeri, yang telah menyerahkan puluhan juta teman-teman setanah air kepada Jepang yang kejam sebagai romusha-romusha. Persatuan adalah sangat perlu, tetapi tidak boleh mengakibatkan perbudakan. Kita bertanya, apakah tadinya tidak diadakan perundingan antara Pemerintah Yogya dengan Belanda tentang pembasmian sayap kiri.

Kita Sekarang mengetahui, bahwa Belanda bekerja sama dengan Pemerintah Republik untuk menjajah rakyat. Fasis dan kooperator Hatta kini mencoba mempergunakan Republik untuk menjajah kaum buruh dan kaum petani.

Madiun telah bangun untuk membasmi semua musuh revolusi: Polisi, Polisi Tentara, dan Tentara telah dilucuti senjatanya oleh rakyat. Kaum buruh dan kaum tani telah membentuk suatu pemerintahan baru. Senjata kita akan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 94.

¹⁹ Himawan Soetanto, *Perintah Presiden Soekarno Rebut Kembali Madiun*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 144.

dipergunakan terus sehingga seluruh Indonesia telah dimerdekakan. Saat untuk revolusi telah tiba...²⁰

Dari pidato Soemarsono tersebut dapat diambil intinya bahwa PKI berniat membentuk pemerintahan baru di Madiun. Hal ini secara tidak langsung mengandung arti bahwa PKI menyatakan lepas dari Republik Indonesia pimpinan Sukarno-Hatta. Menurut perkiraan Soemarsono dua hari setelah prebutan kekuasaan di Madiun terjadi, Muso, Amir Sjarufuddin, dan rombongannya kembali ke Madiun. Setelah pemerintah Republik Indonesia di Madiun ditumbangkan, PKI mencoba untuk membentuk pemerintahan baru atas dasar ide Muso tentang Front Nasional. Menurut mereka pemerintahan ini pasti kokoh karena berakar dalam masyarakat. Pada tanggal 19 September 1948 pagi hari Front Nasional dibentuk. Keanggotaan Front Nasional dikumpulkan baik secara sukarela, setengah dipaksa dan paksaan.²¹ Susunan pemerintah Front Nasional yang dibentuk di Madiun tersebut adalah sebagai berikut:²²

- a. Residen Madiun : Abdulmutalib
- b. Gubernur Militer : Soemarsono
- c. Komandan Militer : Kol. Djoko Soedjono
- d. Komandan Militer Kota : May. Mustofa

Muso yang dikatakan berada di luar kota Madiun baru tiba di Madiun pada tanggal 19 September 1948 pagi hari. Di Madiun Muso mendapatkan kenyataan bahwa pemerintah Front Nasional telah terbentuk. Akan tetapi kondisi diluar dugaan PKI, keluar ia harus menghadapi Pemerintah RI yang kali ini bersikap tegas dan

²⁰ *Ibid*, hlm. 163. Lihat juga halaman 144-145.

²¹ Soe Hok Gie, *op.cit*, hlm.236

²² *Idem*

tidak mau ditawar-tawar lagi, sedangkan ke dalam ia menghadapi sikap pemuda atau pelajar yang tidak mau membantunya begitu juga dengan rakyat yang sedikit sekali membantunya.²³

Hilangnya atau berkurangnya simpati dan dukungan dari sebagian rakyat kepada PKI ini, merupakan dampak dari tindakan-tindakan teror dan indiscipliner kesatuan bersenjata PKI terhadap rakyat.²⁴ Sebagai contohnya adalah pengumpulan anggota Front Nasional yang dipaksakan atau setengah dipaksa. Contoh yang lain yaitu tindakan penyerbuan pada tanggal 22 September 1948 terhadap markas TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar) di Madiun. Seorang pelajar bernama Mulyadi ditembak dan ditusuk dengan sangkur hingga tewas dalam penyerbuan tersebut. TRIP sendiri merupakan organisasi bersenjata yang tidak mempunyai warna dan tentunya bersikap netral atas pertentangan yang ada di antara partai politik. “Sejak semula pendirian mereka hanya satu: berjuang untuk menegakkan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.”²⁵ Suatu kelompok yang tidak mau terlibat dalam konflik menjadi korban konflik tentunya akan memunculkan suatu kekecewaan tersendiri. Tindakan pembunuhan terhadap pelajar tersebut justru memunculkan sikap anti dan rasa benci kepada PKI dari kalangan pelajar.

Menyikapi hal tersebut, PKI melalui Residen Madiun Abdulmutalib mencoba merebut simpati pelajar dengan program penghapusan uang sekolah SR (setera dengan SMP). Gedung eks-CPM akan dikembalikan kepada pelajar untuk universitas. Hal ini ternyata tidak mendapat tanggapan yang positif dari para pelajar.

²³ *Ibid*, hlm. 238.

²⁴ Pinardi, *op.cit*, hlm. 170.

²⁵ *Ibid*, hlm. 97.

Untuk lebih memikat, pemerintahan Front Nasional menghapus pajak upah. Upaya ini tepat saja tidak berhasil. Para pelajar tetap anti PKI, dan anti pemerintahan Front Nasional.

Garis keras yang ditempuh PKI di Madiun ditanggapi dengan keras juga oleh pemerintah yang tercermin melalui pidato Presiden Soekarno pada tanggal 19 September 1948 malam. Berikut ini adalah sebagian dari pidato yang dimaksud di atas yang berbunyi:

“Atas nama perjuangan untuk Indonesia merdeka aku berseru padamu: Pada saat begini genting, di mana engkau dan kita sekalian mengalami percobaan yang sebesar-besarnya dalam menentukan nasib kita sendiri dan adalah memilih antara dua: Ikut Muso dengan PKInya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia merdeka, atau ikut Soekarno-Hatta yang insya Allah dengan bantuan Tuhan, akan memimpin negara Republik Indonesia yang merdeka, tidak dijajah oleh Negara apapun juga.”²⁶

Pidato presiden ini kemudian diikuti oleh pidato Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Sultan dalam pidatonya menyerukan agar rakyat membantu presiden dan wakil presiden.²⁷ Pidato ini tentu memiliki andil yang besar atas keberhasilan pemerintah dalam mengatasi peristiwa Madiun, mengingat Sultan memiliki pengaruh yang sangat luas di kalangan masyarakat Jawa.

Tanggapan pemerintah dibalas oleh Muso dengan mengobarkan emosi rakyat untuk anti pada pemerintah Soekarno-Hatta melalui pidato pertamanya. Pidato ini disampaikan melalui stasiun pemancar radio Gelora Pemuda di Madiun pada tanggal 19 September 1948, hari yang sama setelah presiden berpidato. Berikut ini adalah sebagian dari kutipan pidato Muso :

²⁶ Soe Hok Gie, *op.cit*, hlm. 239.

²⁷ *Idem*

“ Pada tanggal 18 September 1948 rakyat daerah Madiun telah memegang kekuasaan negara dalam tangannya sendiri. Dengan begitu rakyat Madiun telah melaksanakan kewajiban revolusi nasional kita ini, bahwa ia seharusnya dipimpin oleh rakyat sendiri dan bukan oleh kelas yang lain...

...Oleh karena itu, rakyat Madiun dan juga di daerah-daerah lain sekarang akan melepaskan diri dari budak imperialis itu. Soekarno dalam membudak Jepang telah bilang “Untuk Inggris: linggis; untuk Amerika: setrika”. Rakyat belum lupa ini. Bukan Soekarno, bukan Hatta yang melawan Belanda, Inggris dan Amerika sekarang ini, tetapi rakyat Indonesia sendiri.

Berhubung dengan itu kejadian di Madiun dan lain-lain tempat untuk seluruh rakyat adalah sinyal untuk merebut kekuasaan negara dalam tangannya sendiri. Inilah jaminan satu-satunya, bahwa republik kita akan berdaulat benar-benar dan cakap menghadapi serangan-serangan dari luar dan untuk selamanya melepaskan dari bujang-bujang imperialisme itu.

Rakyat seharusnya menjawab: ‘Soekarno-Hatta, budak-budak Jepang dan Amerika. memang *ciri wanci lalai ginowo mati*’. Pasti rakyat akan jawab: ‘Musso selamanya menghamba rakyat Indonesia. Hidup, merdeka, Menang Perang.’²⁸

Kutipan di atas menunjukkan bahwa tindakan PKI di Madiun dimaksudkan untuk melepaskan diri dari pemerintah Soekarno-Hatta dan memberikan seruan kepada seluruh rakyat untuk ikut memberontak. Pada tanggal 21 September 1948 Muso mencoba sekali lagi untuk menyerukan perlawanan terhadap pemerintah. Isi dari seruan tersebut antaralain kaum buruh harus dianjurkan mogok umum dan kaum tani, pemuda, wanita dan prajurit progresif dan anti imperialis di haruskan mengangkat senjata melawan Soekarno-Hatta.²⁹ Seruan tersebut ternyata hanya bergema di Madiun dan Pati.

Berdasarkan aksi-aksi PKI di Madiun, termasuk pernyataan-pernyataan PKI melepaskan diri dari pemerintah dan seruan-seruan kepada rakyat untuk mengangkat senjata melawan pemerintah maka, Hatta memutuskan untuk mengambil tindakan

²⁸ A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 8 Pemberontakan PKI 1948*, Bandung, DISJERAH-AD, Angkasa, 1979, hlm. 241.

²⁹ Soe Hok Gie, *op.cit*, hlm. 242.

tegas dalam mengatasinya. Adapun usaha-usaha yang ditempuh oleh Bung Hatta dalam menumpas pemberontakan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Sebagai Perdana Menteri

a. Mengadakan Sidang Kabinet untuk Menentukan Sikap Pemerintah Terhadap PKI

Berita terjadinya perebutan kekuasaan oleh PKI di Madiun sampai ke pemerintah pusat RI di Yogyakarta pada sore hari tanggal 18 September 1948. Pada hari itu juga Bung Hatta memutuskan untuk mengadakan sidang kabinet dalam rangka menentukan sikap pemerintah terhadap tindakan PKI yang melakukan perebutan kekuasaan di Madiun. Sidang belum dapat langsung dijalankan karena menunggu seluruh anggota kabinet hadir. Sebelum sidang dimulai Presiden Sukarno memanggil A.H. Nasution untuk datang ke istana. Waktu itu A.H. Nasution dijemput oleh Menteri Ali Sastroamijoyo. Oleh karena Panglima Besar Sudirman masih berada di Magelang, presiden kemudian menugaskan A.H. Nasution untuk membuat konsep tindakan dalam menghadapi PKI.

Konsep tersebut dapat segera disusun oleh A.H. Nasution. Inti dari konsep tersebut adalah “Perintah untuk bertindak kepada APRI, menyelamatkan pemerintah menindak pemberontak dan menangkap tokoh-tokohnya, membubarkan organisasi-organisasi pendukung atau simpatisan-simpatisannya”.³⁰ Konsep ini setelah diperiksa oleh presiden dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, presiden menyetujui konsep tersebut. Konsep ini akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam sidang Kabinet Hatta.

³⁰ Himawan Soetanto, *op.cit*, hlm. 166.

Sekitar tengah malam sidang baru dapat dimulai. Pada waktu itu para menteri sudah hadir semua, begitu juga dengan Panglima Besar Sudirman. Dengan demikian sidang kabinet dapat dimulai. “Rapat dipimpin oleh Mohammad Hatta dan Sekretaris Negara membacakan konsep tadi”.³¹ Konsep yang dimaksud adalah konsep yang disusun oleh A.H. Nasution atas perintah presiden. “Kabinet menyetujuinya, langsung ditandatangani oleh presiden dan disampaikan kepada Panglima Besar Sudirman untuk dilaksanakan”.³² Diakhir sidang, Kabinet Hatta mengambil keputusan bahwa:

“Peristiwa di Madiun ini yang digerakan oleh PKI\FDR adalah suatu pemberontakan terhadap pemerintah; memerintahkan Angkatan Perang berserta alat-alat negara lainnya untuk memulihkan kekuasaan negara kepada keadaan biasa, memberikan kepada Djendral Soedirman dengan kuasa penuh untuk melakukan tugas pemulihan keamanan/ketertiban kepada keadaan biasa di Madiun dan daerah-daerah lainnya, dan membasmi organisasi-organisasi massa dan organisasi militer/bersenjata yang turut/mendukung/bersimpati terhadap kaum pemberontak PKI/Moeso”.³³

Berdasarkan keputusan sidang kabinet di atas, militer dipersiapkan untuk bertindak dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun sesuai dengan instruksi pemerintah di bawah pimpinan Bung Hatta.

b. Mengusulkan Undang-undang Tentang Pemberian Kekuasaan Penuh Kepada Presiden Dalam Keadaan Bahaya

Dalam sidang kabinet yang diadakan pada tanggal 18 September 1948 tengah malam, pemerintah telah menentukan sikap terhadap tindakan PKI Muso di Madiun

³¹ Suwarno, P.J., *Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia 1945-1966*, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2004, hlm. 12.

³² *Idem*

³³ Himawan Soetanto, *op.cit*, hlm. 166.

sebagai suatu pemberontakan. Dengan keputusan tersebut pemerintah memutuskan menggunakan kekuatan militer untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Supaya tindakan militer yang dilakukan pemerintah memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya, maka Bung Hatta mengusulkan sebuah undang-undang yang memberikan kekuasaan penuh kepada presiden dalam keadaan bahaya kepada BPKNP.³⁴

Usul ini diajukan di depan sidang istimewa BPKNP pada tanggal 20 September 1948. Undang-undang yang diusulkan oleh Bung Hatta tersebut terdiri dari satu pasal yang berbunyi :

“Selama tiga bulan terhitung mulai tanggal 15 September 1948 kepada Presiden diberikan kekuasaan penuh (*plein pouvoir*) untuk menjalankan tindakan-tindakan dan mengadakan peraturan-peraturan, dengan menyimpang dari Undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada, *guna menjamin keselamatan negara* dalam menghadapi keadaan bahaya yang memuncak”.³⁵

Undang-undang ini ditetapkan di Yogyakarta tanggal 20 September 1948. Setelah mempelajari undang-undang tersebut akhirnya BPKNP menyetujui undang-undang yang diusulkan Bung Hatta pada tanggal itu juga. Setelah Undang-undang pemberian kekuasaan penuh kepada presiden disahkan, pemerintah mengerahkan TNI untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun.³⁶ Dengan demikian tidak ada lagi keraguan bagi militer dalam menjalankan tugasnya, karena militer telah mendapatkan pegangan dalam menjalankan tugasnya. Diterima dan disahkannya undang-undang tersebut oleh BPKNP, juga mengandung arti bahwa rakyat

³⁵ Wangsa Widjaja, I., Meutia F. Swasono, *Mohammad Hatta Kumpulan Pidato Dari tahun 1942-1949*, Jakarta, Sinar Harapan-Universitas Indonesia, 1981, hlm. 267.

³⁶ Wangsa Widjaja, I., *Mengenang Bung Hatta*, Jakarta, CV Haji Masagung, 1988, hlm. 61.

menyetujui tindakan yang diambil pemerintah. Mengingat BPKNP adalah lembaga pemerintahan yang juga mewakili suara rakyat dalam pemerintahan.

2. Sebagai Menteri Pertahanan

Seperti telah diketahui bahwa dalam kabinetnya, Bung Hatta memegang jabatan rangkap di samping ia menjadi seorang perdana menteri, ia juga sebagai seorang menteri pertahanan. Jabatan rangkap ini dirangkap oleh Bung Hatta sebagai akibat Sri Sultan Hamengku Buwono ke-IX yang ditunjuk untuk memangku jabatan menteri pertahanan, menyatakan tidak mampu untuk memangku jabatan tersebut. Sultan Hamengku Buwono IX mengatakan kepada Bung Hatta, bahwa ia tidak sanggup mengatasi TNI.³⁷ Sementara itu kabinet harus dibentuk secepatnya untuk mengatasi krisis kabinet dan untuk menyelesaikan persoalan Persetujuan Renville dengan pihak Belanda. Oleh karena itu Bung Hatta merangkap jabatan menteri pertahanan.

Berbicara tentang peranan Bung Hatta sebagai menteri pertahanan dalam menghadapi peristiwa Madiun 1948 bukan merupakan hal yang mudah untuk menyampaikan dan menjelaskannya. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber dan kebanyakan sumber-sumber yang ada tidak menjelaskan tentang peristiwa Madiun 1948 secara mendetail, khususnya dalam hal ini berkaitan dengan usaha-usaha Bung Hatta dalam mengatasi peristiwa tersebut sebagai seorang menteri pertahanan. Akan tetapi penulis akan mencoba untuk menjelaskan dan menyampaikannya semaksimal mungkin.

³⁷ Mohammad Hatta, *Mohammad Hatta Memoir*, Jakarta, Tintamas Indonesia, 1979, hlm.526.

Berdasarkan Undang-undang no 3 tahun 1948, menteri pertahanan memiliki kekuasaan yang cukup besar atas angkatan perang,³⁸ bahkan lebih tinggi dari Panglima Besar Jendral Soedirman. Hal ini dikarenakan posisi Panglima Besar Jendral Soedirman berada langsung di bawah menteri pertahanan.³⁹ Panglima besar Jendral Soedirman sendiri membawahi Kepala Staf Angkatan Perang yang dijabat oleh Soerjadarma.

Dengan kekuasaannya sebagai seorang menteri pertahanan Bung Hatta menugaskan pasukan Divisi Siliwangi untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun.⁴⁰ Hatta mengambil tindakan tegas dengan kekerasan militer atas pertimbangan bahwa jika pemerintah tidak bertindak dengan cepat, maka Belanda akan melakukan intervensi atas penumpasan pemberontakan tersebut.⁴¹ Hal ini berarti akan membuka jalan bagi Belanda untuk dapat memasuki wilayah Republik Indonesia. Andai kata Belanda waktu itu ikut mengatasi pemberontakan PKI Madiun tentunya di mata Amerika Serikat, Belanda memiliki nilai plus tersendiri. Hal tersebut mengandung arti bahwa Belanda akan mendapat dukungan yang lebih dari Amerika Serikat.

Bung Hatta selaku menteri pertahanan menyerahkan tugas untuk menyusun siasat militer dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun kepada Panglima Besar Soedirman. Sebenarnya berdasarkan undang-undang no.3 tahun 1948 Bung

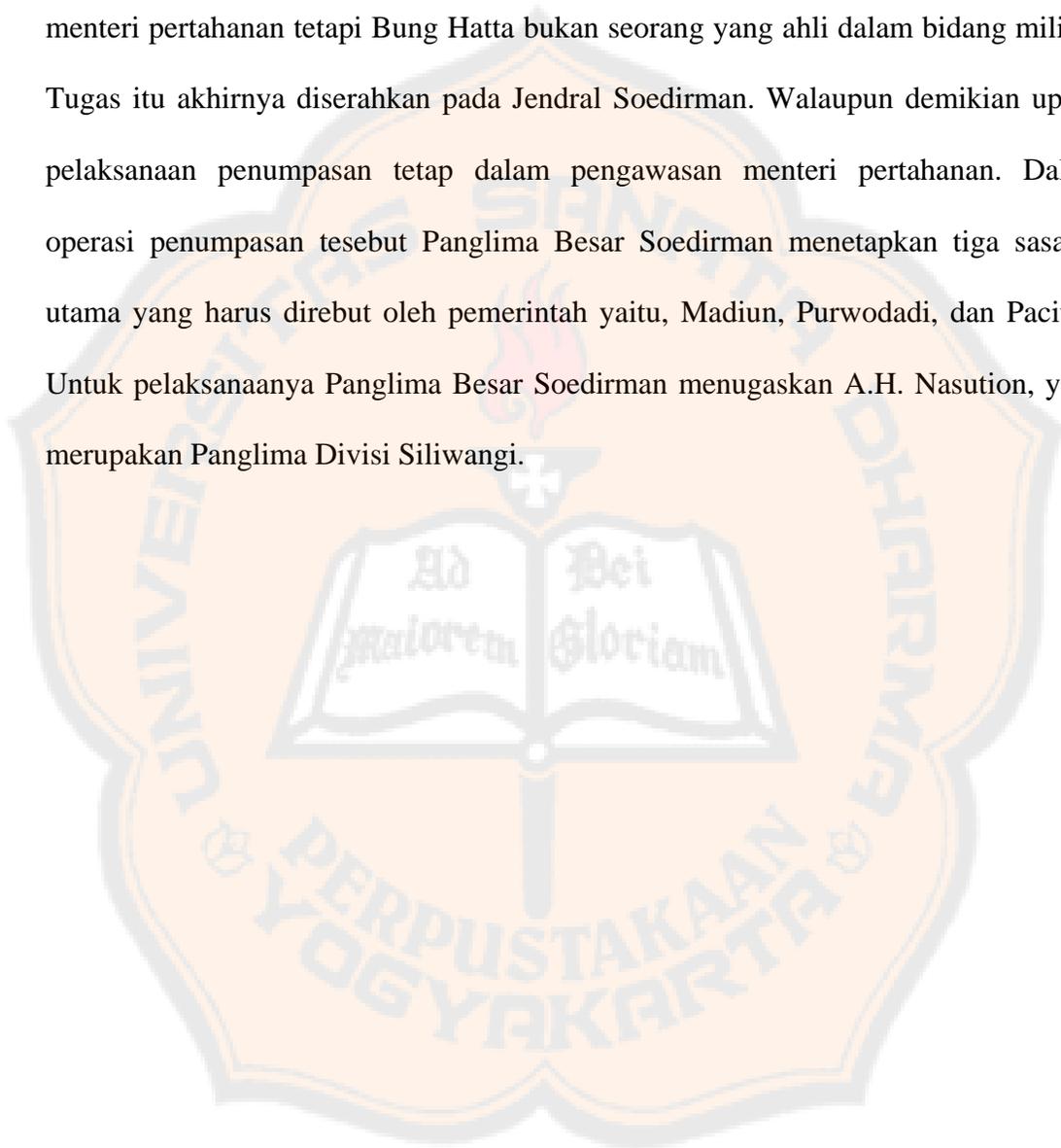
³⁸Isi dari undang-undang no 3 tahun 1948 tersebut adalah sebagai berikut: angkatan perang ditempatkan di bawah kekuasaan menteri pertahanan, menteri pertahanan bertanggung jawab penuh dibidang organisasi, administrasi, perlengkapan persenjataan, kualitas seluruh perang, politik pertahanan dan siasat militer. Lihat Pinardi, *Peristiwa Coup Berdarah P.K.I September 1948 di Madiun*, Jakarta, INKOPAK-HAZERA, 1967, hlm. 24.

³⁹ Himawan Soetanto, *op.cit*, hlm. 66.

⁴⁰ Rose Mavis, *Indonesia Merdeka Biografi Politik Mohammad Hatta*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1991. hlm. 257.

⁴¹ Himawan Soetanto, *op.cit*, hlm. 170.

Hatta memiliki kekuasaan untuk menentukan siasat militer dalam menghadapi pemberontakan tersebut, akan tetapi tugas tersebut justru diserahkan kepada Panglima Besar Soedirman. Hal ini adalah suatu hal yang wajar, meskipun ia seorang menteri pertahanan tetapi Bung Hatta bukan seorang yang ahli dalam bidang militer. Tugas itu akhirnya diserahkan pada Jendral Soedirman. Walaupun demikian upaya pelaksanaan penumpasan tetap dalam pengawasan menteri pertahanan. Dalam operasi penumpasan tersebut Panglima Besar Soedirman menetapkan tiga sasaran utama yang harus direbut oleh pemerintah yaitu, Madiun, Purwodadi, dan Pacitan. Untuk pelaksanaannya Panglima Besar Soedirman menugaskan A.H. Nasution, yang merupakan Panglima Divisi Siliwangi.



**BAB IV
HASIL USAHA BUNG HATTA
DALAM MENGHADAPI PEMBERONTAKAN PKI DI MADIUN 1948**

Pemberontakan PKI pada akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa usaha Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun pada akhirnya berhasil. Perlu diketahui pula bahwa kesuksesan itu tercapai bukan hanya karena Bung Hatta seorang, akan tetapi juga berkat kerjasama dengan para pahlawan nasional kita yang lain antara lain Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia, Panglima Besar Jendral Sudirman, dan TNI. Adapun hasil usaha Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun adalah sebagai berikut.

A. Kembalinya Madiun ke Tangan Pemerintah Republik Indonesia

Sebelum pemerintah mengarahkan operasi militernya ke Madiun, terlebih dahulu pemerintah melakukan tindakan preventif atau pencegahan di ibukota. Di Yogyakarta dilakukan tindakan pembersihan terhadap beberapa unsur-unsur komunis pada tanggal 19 September 1948 tengah malam menjelang tanggal 20 September 1948. Pelaksanaan operasi ini diserahkan kepada Letnan Kolonel Soeharto dan Koesno Oetomo. Pada pagi harinya yaitu tanggal 20 September 1948 perlucutan dan penangkapan-penangkapan kekuatan PKI yang berada di Yogyakarta berhasil dilaksanakan dengan lancar. “Kurang lebih sekitar 200 orang simpatisan-simpatisan PKI maupun tokoh-tokoh PKI antara lain Alimin, Abdoelmadjid, Tan Ling Ji Sakirman, Siauw Giok Tjan berhasil ditangkap”.¹ Pembersihan di Yogyakarta ini

¹ Himawan Soetanto, *Perintah Presiden Soekarno Rebut Kembali Madiun*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 167.

ditujukan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan menjalarnya pemberontakan PKI di Yogyakarta, seperti yang terjadi di Madiun.

Segera setelah Panglima Besar Soedirman mendapatkan perintah dari pemerintah untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun, TNI segera dikerahkan untuk mematahkan kekuatan PKI. Panglima Besar Soedirman memerintahkan A.H. Nasution untuk mempersiapkan dan melaksanakan operasi penumpasan yang telah direncanakan oleh Panglima Besar Soedirman. Pada tanggal 20 September 1948, melalui radio RRI (Radio Republik Indonesia) Yogyakarta Panglima Besar menyampaikan petunjuk kepada Kepala Staf MBAP (Markas Besar Angkatan Perang) mengenai tindakan operasional yang harus dipersiapkan. Pada waktu itu Kolonel Sungkono ditetapkan sebagai Panglima pertahanan Jawa Timur.² Kolonel Gatot Soebroto diberi tanggung jawab untuk menangani daerah Surakarta, Semarang, dalam menjalankan tugasnya ia diberi bantuan dua Brigade Siliwangi, yaitu Brigade Sadikin dan Brigade Koesno Oetomo untuk merebut Purwodadi kemudian Madiun.³

1. Merebut Kembali Kota-kota di Jawa Tengah

Gerakan penumpasan dilakukan oleh TNI yaitu Siliwangi sejalur dengan arah gerak pasukan TNI menuju ke Madiun. Operasi penumpasan di Jawa Tengah dilaksanakan oleh Brigade I Siliwangi yang dipimpin oleh Komandan Brigade Letnan Kolonel Koesno Oetomo. Tugas ini dilaksanakan setelah Brigade I Siliwangi selesai melaksanakan tugas penangkapan dan perlucutan kekuatan PKI di Yogyakarta. Brigade I Siliwangi selanjutnya bergerak menuju ke Solo. Brigade I ini bergerak ke Solo dengan membawa Batalyon Kala Hitam yang dipimpin oleh Mayor

² *Idem*

³ *Idem*

Kemal Idris. Sesampainya di Solo Letnan Kolonel Koesno Oetomo mendapatkan perintah untuk merebut Wonogiri.

Dalam melakukan operasi penumpasan PKI di Wonogiri, Letnan Kolonel Koesno Oetomo menggunakan dua batalyon yaitu Batalyon Suryakencana yang dipimpin oleh Mayor R.A. Kosasih dari Brigade I Siliwangi dan Batalyon Tengkorak di bawah pimpinan Mayor R.A. Nasoehi dari Brigade II Siliwangi yang ditugaskan untuk memperkuat Brigade I Siliwangi. Searah dalam perjalanan ke Madiun Brigade Kolonel Koesno Oetomo berhasil merebut Sukoharjo dari tangan pemberontak. Pasukan PKI yang dihadapi di Sukoharjo adalah kesatuan-kesatuan Batalyon Soedigdo, Batalyon ALRI “Gajah Mada”, dan Batalyon Jadaoe. Wonogiri pada akhirnya berhasil direbut pada tanggal 26 September 1948 oleh Batalyon Nasoehi. Sasaran penting dari Brigade I Siliwangi selanjutnya adalah Purwodadi, Cepu, Blora, Pati, Kudus.

Secara berturut-turut sasaran tersebut berhasil dikuasai oleh Pasukan Brigade I Siliwangi. Tahap pertama, Brigade I Siliwangi menuju ke Purwodadi. Purwodadi dilihat dari letaknya merupakan jalur komunikasi yang strategis untuk menghubungkan Kudus, Pati, Blora, dan Cepu. Tugas untuk merebut Purwodadi oleh Komandan Brigade Kolonel Koesno Oetomo diserahkan pada Mayor Kosasih. Pasukan Mayor Kosasih bergerak ke Purwodadi pada tanggal 4 Oktober 1948. Pada hari berikutnya yaitu tanggal 5 Oktober 1948, Purwodadi sudah berhasil direbut Mayor Kosasih.

Tahap kedua, merebut Cepu. Pada tanggal 4 Oktober 1948 Cepu mendapatkan serangan dari PKI. Batalyon Soedono dari Brigade Ronggolawe yang berkedudukan

di Cepu tidak mampu mengatasi serangan dari PKI. Cepu sendiri memiliki arti ekonomis tersendiri bagi RI, karena Cepu merupakan kota penghasil minyak. Ketika mengetahui Cepu dikuasai PKI, Bung Hatta selaku menteri pertahanan memerintahkan kepada Batalyon Daeng untuk merebut Cepu.⁴ Batalyon Daeng kemudian kembali lagi ke pasukan induknya yaitu Brigade I Siliwangi, yang semula membantu Brigade II Siliwangi. Setelah Batalyon Daeng membantu Batalyon Soedono, Cepu berhasil direbut kembali pada tanggal 8 Oktober 1948.

Tahap ketiga, pada tanggal 13 Oktober 1948 Batalyon Kemal Idris memasuki dan menguasai daerah Blora tanpa perlawanan dari pasukan PKI. Pasukan PKI diduga mundur ke daerah Pati. Tahap keempat, merebut daerah Pati. Pati berhasil dikuasai oleh Batalyon Kemal Idris pada tanggal 21 Oktober 1948. Pati dikuasai dalam keadaan utuh dalam pengertian tidak terjadi pengrusakan dan pembumihangusan oleh PKI. Tahap kelima, Mayor Kosasih merebut Kudus, yang berhasil dikuasai pada tanggal 23 Oktober 1948.

2. Merebut Kembali Madiun dan Sekitarnya (Jawa Timur)

Upaya merebut kembali daerah Jawa Timur khususnya Madiun dari tangan PKI, dibebankan kepada Brigade II Siliwangi di bawah pimpinan Kolonel Sadikin. Brigade II ini terdiri dari tiga Batalyon yaitu Achmad Wiranatakusumah, Sambas Atmadinata, dan Daeng Mohamad. Pada tanggal 22 September 1948 Brigade II Siliwangi mulai bergerak menuju basis penyerangan yaitu Madiun. Satu hari kemudian, yaitu tanggal 22 September 1948 Batalyon Achmad Wiranatakusumah

⁴ *Ibid*, hlm. 225.

tiba di Tawangmangu. Oleh Brigade II, Tawangmangu ditetapkan sebagai pangkalan dalam melakukan penyerangan terhadap pasukan PKI untuk merebut Madiun.

Agar Brigade II Siliwangi dapat memasuki Madiun terlebih dahulu harus merebut Sarangan. Sarangan berhasil dikuasai Batalyon Achmad Wiranantakusumah pada tanggal 24 September 1948 pukul 05.00, tanpa perlawanan yang berarti dari pihak PKI. Setelah Sarangan berhasil dikuasai Batalyon lain yaitu Batalyon Sambas Atmadinata tiba di Sarangan pada hari dan tanggal yang sama. Gerakan selanjutnya diteruskan oleh Batalyon Sambas A. Pada tanggal 25 September 1948 Batalyon Sambas mulai bergerak merebut Plaosan. Menyusul kemudian Batalyon Daeng Mohamad yang bergerak pada tanggal 23 September 1948, Batalyon ini melanjutkan gerakan untuk merebut Magetan dan Maospati. Magetan berhasil direbut oleh Batalyon Daeng Mohamad. Magetan kemudian diserahkan kepada Batalyon Oemar Wirahadikosoemah. Sementara Batalyon Daeng Mohamad melanjutkan gerakan untuk merebut sasaran berikutnya yaitu Maospati.

Di Maospati PKI menduduki bandara pesawat terbang Maospati. Bandara tersebut berhasil dikuasai tanpa mendapat perlawanan dari pihak PKI. Dari operasi di Maospati ini berhasil diketemukan rampasan senjata yang disembunyikan oleh pihak PKI.⁵ Dalam perkembangannya, Madiun sebagai sasaran utama pada tanggal 30 September 1948 pukul 16:45, berhasil dikuasai oleh Mayor Sambas Atmadinata. Kota Madiun ini berhasil direbut tanpa mendapat perlawanan dari pihak PKI. Perlawanan di Madiun tidak ada sebagai akibat pasukan-pasukan PKI telah meninggalkan daerah Madiun. Setelah Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto

⁵ *Ibid*, hlm.190.

menerima berita bahwa Madiun telah berhasil dikuasai kembali, ia mengeluarkan perintah harian untuk operasi-operasi penumpasan selanjutnya. Inti dari perintah harian tersebut adalah sebagai berikut.

“Kepada semua pasukan, yang dari barat, maupun dari timur kami perintahkan”⁶:

1. Supaya sipemberontak dikejar terus.
2. Penyerahan boleh diterima tidak dengan pakai syarat.
3. Tindakan-tindakan khianat, seperti penembakan gelap, penembakan dari belakang dan lain-lain harus dihukum berat.
4. Yang menjalankan sabotase dan bumihangus serta perampokan supaya dihukum dengan hukuman adat pertempuran.

Perintah harian ini dikeluarkan pada tanggal 30 September 1948, pukul 20.00.

Menindak lanjuti perintah harian ini maka Gubernur Militer Gatot Subroto menetapkan Komandan Brigade II Siliwangi Letnan Kolonel Sadikin sebagai Residen Militer untuk daerah Madiun.⁷ Operasi pengejaran para pemberontak terus dijalankan dari bulan September sampai bulan Nopember 1948. Dalam menjalankan operasi pengerjaran dilakukan pembagian daerah operasi antara pasukan-pasukan TNI Jawa Timur Brigade Yonosewoyo dengan pasukan-pasukan dari Siliwangi. Berdasarkan pembagian daerah operasi untuk garis Caruban-Gunung Liman-Gunung Willis ke barat untuk Brigade II Siliwangi dan ke timur untuk Brigade Yonosewoyo dari Jawa Timur.⁸ Dari operasi-operasi pengejaran beberapa kota berhasil direbut seperti Pacitan dan Ponorogo.

⁶ A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 8 Pemberontakan PKI 1948*, Bandung, DISJERAH-AD dan Angkasa, 1979, hlm. 327.

⁷ Himawan Soetanto, *op.cit*, hlm. 196.

⁸ *Ibid*, hlm.198.

B. Tertangkapnya Muso Pimpinan Utama PKI

Setelah pemerintah semakin gencar dalam melaksanakan operasi militernya untuk merebut kembali Madiun dan berhasil merebut daerah-daerah lain yang pernah dikuasai oleh PKI. PKI menyadari bahwa kekuasaannya di Madiun tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga mereka memutuskan untuk mengundurkan diri dari Madiun. Dalam menghindari serangan dan pengejaran dari pasukan TNI, PKI mengundurkan diri ke daerah Dungus (9 km dari Madiun). Pasukan-pasukan PKI yang mengundurkan diri dari Madiun bergerak bersama beberapa tokoh penting PKI. Tokoh PKI yang dimaksud antara lain adalah Amir Sjarifuddin, Jokosuyono, dan Muso.⁹ Mereka dikawal oleh Batalyon-batalyon PKI Mustofa, pimpinan Abdurachman, dan Batalyon Pajang pimpinan Joko Priono.¹⁰

Pasukan PKI yang mengawal tokoh PKI di atas mendapatkan serangan dari Batalyon pimpinan Achmad Wiranatakusumah, serangan tersebut membuat mereka tergeser dari Dungus. Serangan ini juga membuat mereka mundur secara tidak teratur ke selatan. Muso dan Amir Sjarifuddin terpisah setelah mendapatkan serangan dari Batalyon Achmad Wiranatakusumah, Muso bersama pasukannya bergerak ke selatan menuju ke Ponorogo.¹¹

Pada tanggal 8 Oktober 1948 Muso dan pasukannya berusaha merebut Ponorogo. Pasukan yang digunakan untuk merebut Ponorogo adalah Batalyon Maladi Yusuf, Djoko Priono, Abdurachman, dan Mustofa.¹² Di Ponorogo bersama Djokosujono, PKI berusaha mengorganisir rakyat untuk menambah kekuatan tempur

⁹ *Ibid*, hlm. 201.

¹⁰ *Idem*

¹¹ Pinardi, *Peristiwa Coup Berdarah P.K.I September 1948 di Madiun*, Jakarta, INKOPAK-HAZERA, 1967, hlm. 147.

¹² Himawan Soetanto, *op.cit*, hlm. 204.

mereka. Akan tetapi usaha PKI untuk menguasai Ponorogo berhasil dipatahkan oleh TNI. Pasukan PKI dan pimpinan mereka mengundurkan diri ke arah Gunung Gambes. Dalam gerakan mundur ini Muso terpisah dengan pasukan induknya.¹³ Pada tanggal 31 Oktober 1948, dalam pengejaran yang dilakukan oleh pasukan TNI, Muso yang ketika itu melakukan perlawanan tewas tertembak oleh pasukan TNI.

C. Tertangkapnya Amir Sjarifuddin dan Beberapa Tokoh PKI Lainnya

Setelah Muso sebagai pimpinan utama PKI tewas, tinggal beberapa tokoh PKI yang tersisa antara lain Amir Sjarifuddin, Djokosujono, Suripno, Harjono, dan Maruto Darusman. Terhadap tokoh-tokoh tersebut terus dilakukan pengejaran oleh pasukan TNI. Pada tanggal 29 Nopember 1948, Djokosujono dan Maruto Darusman yang terpisah dari pasukan induk pimpinan Amir Sjarifuddin, tertangkap oleh pasukan TNI di Periang (10 km sebelah barat Purwodadai). Dari keterangan Djokosujono diperoleh informasi bahwa pasukan Amir Sjarifuddin sedang berusaha bergerak untuk mengadakan kontak dengan pasukan PKI yang berada di daerah-daerah Rembang, Jepara, dan Pati.¹⁴

Berdasarkan informasi tersebut pasukan TNI mengadakan penghadangan dan pengejaran ke daerah yang diperkirakan akan menjadi tujuan pasukan Amir Sjarifuddin. Interogasi yang dilakukan oleh TNI terhadap Djokosujono tersebut ternyata memberikan hasil yang nyata. Berkat usaha keras TNI laju pasukan Amir Sjarifuddin berhasil dihambat oleh pasukan Kemal Idris. Pada tanggal 31 Nopember 1948 rombongan Amir Sjarifuddin dan pasukannya berhasil ditangkap di desa Klambu (20 km sebelah barat laut Purwodadi). Tokoh PKI yang tertangkap bersama

¹³ *Ibid*, hlm. 205.

¹⁴ Pinardi, *op.cit*, hlm. 152.

Amir Sjarifuddin waktu itu adalah Suripno dan Harjono, beserta 800 orang pasukan inti yang masih bersenjata lengkap.¹⁵

Pada tanggal 4 Desember 1948 Amir Sjarifuddin beserta rombongannya di bawa ke Yogyakarta. Setelah tertangkapnya Amir Sjarifudin dan rombongannya, pemerintah pada tanggal 7 Desember 1948 mengeluarkan pengumuman kepada rakyat bahwa pemberontakan PKI di Madiun telah berhasil ditumpas. Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tentang pemberian kekuasaan penuh kepada presiden yang sifatnya hanya sementara, akhirnya oleh BPKNP undang-undang tersebut dicabut kembali setelah pemberontakan PKI di Madiun berhasil dipadamkan. Sebagai tindakan lebih lanjut tokoh-tokoh PKI yang tertangkap, oleh Pengadilan Militer di desa Ngalihan, kelurahan Lalung, kabupaten Karang Anyar, Surakarta, mereka dijatuhi hukuman mati pada tanggal 19 Desember 1948. Tokoh-tokoh PKI yang dijatuhi hukuman mati antarlain Amir Sjarifuddin, Djokosujono, Suripno, Harjono, dan Maruto Darusman.

¹⁵ *Idem*

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dengan menganalisa dan membandingkan berbagai sumber data yang relevan dengan topik skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis terbukti benar. Adapun hasil dari penelitian yang merupakan jawaban dari setiap permasalahan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari rumusan masalah yang pertama dapat disimpulkan bahwa, latar belakang Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun adalah pertama, pada saat terjadinya pemberontakan, kekuasaan sebagai perdana menteri dan menteri pertahanan berada di tangan Bung Hatta. Dengan demikian menjadi kewajiban dan tanggung jawab Bung Hatta untuk menyelesaikan permasalahan pemberontakan PKI di Madiun, selain itu dengan menjadi perdana menteri dan menteri pertahanan Bung Hatta memiliki wewenang untuk menghadapi pemberontakan tersebut. Kedua, pemberontakan PKI membahayakan kepentingan nasional, dalam pengertian bahwa pemberontakan tersebut hanya akan menghambat dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
2. Dari rumusan masalah yang kedua dapat disimpulkan bahwa, usaha-usaha yang dilakukan oleh Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun. Sebagai seorang perdana menteri yaitu: pertama, mengadakan sidang kabinet untuk menentukan sikap pemerintah terhadap PKI Muso, yang melakukan perampasan kekuasaan di Madiun. Usaha yang kedua adalah dengan mengusulkan

kepada BPKNP sebuah undang-undang tentang pemberian kekuasaan penuh kepada presiden dalam keadaan bahaya, untuk kemudian segera disahkan dan dilaksanakan sampai berhasil. Sedangkan sebagai seorang menteri pertahanan usaha yang dilakukan oleh Bung Hatta yaitu dengan menugaskan pasukan Divisi Siliwangi untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun 1948.

3. Dari rumusan masalah yang ketiga dapat disimpulkan bahwa, hasil usaha Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 1948 berhasil dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut: (1).Kembalinya Madiun ke tangan pemerintah Republik Indonesia (2).Tertangkapnya Muso pimpinan utama PKI, dalam kondisi tidak bernyawa, karena Muso tewas tertembak pasukan TNI ketika ia melakukan perlawanan saat akan ditangkap. (3).Tertangkapnya Amir Sjarifuddin beserta tokoh PKI lainnya, antara lain Djokosujono, Suripno, Harjono, dan Maruto Darusman.

B. Saran

1. Bagi penulis lain yang berminat untuk menulis lebih lanjut berkaitan dengan topik skripsi ini, agar memperhatikan permasalahan yang akan dibahas, mengingat keterbatasan sumber data yang tersedia. Dalam pengertian sesuaikan permasalahan dengan ketersediaan sumber data yang ada dan terjangkau untuk diperoleh, dengan harapan pembahasannya dapat lebih mendalam dan mudah untuk dikerjakan.
2. Penulis menyadari bahwa dalam karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan mengingat sumber data sulit

diperoleh. Oleh karena itu bagi mahasiswa pendidikan sejarah yang menggunakan skripsi ini maupun skripsi-skripsi yang lain sebagai bahan acuan untuk memberikan gambaran dalam rangka menyusun tugas akhir, agar menyikapinya secara kritis dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dari karya tulis ilmiah mahasiswa pendidikan sejarah baik dari segi sistematika penulisan maupun dari segi isi yang terkandung di dalamnya.

3. Bagi Program Studi Pendidikan Sejarah, pembahasan mengenai sejarah PKI masih kurang dalam Prodi Pendidikan Sejarah. Hal ini penulis alami sendiri selama penulis menempuh studi di Prodi Pendidikan Sejarah. Oleh karena itu penulis berharap agar Prodi Pendidikan Sejarah memberikan pembahasan secara mendalam mengenai sejarah yang berkaitan dengan PKI dalam suatu matakuliah. Hal ini sangat penting untuk memberikan dasar yang kuat bagi mahasiswa, mengingat sejarah PKI masih menjadi kontroversi hingga saat ini. Sementara mahasiswa Pendidikan Sejarah adalah calon guru sejarah yang nantinya harus menyampaikan sejarah yang masih menjadi kontroversi tersebut. Jadi dengan penambahan pembahasan yang lebih mendalam berkaitan dengan sejarah PKI, setidaknya dapat memberikan pegangan yang dapat membantu calon guru sejarah untuk mengatasi kesulitan dalam menyampaikan salah satu sejarah yang masih menjadi kontroversi kepada siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- A.H. Nasution. (1979). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 8 Pemberontakan PKI 1948*. Bandung: DISJERAH-AD dan Angkasa.
- Arbi Sanit. (2000). *Badai Revolusi Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Arief Priyadi. (1986). *Wawancara Dengan Sayuti Melik*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- A.S.S. Tambunan. (1991). *MPR Perkembangan dan Pertumbuhannya Suatu Pengamatan dan Analisis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- B.N. Marbun. (2005). *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- C.S.T. Kansil. (1990). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Deliar Noer. (1990). *Mohammad Hatta Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES.
- _____. (1996). *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Jakarta: Kronik Indonesia Baru.
- Gottschalk, Louis. (1985). *Mengerti Sejarah*. trj Nugroho Noto Susanto. Jakarta: UI Press.
- Hersri Setiawan. (2002). *Negara Madiun Kesaksian Soemarsono Pelaku Perjuangan*. Jakarta: Forum Studi Perubahan dan Peradaban (FuSPAD).
- Himawan Soetanto. (1994). *Perintah Presiden Soekarno Rebut Kembali Madiun (Siliwangi Menumpas Pemberontakan PKI/Moeso 1948)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Imam Soedjono. (2006). *Yang Berlawan Membongkar Tabir Pemalsuan Sejarah PKI*. Yogyakarta: Resist Book.
- Ismail Suny.(1986). *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif Suatu Penyelidikan Dalam Hukum Tata Negara*. Jakarta: Aksara Baru.
- Joeniarto. (1990). *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kahin, George Mc Truman. (1995). *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Jakarta: UNS Perss-Pustaka Sinar Harapan.
- Koentowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng Budaya.
- Mavis, Rose. (1991). *Indonesia Merdeka Biografi Politik Mohammmad Hatta*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Meutia Farida Swasono. (1980). *Bung Hatta Pribadi Dalam Kenangan*. Jakarta: Sinar Harapan-Universitas Indonesia.
- Miriam Budiardjo. (2003). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Moedjanto, G. (1988). *Indonesia Abad ke-20 jilid 2*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Mohammad Hatta. (1979). *Mohammad Hatta Memoir*. Jakarta: Tintamas.
- Mohammad Kusnardi & Bintang R. Saragih. (1986). *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Gramedia.
- Muhammad Ridhwan Indra. (1988). *MPR Selayang Pandang*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Onghokham. (1983). *Rakyat dan Negara*. Jakarta: Sinar Harapan

Pinardi. (1967). *Peristiwa Coup Berdarah P.K.I September 1948 di Madiun*. Jakarta: INKOPAK-HAZERA.

Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI. (1995). *Bahaya Laten Komunis di Indonesia Jilid I Perkembangan Gerakan dan Penghianatan Komunisme di Indonesia 1913-1948*. Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI.

Sartono Kartodirdjo. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia

Soe Hok Gie. (1997). *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan Kisah Pemberontakan Madiun September 1948*. Yogyakarta: Bentang Budaya

Sri Edi Swasono & Fauzie Ridjadi. (1992). *Mohammad Hatta Beberapa Pokok Pikiran*. Jakarta: UI-Press

Sutarjo Adikusilo, J.R.,(1998). *Kapita Selekta Sejarah Eropa Abad XVIII-XIX Revolusi, Nasionalisme, Demokrasi, Komunisme.* Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma

Suwarno, P.J. (2004). *Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Wangsa Widjaja, I. (1988). *Mengenang Bung Hatta*. Jakarta: CV Haji Masagung.

_____ & Meutia Farida Swasono. (1981). *Mohammad Hatta Kumpulan Pidato dari tahun 1942-1949*. Jakarta: Yayasan Idayu.

Yayasan Idayu. (1980). *Bung Hatta Kita Dalam Pandangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Idayu.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 1

SILABUS KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Satuan Pendidikan : SMA
 Mata Pelajaran : Sejarah
 Kelas/Program : XII/IPS
 Semester : I
 Standar Kompetensi : Menganalisis perjuangan Bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru

Kompetensi Dasar	Materi Pokok/Uraian Materi	Indikator	Pengalaman Belajar	Penilaian	Alokasi Waktu	Bahan/Sumber/Alat
Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disintegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan (antara lain: PKI Madiun 1948, DI/TII, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G-30-S/PKI)	<p>Bung Hatta dalam Menghadapi Pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) di Madiun 18 September 1948</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Latar belakang Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 1948 ▪ Usaha-usaha Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 1948 ▪ Hasil usaha Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 1948 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendeskripsikan latar belakang Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 1948 ▪ Mendeskripsikan usaha-usaha Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 1948 ▪ Mendeskripsikan hasil usaha Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 1948 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Siswa bekerjasama dalam kelompok. ▪ Siswa melalui studi pustaka yang terjangkau, mencari informasi tentang latar belakang Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 1948 ▪ Siswa melalui studi pustakan yang terjangkau, mencari informasi tentang usaha-usaha Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 1948 ▪ Siswa melalui studi pustakan yang terjangkau, mencari informasi tentang hasil usaha Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 1948 ▪ Siswa berdiskusi untuk mengemukakan hasil kelompoknya. ▪ Siswa mampu menyimpulkan hasil diskusi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penilaian non tes. ▪ Tes tertulis 	5 x 45 menit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transparansi ▪ Spidol transparan ▪ OHP ▪ Kertas lebar ▪ Spidol ▪ Sekitar Perang Kemerdekaan jilid 8 Pemberontakan PKI 1948 ▪ Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia ▪ Peristiwa Coup Berdarah PKI September 1948 di Madiun ▪ Gambar-gambar sejarah yang berkaitan dengan peristiwa Madiun. Contoh gambar tokoh sejarah Bung Hatta dan Musso

Mengetahui
Kepala Sekolah

Yogyakarta,.....
Guru Mata Pelajaran

Lampiran 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata pelajaran	: Sejarah
Kelas/Semester	: XII/I
Pertemuan Ke	: 1 sampai dengan 3
Alokasi Waktu	: 5 x 45 menit

I. Standar Kompetensi :

Menganalisis perjuangan Bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru

II. Kompetensi Dasar :

Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disintegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan (antara lain: PKI Madiun 1948, DI/TII, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G-30-S/PKI)

III. Indikator :

1. Mendeskripsikan latar belakang Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 1948
2. Mendeskripsikan usaha-usaha Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 1948
3. Mendeskripsikan hasil usaha Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 1948

IV. Tujuan Pembelajaran :

1. Setelah melakukan studi pustaka dalam diskusi kelompok siswa dapat mendeskripsikan latar belakang Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun dengan benar
2. Setelah melakukan studi pustaka dalam diskusi kelompok siswa dapat mendeskripsikan usaha-usaha Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun dengan benar
3. Setelah melakukan studi pustaka dalam diskusi kelompok siswa dapat mendeskripsikan hasil usaha Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun dengan benar

V. Materi Ajar (Pokok) :

Bung Hatta dalam Menghadapi Pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) di Madiun 18 September 1948

1. Latar Belakang Bung Hatta Dalam Menghadapi Pemberontakan PKI di Madiun 1948
 - a. Bung Hatta memegang kekuasaan sebagai perdana menteri
 - b. Bung Hatta memegang kekuasaan sebagai menteri pertahanan
 - c. Pemberontakan PKI Madiun membahayakan kepentingan nasional dan tidak mencerminkan kepentingan nasional
2. Usaha-usaha Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 1948
 - a. Sebagai Perdana Menteri
 - 1) Mengadakan sidang kabinet untuk menentukan sikap pemerintah terhadap peristiwa Madiun
 - 2) Mengusulkan undang-undang tentang pemberian kekuasaan penuh kepada presiden dalam keadaan bahaya
 - b. Sebagai Menteri Pertahanan
 - Menugaskan angkatan perang untuk melakukan gerakan penumpasan pemberontakan PKI di Madiun 1948

3. Hasil usaha Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 1948
 - a. Kembalinya Madiun dan daerah-daerah lain ke tangan pemerintah RI
 - b. Tertangkapnya Muso pimpinan utama PKI
 - c. Tertangkapnya Amir Sjarifuddin dan beberapa tokoh PKI lainnya

VI. Metode Pembelajaran :

Ceramah, Tanya jawab, Diskusi kelompok, dan Presentasi

VII. Langkah-Langkah Pembelajaran :

Pertemuan ke 1 (2x45 Menit)

A. Kegiatan Awal

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, inti materi, aspek penilaian dan proses pembelajaran.
2. Guru menggali kemampuan awal siswa dan sekaligus membangkitkan motivasi siswa untuk berpendapat sesuai pengetahuan dan pengalamannya yang berkaitan dengan pemahaman Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 18 September 1948
3. Guru membagi siswa dalam 3 (tiga) kelompok.

B. Kegiatan Inti

1. Kelompok 1 ditugaskan untuk mencari informasi yang berhubungan dengan latarbelakang Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun
2. Kelompok 2 diberi tugas mencari informasi tentang usaha-usaha Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun
3. Kelompok 3 ditugaskan mencari informasi tentang hasil usaha Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun
4. Waktu memanfaatkan pertemuan hingga berakhir dan dilanjutkan di luar jam pelajaran sebagai tugas rumah.

Catatan :

- Hasil diskusi tiap kelompok dituliskan pada transparan jika ada atau pada kertas yang lebar.
- Selanjutnya kelompok diskusi mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Setiap presentasi kelompok, memberikan kesempatan kelompok siswa yang lain untuk memberi respon, bertanya, saran, masukan.
- Presentasi tidak terlepas dari arahan dan bimbingan dari guru.
- Akhir setiap kegiatan inti siswa diminta membuat kesimpulan atau catatan penting.

C. Kegiatan Akhir

Guru mengingatkan kepada semua kelompok khususnya kelompok 1 (pertama) untuk mempersiapkan presentasinya pada pertemuan ke dua.

Pertemuan ke 2 (1X45 Menit)

A. Kegiatan Awal

Guru membuka pelajaran dengan menayakan kesiapan tugas yang akan dipresentasikan oleh kelompok pertama.

B. Kegiatan inti

1. Presentasi dari kelompok 1 mengenai latar belakang Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun
2. Dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.
3. Tiap siswa membuat catatan sendiri tentang informasi yang dianggap penting.

C. Kegiatan Akhir

Siswa secara bersama-sama diberi kesempatan menyimpulkan tentang topik yang sedang dibahas dan guru memberi penguatan.

Pertemuan ke 3 (2X45 Menit)

A. Kegiatan Awal

Guru membuka pelajaran dengan mengulas secara singkat hasil diskusi kelompok pertama guna menyegarkan kembali ingatan siswa tentang pelajaran sebelumnya

B. Kegiatan inti

1. Presentasi dari kelompok 2 tentang usaha-usaha Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun.
2. Dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab materi kelompok 2
3. Tiap siswa membuat catatan sendiri tentang informasi yang dianggap penting.
4. Presentasi dari kelompok 3 tentang hasil usaha Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun
5. Dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab materi kelompok 3
6. Tiap siswa membuat catatan sendiri tentang informasi yang dianggap penting

C. Kegiatan Akhir :

Siswa secara bersama-sama diberi kesempatan menyimpulkan tentang topik yang sedang dibahas dan guru memberi penguatan.

VII. Alat dan Sumber Belajar :

Sumber :

- A.H. Nasution. (1979). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 8 Pemberontakan PKI 1948*. Bandung: DISJARAH-AD dan Angkasa.
- Kahin, George Mc Truman. (1995). *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Jakarta: UNS Perss-Pustaka Sinar Harapan.
- Pinardi. (1967). *Peristiwa Coup Berdarah P.K.I September 1948 di Madiun*. Jakarta: INKOPAK-HAZERA.

Bahan : Transparansi, Spidol transparans, OHP.

Alat : Gambar-gambar yang berkaitan dengan peristiwa Madiun.

Penilaian:

A. Penilaian Non Tes

Kegiatan yang Diamati											
Nama	Orientasi	Mengemukakan Pendapat	Kerjasama	Mempresentasikan hasil	Mengajukan Pertanyaan	Menjawab Pertanyaan	Memberikan Tanggapan	Tanya Jawab dst	Jumlah Skor	Keterangan	

Keterangan : 4 = Sangat Baik

3 = Baik

2 = Cukup

1 = Kurang

B. Penilaian Tes

Bentuk tes : Esai

Butir-butir tes :

1. Jelaskan latar belakang Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 1948 !
2. Jelaskan usaha-usaha Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 1948:
 - a. Bung Hatta sebagai perdana menteri !
 - b. Bung Hatta sebagai menteri pertahanan !
3. Terangkan secara singkat bagaimana hasil usaha Bung Hatta dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 1948 !

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Yogyakarta,

Guru Mata Pelajaran

Dra. Th. Anita Purwani
Nip:

Yulius Dwi Cahyono
Nip:

Lampiran 3



Gambar I. Mohammad Hatta

Sumber:

Rais Alamsjah, *10 Orang Indonesia Terbesar Sekarang*, Jakarta: Mutiara, 1952, hlm. 30.

Lampiran 4

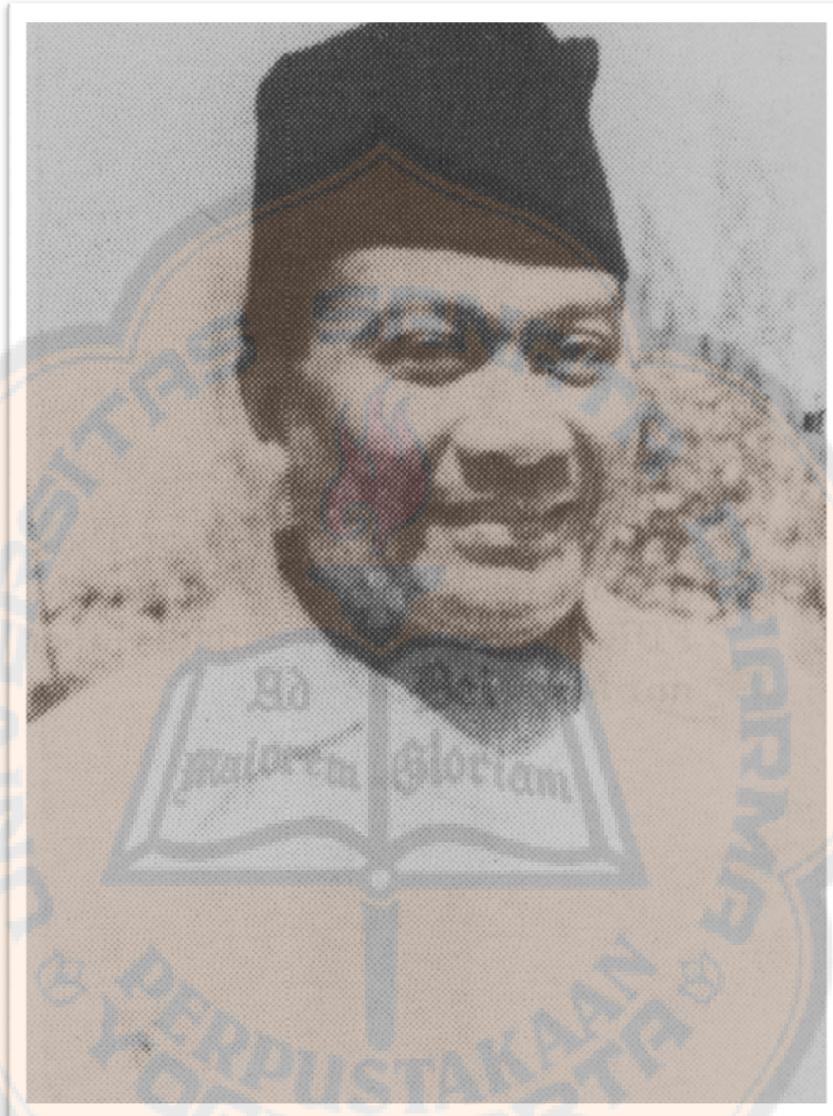


Gambar II. Sidang Kabinet Hatta untuk menentukan sikap pemerintah terhadap PKI Muso yang melakukan perampasan kekuasaan pemerintah di Madiun.
(Foto Mohammad Hatta ditunjukkan dengan tanda panah)

Sumber:

Kompas, *Bung Hatta*, Jakarta, Kompas, 2003, hlm. 225.

Lampiran 5

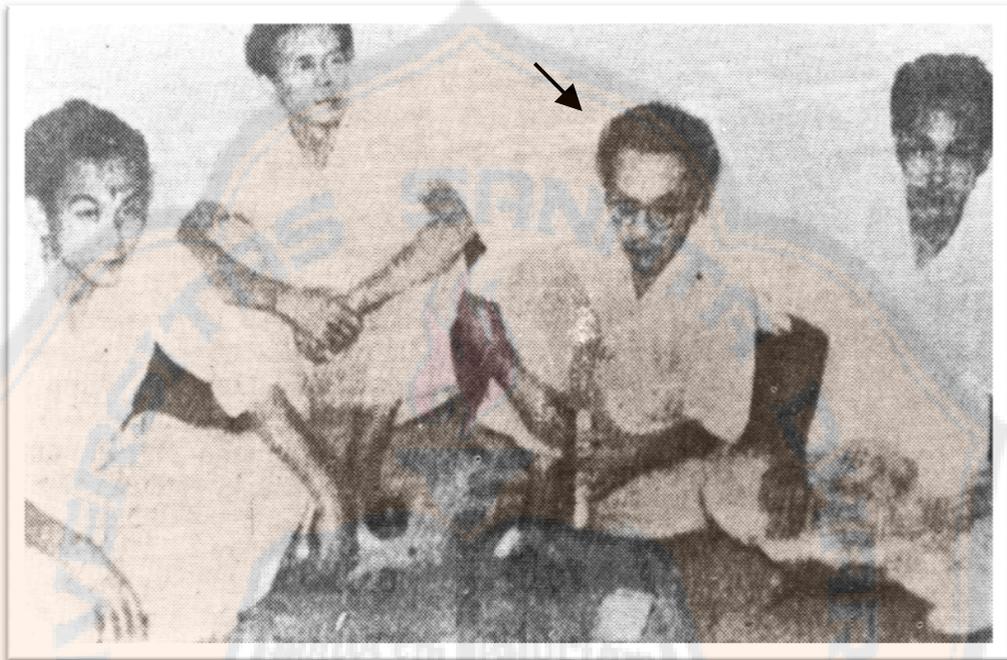


Gambar III. Muso
(Pemimpin Partai Komunis Indonesia tahun 1948)

Sumber:

Himawan Soetanto, *Perintah Presiden Soekarno Rebut Kembali Madiun (Siliwangi Menumpas Pemberontakan PKI/Moeso 1948)*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 259.

Lampiran 6



Gambar IV. Amir Sjarifuddin (ditunjukkan dengan tanda panah) dan beberapa tokoh PKI lainnya, setelah tertangkap pasukan TNI (Dari kiri ke kanan Soeripno, Harjono, Amir Sjarifuddin, dan Maroeto Daroesman)

Sumber:

Himawan Soetanto, *Perintah Presiden Soekarno Rebut Kembali Madiun (Siliwangi Menumpas Pemberontakan PKI/Moeso 1948)*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 264.